

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PEMULIHAN KONDISI EKONOMI  
MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ILHAM MAULANA DANDI**

**NIM. 175030101111009**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2021**

MOTTO

*“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu.”*

**--Ilham Maulana Dandi--**



# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 19 Juli 2021  
Jam : 08.30 – selesai  
Skripsi Atas Nama : Ilham Maulana Dandi  
Judul : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan

Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19  
(Studi Di Kota Malang)

Dan dinyatakan

**Lulus**

**Majelis Penguji**

Ketua

Anggota

**Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197105101998031004

**Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA**  
NIP. 198607162014041001

Anggota

Anggota

**I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D**  
NIP. 2011068312041001

**Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG**  
NIP. 198106012005011005

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Malang)

Nama Mahasiswa : Ilham Maulana Dandi

NIM : 175030101111009

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 16 Juli 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. M. R. Khairul Muluk., S.Sos., M.Si  
NIP. 197105101998031004

Ali Maskur, S.A.P., M.A.P., MA  
NIP. 198607162014041001

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan dengan sebesar-besarnya sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Malang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 8 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Ilham Maulana Dandi

NIM. 175030101111009



## RINGKASAN

Ilham Maulana Dandi, 2021. **Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. M. R Khairul Muluk., S.Sos., M.Si dan Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA.

---

Pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan krisis medis, sosial, dan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk memutus penyebaran COVID-19 yaitu dengan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian berada di Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik menurut Braun & Clarke (2006).

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Malang telah menerapkan kebijakan-kebijakan dengan cukup efektif dengan memperhatikan tujuan kebijakan, target kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat dan dampak kebijakan. Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang sangat sesuai dengan upaya pemulihan kondisi masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan berupa lima strategi percepatan pemulihan ekonomi hadapi pandemi COVID-19, yaitu Malang Beli Produk Lokal (Malpro), Malang Berbagi (Malber), Malang Herbal (Malherb), Malang Digital Service (Maldis), dan Malang Bahagia (Malba). Selain itu digitalisasi produk IKM untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, rencana aksi TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kota Malang, *refocusing* anggaran, intergrasi mal pelayanan publik. Pemerintah Kota Malang selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan untuk Membuat program bantuan berupa insentif kepada masyarakat agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19. Serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial hingga ke tingkat RT dan RW. Tetap melakukan perencanaan dan koordinasi serta pengkajian lebih mendalam terhadap bagaimana kebijakan yang telah diimplementasikan benar-benar efektif

**Kata Kunci : Kebijakan, COVID-19, Pemulihan, Efektivitas**

## SUMMARY

Ilham Maulana Dandi. 2021. **The Effectiveness of Local Government Policies in Restoring Community Economic Conditions During the Covid-19 Pandemic (Study in Malang City)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. M. R Khairul Muluk., S.Sos., M.Si dan Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA.

---

*The COVID-19 pandemic is an emergency for the world community, including Indonesia, which causes medical, social and economic crises. Various policies have been carried out by the Malang City Government to stop the spread of COVID-19, namely by Restoring Community Economic Conditions. This study aims to determine, explain and analyze the effectiveness of Malang City Government policies in an effort to restore the economic conditions of the people in Malang City.*

*This study uses a type of library research (library research) with a qualitative approach. The research site is located in the Malang City Government. This study uses secondary data sources. Data collection is done through literature study and documentation. While the data analysis in this study used thematic analysis according to Braun & Clarke (2006).*

*The results of this study indicate that the Local Government of Malang City has implemented policies quite effectively by paying attention to policy objectives, policy targets, changes in community behavior, level of public awareness and impact of policies. The policies given by the Malang City Government are very in line with efforts to restore community conditions by issuing policies in the form of five strategies to accelerate economic recovery in the face of the COVID-19 pandemic, namely Malang Buy Local Products (Malpro), Malang Share (Malber), Malang Herbal (Malherb), Malang Digital Service (Maldis), and Malang Bahagia (Malba). In addition, the digitization of IKM products to facilitate services to the community, the Malang City TPKAD (Regional Financial Access Acceleration Team) action plan, budget refocusing, integration of public service malls. Malang City Government always coordinates with the provincial government, central government and related institutions. In this study, researchers suggest creating an assistance program in the form of incentives to the community in order to increase people's purchasing power during the COVID-19 pandemic. As well as making policies related to social assistance down to the RT and RW levels. Continue to do planning and coordination as well as a more in-depth study of how the policies that have been implemented are really effective*

**Keywords: Policy, COVID-19, Recovery, Effectiveness**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Malang)”**. Skripsi merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis meyakini bahwa penyusunan proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, MAP., Ph.D., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. M. R Khairul Muluk., S.Sos., M.Si selaku sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, nasihat, dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak Ali Maskur, S.AP., M.AP., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, nasihat, dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang bermanfaat bagi peneliti serta segenap staf di Fakultas

Ilmu Administrasi yang telah membantu kelancaran skripsi peneliti dari segi administrasi.

7. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan yang saling memberi semangat dan informasi kepada penulis.

9. Kakak-kakak, teman dan seluruh keluarga *Research Study Club* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

10. Serta semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proposal skripsi ini. Namun, penulis tetap berharap bahwa proposal skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan Administrasi Publik, dapat menjadi sedikit masukan bagi Pemerintah Kota Batu serta memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 8 Juli 2021



Ilham Maulana Dandi

**DAFTAR ISI**

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	10
I.3 Tujuan Penelitian .....	10
I.4 Kontribusi Penelitian .....	11
I.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
II.1 Penelitian Terdahulu .....	13
II.2 Efektivitas .....	16
II.3 Kebijakan .....	18
II.4 Efektivitas Kebijakan .....	33
II.5 Manajemen Bencana .....	51
II.6 Pemulihan ( <i>Recovery</i> ) .....	57
II.7 COVID-19 ( <i>Corona Virus Disease-2019</i> ) .....	78
II.8 Kerangka Konseptual .....	81
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>83</b>
III.1 Jenis Penelitian .....	83
III.2 Fokus Penelitian .....	85

III.3 Lokasi dan Situs Penelitian .....	89
III.4 Sumber Data .....	90
III.5 Teknik Pengumpulan Data .....	95
III.7 Teknik Analisis Data .....	102
III.8 Uji Keabsahan Data .....	104
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>106</b>
IV.1 Gambaran Umum Kebijakan Pemulihan di Kota Malang .....	106
IV.2. Penyajian Data.....	115
IV.2.1 Tujuan Kebijakan .....	115
IV.2.2 Target Kebijakan .....	120
IV.2.3 Perubahan Perilaku Masyarakat .....	124
IV.2.4 Tingkat Kesadaran Masyarakat .....	129
IV.2.5 Dampak Kebijakan .....	134
IV.3 Pembahasan.....	139
IV.3.1 Tujuan kebijakan .....	140
IV.3.2 Target kebijakan .....	144
IV.3.3 Perubahan Perilaku Masyarakat .....	146
IV.3.4 Tingkat kesadaran masyarakat.....	148
IV.3.5 Dampak kebijakan.....	151
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>155</b>
V.1 Kesimpulan .....	155
V.2 Saran .....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>168</b>



**DAFTAR TABEL**

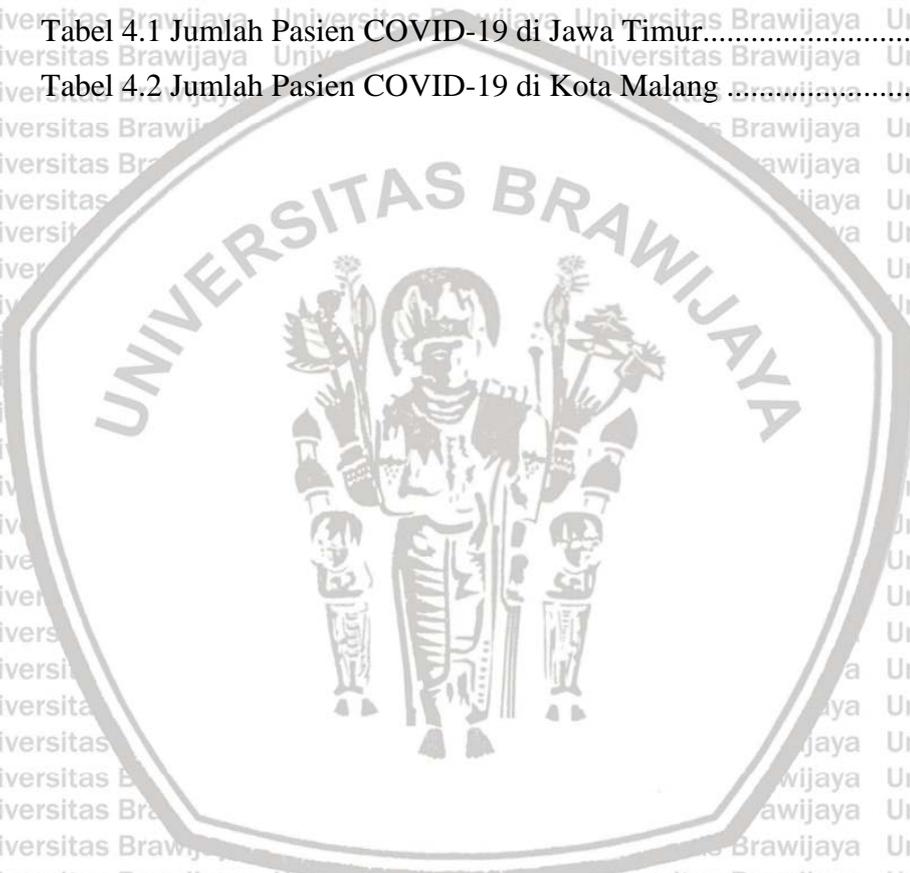
Tabel 2.1 Pendekatan Keefektifan ..... 50

Tabel 3.1 Sumber Data..... 90

Tabel 3.2 Studi Pustaka..... 97

Tabel 4.1 Jumlah Pasien COVID-19 di Jawa Timur..... 108

Tabel 4.2 Jumlah Pasien COVID-19 di Kota Malang ..... 109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Informasi COVID-19 Di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Informasi COVID-19 Di Kota Malang .....	4
Gambar 1. 4 Jumlah Wisatawan (2020).....	6
Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan .....	25
Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana .....	54
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual .....	82
Gambar 4. 1 FGD Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Malang.....	117
Gambar 4. 2 Inflasi per Bulan Kota Malang Tahun 2020.....	118
Gambar 4.3 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.....	121
Gambar 4. 4 Seminar Pemulihan Ekonomi Malang Raya 2021 .....	122
Gambar 4. 5 lustrasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Malang.....	126
Gambar 4. 6 Operasi Yustisi di Kota Malang.....	131

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	168
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	170
Lampiran 3 SE Wali Kota Malang tentang PPKM Kota Malang.....	177
Lampiran 4 Peraturan Wali Kota Malang tentang PSBB Kota Malang.....	178
Lampiran 5 SE Wali Kota Malang tentang PPKM darurat Kota Malang.....	179
Lampiran 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Penerapan Protokol Kesehatan ..	180
Lampiran 7 Intruksi Presiden Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.....	181

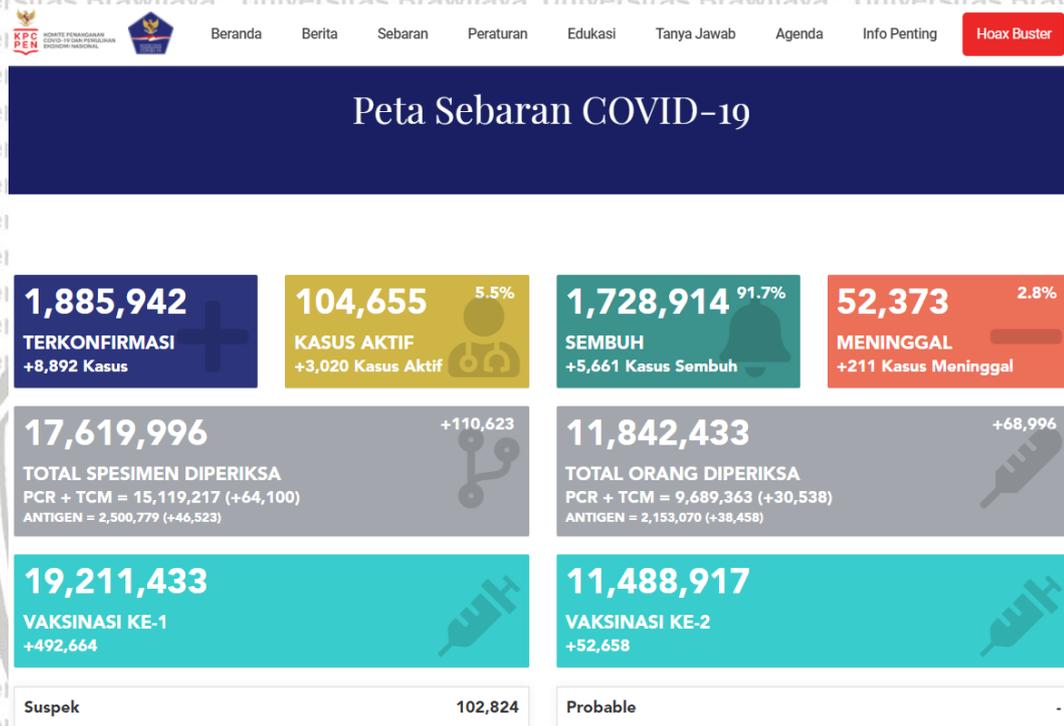


## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sejak bulan Maret tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pada bulan Desember 2019, COVID-19 menjadi misteri yang mengerikan di Wuhan, China. Banyak orang merasakan sesak napas, kejang-kejang, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Penelitian-penelitian terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab masyarakat di Kota Wuhan mengalami hal tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa masyarakat telah terinfeksi virus Corona atau SARSCoV-2. Pada kasusnya yang pertama kali di China, virus corona sudah menginfeksi setidaknya 90.308 orang per tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya itu, jumlah kematiannya mencapai 3.087 orang atau sekitar 6%. Sementara jumlah pasien yang sembuh adalah 45.726 orang. Jika dilihat dari struktur virus, coronavirus adalah RNA strain tunggal positif yang bisa menginfeksi saluran pernapasan manusia. Virus ini bersifat sensitif terhadap suhu panas sehingga secara efektif bisa dinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin. Tak hanya itu, sumber host atau sumber virus ini diduga berasal dari hewan terutama kelelawar, dan vektor lain seperti tikus bambu, dan musang (Yuliana, 2020). Sementara itu, WHO (2020) menyatakan bahwa penyebaran virus Corona sangat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan penyebaran virus yang merambah hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Awal mula kasus di Indonesia, terjadi pada bulan Maret 2020 yang kemudian tumbuh serta menyebar ke daerah-daerah yang ada di

Indonesia. Setiap harinya kasus terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona terus bertambah. Begitu halnya dengan pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ditambah adanya komplikasi penyakit berat sehingga presentase bertahan jadi lebih sedikit.



Gambar 1.1 Informasi COVID-19 Di Indonesia

Sumber: Covid19.go.id

Adapun total kasus di Indonesia Mulai dari 1 Maret 2020 hingga 11 Juni 2021 yang mencapai 1.885.942 Kasus Positif. Kemudian Pasien Meninggal 52.373, dan 1.728.914 pasien yang sembuh (Covid19.go.id, 2020-2021). Ragam kebijakan dalam menangani Virus Corona (COVID-19), demi melindungi warganya dari tertularnya COVID-19, langkah-langkah terus dilakukan mulai dari menciptakan vaksin maupun kebijakan yang dibuat untuk mencegah penyebaran Virus Corona, seperti *Social Distancing* dan *Locdown*. Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat

menghindari kematian akibat virus Corona dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini. Namun pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah COVID-19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan model kelembagaan, pemerintah memiliki tugas membuat kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Pemerintah dituntut segera mungkin melakukan aksi nyata dalam menangani COVID-19 di negeri ini.

Berbagai daerah di Indonesia menanggapi hal tersebut dengan berbagai respon. Respon yang dihadapi setiap daerah dalam menghadapi COVID-19 berbeda-beda. Dikutip dari Laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2020) menyatakan bahwa pemerintah daerah masing-masing mengambil keputusan dalam membuat sebuah kebijakan yang mencakup empat aspek yaitu, pencegahan, respons, pemulihan, dan melakukan konsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, kebijakan yang dilakukan setiap daerah yang ada di Indonesia yaitu dengan memperkuat sistem pelayanan kesehatan, melakukan *social distancing*, *physical distancing* sampai dengan *lockdown*. Berkaitan dengan kebijakan, maka secara konseptual esensi kebijakan yang dilakukan diperuntukkan untuk empat hal, yakni memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat; mengatur dan mengendalikan masyarakat; serta mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi berwenang. Dikutip dari Laporan rapat kerja DPRD Kota Malang (2020) juga menyatakan bahwa peranan segala instansi sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tanggap darurat COVID-19, termasuk peran Satpol PP, TNI,

dan POLRI.

KECAMATAN	SUSPEK							KONFIRMASI COVID			
	ISOLASI RUMAH/RAWAT JALAN	ISOLASI RS	DISCARDED	PROBABLE			TOTAL	DALAM PANTAUAN	SEMBUH	MENINGGAL	TOTAL
				MENINGGAL	RAWAT RS	RAWAT JALAN					
KEDUNGKANDANG	10	10	1485	21	0	0	1526	4	1129	118	1261
SUKUN	7	25	1500	29	0	0	1561	10	1186	147	1343
BLIMBING	13	30	1509	24	0	0	1576	9	1525	135	1669
KLOJEN	5	11	960	22	0	0	998	7	805	110	922
LOWOKWARU	11	32	1431	22	0	0	1496	7	1470	126	1603
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>108</b>	<b>6885</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7157</b>	<b>37</b>	<b>6115</b>	<b>636</b>	<b>6788</b>

SUMBER : SATGAS COVID-19 KOTA MALANG

malangkota.go.id @pemkotmalang Pemerintah Kota Malang

Gambar 1.2 Informasi COVID-19 Di Kota Malang

Sumber: Pemerintah Kota Malang (Twitter) 2021

Berdasarkan data kasus khusus di Kota Malang pada 10 Juni 2021 adalah 6788 untuk kasus terkonfirmasi positif, pasien sembuh 6116 dan pasien meninggal 638 orang (Satgas COVID-19 Kota Malang, 2021). Fenomena ini membawa petaka bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat khususnya di Kota Malang. Terlebih sejak diberlakukannya *social distancing* yang kemudian diubah penamaannya menjadi *physical distancing*. Selain itu dampak pandemi COVID-19 melumpuhkan hampir seluruh sektor perekonomian di beberapa daerah termasuk di Kota Malang. Kota Malang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 karena sebagai besar perekonomian Kota Malang ditopang oleh sektor industri dan jasa. Sektor ekonomi yang secara kasatmata dapat di-capture penurunannya akibat dampak pandemi Covid-19 adalah sektor perdagangan, transportasi dan pariwisata dengan segala subsektor pendukungnya seperti hotel, restoran, biro travel, jasa pariwisata

dan lain-lainnya.

Sektor perekonomian, termasuk pasar tradisional Di Kota Malang, begitu terasa daya beli masyarakat lesu, pasar tradisional pun sepi pengunjung. Omset para pedagang menurun drastis. Berdasarkan Data Pusat Statistik tahun 2021. Konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat melemah pada tahun 2020 yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Malang

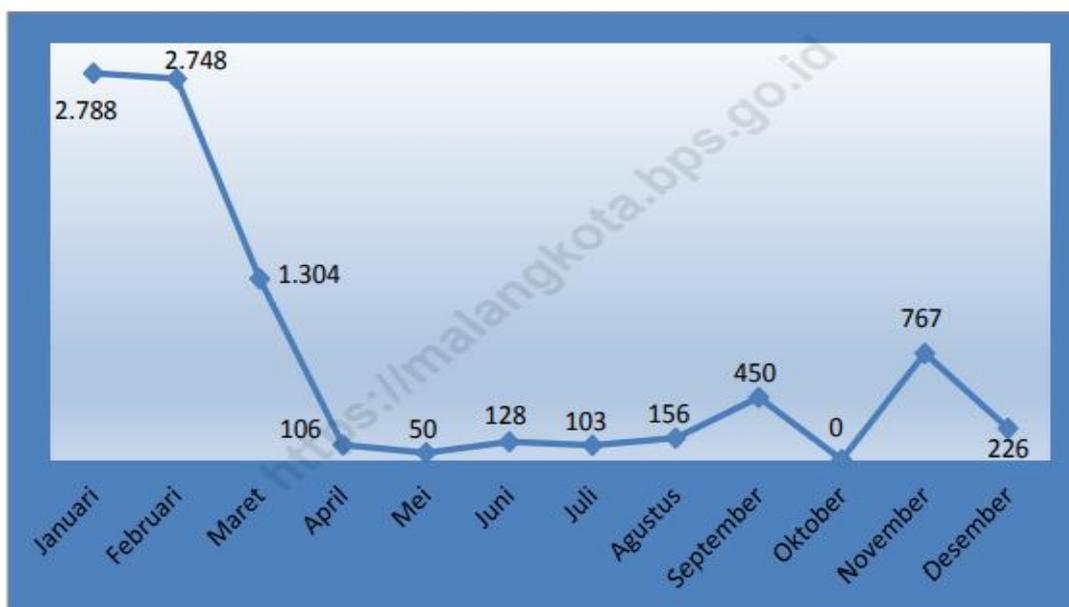
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi Rumah Tangga</b>					
a. ADHB (Miliar Rp)	40 398,84	43 678,38	47 523,60	51 657,04	49 743,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	30 838,46	32 405,85	34 066,65	35 807,40	34 434,25
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,66	70,35	70,20	70,99	68,93
<b>Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)</b>					
a. ADHB	175 534,17	188 681,21	204 176,87	220 771,69	211 572,65
b. ADHK 2010	133 994,03	139 986,32	146 361,44	153 033,52	146 457,69
<b>Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)</b>					
a. ADHB	47 172,31	50 705,44	54 869,65	59 329,40	56 857,08
b. ADHK 2010	36 008,99	37 619,37	39 332,57	41 125,69	39 358,38
<b>Pertumbuhan<sup>2</sup></b>					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	5,04	5,08	5,12	5,11	-3,83
b. Per-Rumah Tangga	5,14	4,47	4,55	4,56	-4,30
c. Perkapita	5,14	4,47	4,55	4,56	-4,30
Jumlah Rumah Tangga (unit)	230 148	231 493	232 757	233 984	235 114
Jumlah penduduk (org)	856 410	861 414	866 118	870 682	874 890

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2021 (2021)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2020 konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan kecuali pada tahun 2020. Kenaikan konsumsi ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Pertumbuhan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai

konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara dengan terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberikan efek pada turunnya konsumsi rumah tangga. pertumbuhannya tertekan hingga mencapai -4,30 persen. Perubahan pertumbuhan rata-rata konsumsi ini tentunya berpengaruh pula terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga saat menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 serta perlu adanya adaptasi pola konsumsi yang harus dilakukan oleh masyarakat. tent

Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu juga berdampak terhadap sektor perekonomian dari pariwisata terbukti dari kunjungan wisata di Kota Malang terus menurun. Salah satu destinasi wisata andalan di kota pendidikan adalah wisata kampung tematik. Kini, tingkat kunjungannya menurun drastis, atau hanya sekitar 10 hingga 20 persen saja.



Gambar 1. 3 Jumlah Wisatawan (2020)

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2021 (2021)

Bahkan, penurunan jumlah wisatawan itu membuat sejumlah kampung tematik menutup operasionalnya. Meski begitu, Pemerintah Kota Malang berupaya memberikan bantuan untuk menunjang penerapan protokol kesehatan di kampung wisata. Mulai dari bantuan thermogun, hand sanitizer, hingga tempat cuci tangan.

Menurunnya kunjungan wisata itu juga berdampak pada sektor perekonomian warga. Pasalnya, sebagian warga membuka usaha dengan segmentasi wisatawan, mulai dari berjualan makanan, minuman, hingga cinderamata. Segmentasinya adalah wisatawan. Di kampung tersebut, ada sekitar 40an warga yang membuka usaha warung. Meski jumlah kunjungan menurun drastis, namun warga sebagai pengelola kampung tetap mencoba bertahan. Salah satunya tetap buka namun menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Adanya ketidakpastian ini memerlukan kebijakan yang tepat untuk mengembalikan atau memulihkan perekonomian masyarakat di Kota Malang.

Adanya ketidakpastian ini juga berdampak terhadap segala aktivitas masyarakat yang ada di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang harus memperhatikan aspek ekonomi juga agar masyarakat dapat hidup secara tenang. Kota Malang mempunyai potensi ekonomi kreatif (ekraf) yang luar biasa yang terus dioptimalkan dan dimaksimalkan yang telah ada. Ekonomi kreatif menjadi pusat kekuatan, keberlanjutan dan keterpaduan ekonomi Kota Malang. Jadi diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Jika hal itu gagal dimanfaatkan akan berdampak buruk terhadap perekonomian di Kota Malang.

Berbagai cara dan kebijakan diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk

percepatan pemulihan ekonomi hadapi pandemi COVID-19. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tampaknya masih diwarnai kendala baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dikutip dari Laporan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2020), Presiden Jokowi memberikan arahan pada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas). Namun terdapat beberapa daerah yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat karena pemerintah daerah merasa mempunyai tanggung jawab atas kondisi yang terjadi di daerahnya. Beragamnya respon dan tindakan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 oleh pemerintah daerah tentu merupakan persoalan yang serius. Daerah memiliki respon tersendiri dimana cenderung tidak adanya kerjasama antar elemen. Salah satu upaya pemulihan kondisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang memiliki lima strategi percepatan pemulihan ekonomi hadapi pandemi COVID-19, yakni dengan mengeluarkan kebijakan dan program Malang Beli Produk Lokal (Malpro), Malang Berbagi (Malber), Malang Herbal (Malherb), Malang Digital Service (Maldis), dan Malang Bahagia (Malba). Wali Kota Malang Bapak Sutiaji mengungkapkan lima strategi itu yaitu seperti Malang Beli Produk Lokal (Malpro) yang tujuan untuk mendorong penguatan ekonomi dan UMKM lokal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi masing-masing pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, diantara persoalan yang sempat mengemuka dan terjadi pada banyak daerah di Indonesia adalah soal bantuan sosial yang diakibatkan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dan bantuan dirasa tidak meng-cover semua korban terdampak terutama dari kalangan

tidak mampu..

Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 antara koordinasi dan sinergi antar elemen harus diperkuat. Ketidakmampuan suatu daerah mengatasi persoalan tersebut akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di daerahnya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin di setiap daerah yang memiliki daya tanggap yang rendah dalam strategi mengurangi kasus COVID-19 di daerahnya. Lemahnya kepemimpinan menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap aturan yang ada karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin dan akhirnya masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri. Dikutip dari BBC News Indonesia (2020), upaya pemerintah bukanlah sosialisasi, sehingga sulit untuk membangun kesadaran perilaku di masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Pada umumnya, tingkat efektivitas kebijakan suatu daerah dalam strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ditentukan dari seberapa mampu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, juga dilihat dari kapasitas daerah untuk mengelola sumber daya secara tepat untuk mengurangi kasus COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat.

Memobilisasi masyarakat merupakan faktor yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dapat tercapai. Hal itu sesuai dengan Teori tentang efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Matland dalam Nugroho (2008:158) efektivitas kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung meng

efektivitaskan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Problematika pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang dengan melihat cara pemerintah Kota Malang merespons situasi pandemi yang dalam beberapa aspek membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi yang seringkali bernuansa kontestasi dengan otoritas nasional, maka dituntut hadirnya kebijakan yang dapat secara efektif menangani persoalan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang. Karena COVID-19 telah menjadi pandemi yang menyebar di daerah Kota Malang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Di Kota Malang)**”.

### **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas

kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.

#### **I.4 Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap aspek teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan kajian Ilmu Administrasi Publik, menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti maupun pembaca yang berkaitan dengan kebijakan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.
- b. Memberikan sumbangan saran bagi pemangku kepentingan dalam rangka penanganan COVID-19

##### **2. Kontribusi Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Malang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya di bidang pelayanan publik, pengelolaan dalam penanganan kebijakan COVID-19.

### **I.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi lima bab, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis dari hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan COVID-19 di Kota Malang.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data terkait strategi pemerintah daerah dalam tanggap darurat COVID-19 di Kota Malang.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi penguraian secara umum dan mendalam tentang masalah yang diteliti, membahas hasil penelitian, serta mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penelitian untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

## **BAB V : PENUTUP**

Penutup memuat kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memuat saran berisi rekomendasi dari peneliti terkait efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat COVID-19 Kota Malang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai penuntun bagi penelitian yang dilaksanakan. Peneliti mampu mempelajari penelitian sebelumnya agar mampu memberikan kontribusi yang berbeda baik dari segi proses maupun dari segi hasil, serta mengetahui posisi dan keberadaan penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam pengembangan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad A1 Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan (2021) yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di perbankan syariah dapat menunjang pemulihan ekonomi Nasional dan bisa menjadi salah satu solusi untuk pelaku usaha UMKM untuk keluar dari permasalahan ekonomi akibat terdampak pandemi covid-19. Salah satu pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah mudharabah dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, pembiayaan dengan akad mudharabahh dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia, pembiayaan dengan akad mudharabah dapat menmb berikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi

yang bagus serta pembiayaan dengan akad mudharabah dapat menstabilkan permodalan pelaku usaha UMKM.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraeny Puspaningtyas (2021) yang berjudul “Optimalisasi Sektor Unggulan Kota Surabaya Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19” menunjukkan bahwa Pengembangan basis ekonomi Kota Surabaya pada masa pandemi sudah menerapkan pertumbuhan ekonomi berbasis lokalitas yang bertumpu pada sektor penyediaan akomodasi dan makan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah melakukan pengembangan lokalitas Kota Surabaya dengan melakukan pembinaan pelaku usaha dan pelaku rintisan usaha. Pengembangan lokalitas dengan sistem cluster di beberapa wilayah belum dilengkapi dengan sentra produk khas Kota Surabaya. Dari segi kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya sudah saling berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan berbagai pelatihan untuk pelaku ekonomi. secara garis besar sudah melaksanakan beberapa pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, namun masih ada catatan yang perlu diperbaiki. Peran serta kelembagaan tersebut masih belum sesuai dengan yang diinginkan, sebagai contoh dalam pengelolaan UMKM yang ada tersebut masih belum mampu untuk dikoordinir dengan baik. pengelolaan dapat dilakukan dengan membentuk koperasi atau lembaga lain yang mempunyai tujuan untuk menjaga kesinambungan usaha dari UMKM. Faktor yang diperhatikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surabaya adalah kendala jaringan usaha. Dengan adanya pandemi yang melanda, banyak sekali jaringan yang sudah terbentuk, mendadak mengalami pengurangan bahkan pemutusan dalam distribusi barang dan jasa. Bagi

pelaku usaha baru, lemahnya akses informasi pasar dan belum optimalnya produk UMKM yang dapat menjangkau konsumen. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kewenangan sebagai pembina dan fasilitator masyarakat Kota Surabaya untuk membuka sebuah usaha atau mengembangkan usahanya. Dalam pengembangan teknologi, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mendukung pelaku UMKM. Selain pihak swasta, berbagai pihak seperti peneliti, lembaga penelitian, dunia usaha dan lainnya diupayakan mendukung kegiatan pemerintah. Marketplace sebagai media online berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan. Bagi supplier/penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa mereka. Marketplace merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional era kompetitif global dan di masa pandemi Covid-19.

Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Nasrun yang berjudul "Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu" menunjukkan hasil bahwa 1) Strategi dalam pemulihan ekonomi di Kapuas Hulu adalah mengandalkan usaha rakyat, UMKM, koperasi dan BUMDes yang mengolah sumber daya alam dan merupakan usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya, (2) Perlu penguatan usaha berupa: permodalan, jaringan telekomunikasi, digitalisasi usaha, membentuk jaringan usaha, dan perluasan pemasaran, (3) Pemerintah harus membuat perencanaan dan peta jalan pemulihan ekonomi dan mengorganisir semua pihak yang terkait, dan (4) Kratom patut dijadikan sebagai produk unggulan dan usaha andalan rakyat.

## II.2 Efektivitas

### II.2.1 Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.

### II.2.2 Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process approach*. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* dan *competing-values approach*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem.

Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

- a. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan
- b. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tujan manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.

### II.2.3 Kriteria Efektivitas

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

## II.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas;
- b. Struktur;
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat;
- d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Tingkat Efektivitas akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas.

Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan efektivitas adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Richard M Steers (1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu :

1. Karakteristik
2. Karakteristik Pekerja
3. Prestasi Kerja
4. Karakteristik Lingkungan

## 5. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kemudian, empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:8) peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Karakteristik adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan . Jadi apabila suatu menginginkan keberhasilan, tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan.
4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan.

Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi. Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan;
- b. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkungan;
- c. Kelangsungan hidup membutuhkan pergantian sumber daya secara terus menerus. Suatu perusahaan yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya, tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

## **II.3 Kebijakan**

### **II.3.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai

repository.ub.ac.id

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
  - b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
  - c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
  - d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
  - e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar dan yang bersifat intra
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2010 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a*

*problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17)

juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### II.3.2 Urgensi Kebijakan

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai

sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

- a. Alasan Ilmiah Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*).

Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

- b. Alasan professional Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.
- c. Alasan Politik Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

### II.3.3 Siklus kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Siklus kebijakan publik menurut Ripley sebagaimana dikutip Taufiqurokhman (2014: 18-19) adalah sebagai berikut :

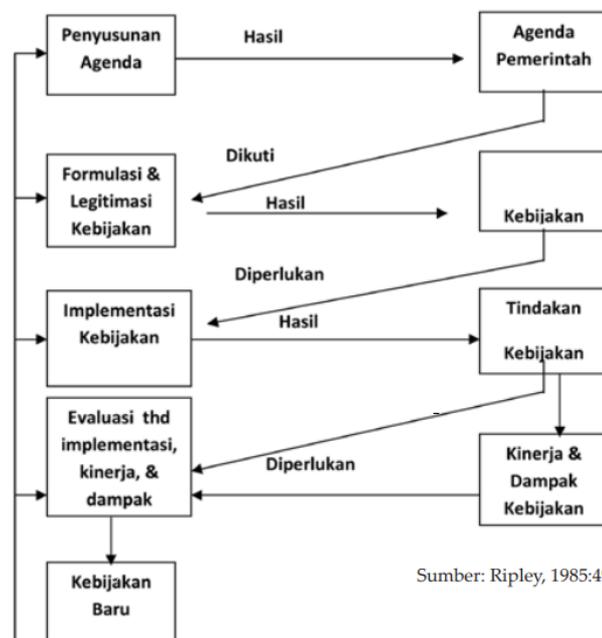
- a) Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

- (1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
- (2) Membuat batasan masalah;

(3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

- b) Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- c) Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.
- d) Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Secara singkat, Siklus kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Ripley, 1985:49.

Gambar 2.1 Siklus kebijakan

Sumber: Ripley dalam Taufiqurokhman (2014: 18-19)

### II.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan.

Walaupun demikian, para administrator sebuah institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan

kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

### II.3.5 Kerangka Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut di efektifasikan.

- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk meng efektifitaskan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

### II.3.6 Ciri-Ciri Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan efektivitas dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

### II.3.7 Jenis-jenis kebijakan

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25- 27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

- c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*) Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn (2000: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Masalah kebijakan (*policy public*) Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. *Alternative kebijakan (policy alternatives)* Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. *Tindakan kebijakan (policy actions)* Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. *Hasil kebijakan (policy outcomes)* Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. *Hasil guna kebijakan* Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberi sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi: 1)

kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri); 2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif,

kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); 3) kebijakan

menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

## **II.4 Efektivitas Kebijakan**

### **II.4.1 Definisi Efektivitas Kebijakan**

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.

Efektivitas menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Sedangkan R. Ferry Anggoro Suryokusumo (2008:14) menjelaskan efektivitas secara sederhana yaitu dapat diartikan "tepat sasaran", yang juga lebih diarahkan pada aspek kebijakan, artinya program-program pembangunan yang akan dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang benar-benar memang diperlukan untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan yang akan dicapai. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya efektivitas adalah suatu penyelesaian pekerjaan yang benar dan tepat waktu hingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Sabda Ali Mifka dan Makmur (2011:6), kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya efektivitas sebagai ketepatan harapan, efektivitas dan hasil yang dicapai. Sehingga kegiatan dikatakan tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, efektivitas dengan hasil yang dicapai. Menurut Nugroho (2008:646), efektivitas kebijakan berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh Ricahard Matland (1995) yang disebut dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yang merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan keefektifan suatu efektivitas kebijakan. efektivitas secara administratif adalah efektivitas yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. efektivitas secara politik adalah efektivitas yang perlu dilaksanakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan efektivitas secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi. Dari definisi-definisi efektivitas dan kebijakan di atas, dapat disimpulkan pengertian dari efektivitas kebijakan yaitu suatu konsep untuk mengukur tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

#### **II.4.2 Indikator Keberhasilan Efektivitas Kebijakan**

Pada efektivitas kebijakan, biasanya kebijakan diturunkan melalui program-program. Karena pada dasarnya program merupakan turunan dari suatu kebijakan.

Dalam Nugroho (2003:158) efektivitas kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung meng efektivitaskan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Menurut Matland (dalam Nugroho, 2008:650), berdasarkan teori implementasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan efektivitas kebijakan, yaitu :

a. Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellentis the policy*.

Sisi pertama kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama

antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau efektivitas kebijakan yang diwastakan (*privatization atau contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan 26 intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi efektivitas kebijakan bersifat baru atau memperbaiki efektivitas kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun

pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

d. Tepat Lingkungan

Menurut Nograho (2008:651), Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista dalam (nugroho 2011:651-652) menyebutnya sebagai lembaga endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan efektivitas kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista Variabel Eksogen, yang terdiri atas *public perception*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan efektivitas kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan efektivitas kebijakan dan individualis, yakni individu individu tertentu yang mampu memainkan

peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan efektivitas kebijakan.

e. Tepat Proses

Secara umum efektivitas kebijakan public terdiri atas tiga proses, yaitu:

1. *Policy acceptance.*

Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlakukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

2. *Policy adaption.*

Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

3. *Strategic readiness.*

Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Sedangkan menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53), menyebutkan bahwasanya terdapat 3 aspek dalam pengukuran efektivitas kebijakan yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan terakhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun

pentahapan dalam arti periododesasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu mengadakan sosialisasi pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam lainnya. Integrasi menyangkut proses

sosialisasi

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

Berbeda dengan Richard M. Steers (1985:206) juga mengungkapkan lima pengukuran efektivitas yaitu :

1. Kemampuan menyesuaikan diri-keluwesannya
2. Produktivitas
3. Kepuasan Kerja

Suatu program yang tidak mengarah pada kriteria-kriteria tersebut dipandang tidak efektif. Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.

Adapun menurut Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) kegiatan akan memenuhi keberhasilan bila memenuhi lima kriteria, yaitu:

- a) Pencapaian tujuan atau hasil Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah di efektifitaskan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. Hal ini karena pada prinsipnya suatu kebijakan atau suatu program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tanpa adanya hasil yang dapat diukur, dirasakan, maupun dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat, maka program tersebut tidak ada artinya.
- b) Efisiensi Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam efektivitas sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak program pemerintah secara faktual mampu ter efektifitaskan (ada hasil). Akan tetapi, dari segi waktu anggaran maupun kualitasnya jauh dari apa yang direncanakan. Dengan demikian, suatu program dapat dikatakan ter efektifitaskan dengan baik, apabila ada 13 perbandingan terbaik antara kualitas program dengan biaya, waktu dan tenaga yang ada.
- c) Kepuasan kelompok sasaran Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi

keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam meng efektivitaskan dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

- d) Daya tanggap client Dengan adanya daya tanggap yang positif dari masyarakat (dalam hal ini masyarakat atau kelompok sasaran) maka dapat dipastikan peran serta mereka pada kebijakan yang ada akan meningkat.

Mereka akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksanaan. Ini berarti kebijakan tersebut semakin mudah di efektivitaskan.

- e) Sistem pemeliharaan Dalam hal ini pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinue maka betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar.

Berdasarkan pengertian-pengertian dan penjelasan diatas, untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator dari pendapat Henry, Brian dan White (dalam Samodra W., 1994:65) yaitu :

#### 1. Tujuan Kebijakan

Kejelasan tujuan kebijakan sangat penting untuk diketahui. Karena hal itu berkaitan dengan strategi, target pencapaian tujuan kebijakan yang akan dibuat, beserta proses analisis dan perumusan kebijakannya. Perencanaan yang matang serta penyusunan program yang tepat akan menghasilkan tujuan kebijakan yang tepat pula. Hal itu akan sejalan dengan tersedianya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Pencapaian tujuan yang hendak

dicapai merupakan keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam konteks penelitian ini akan dilihat tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan akan disesuaikan dengan dengan kebijakan dari tingkat pusat, provinsi dan lembaga lainnya dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

## 2. Target Kebijakan

Target kebijakan harus disesuaikan dengan sebaik mungkin. Target kebijakan harus disesuaikan dengan ukura-ukuran yang jelas dalam setiap tahapannya.

Oleh sebab itu perlu ditetapkan sasaran-sasaran atau target yang ingin dicapai pada satu kurun waktu tertentu dengan takaran yang sesuai. Target kebijakan berkerenaan dengan dua hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, ataukah tidak.

Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau keselesarasan, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Dengan adanya kebijakan ini, target-target apakah sudah terselesaikan. Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana target kebijakan pemerintah dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

## 3. Perubahan Perilaku Masyarakat

Adanya perubahan perilaku masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya. Termasuk kebijakan yang dibuat oleh pembuat

kebijakan baik ditingkat nasional ataupun daerah. Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana perubahan perilaku pelaksanaan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

#### 4. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat adalah susunan yang berlapis-lapis mengenai kadar pengetahuan dan keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat secara individu atau kelompok yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Tingkat kesadaran masyarakat akan sejalan dengan efektivitas kebijakan yang ada. Karena kebijakan apapun yang dibuat adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berperilaku dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang baik pula. Dalam penelitian ini akan mengetahui tingkat kesabaran masyarakat dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

#### 5. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dampak kebijakan juga bisa berbentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Dampak kebijakan bisa meliputi berbagai bidang seperti sosia, budaya, kesehatan dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana dampak kebijakan terhadap upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa Pandemi COVID-19 di Kota Malang.

Penggunaan indikator-indikator tersebut didasarkan bahwa kelima indikator di atas merupakan pengukuran efektivitas kebijakan yang tepat jika dilihat dari pelaksanaan suatu program kebijakan. Karena indikator-indikator tersebut sesuai dengan tema penelitian ini yang ingin melihat efektivitas sebuah kebijakan.

Indikator tersebut menggambarkan kebijakan-kebijakan muali tujuan hingga dampak dari kebijakan tersebut dilaksanakan. Indikator tersebut juga sesuai dengan upaya-upaya dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat yang perlu memiliki tujuan yang pas dalam penerapannya hingga *output* atau dampak kebijakan pemulihan yang di lakukan. Dengan menggunakan indikator tersebut diharapkan dapat melihat tingkat efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.

#### II.4.3 Faktor Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut:

- b. Adanya tujuan yang jelas,
- c. Struktur
- d. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
- e. Adanya sistem nilai yang dianut.

akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan adalah memberikan pengarah dengan cara menggambarkan keadaan yang akan

datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers (1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu :

1. Karakteristik
2. Karakteristik Pekerja
3. Prestasi Kerja
4. Karakteristik Lingkungan
5. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kemudian, empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:8) peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Karakteristik adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam . Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah . Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas dan sangat berpengaruh terhadap, terutama dalam pembuatan keputusan dan

pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan.

3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan. Jadi apabila suatu menginginkan keberhasilan, tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan.

Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi. Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan;

2. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkungan;

3. Kelangsungan hidup membutuhkan pergantian sumber daya secara terus menerus. Suatu perusahaan yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya, tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

#### III.4.4 Pendekatan-pendekatan Dalam Menilai Keefektifitasan

Menurut Stephen P. Robbins (2001) dalam bukunya Teori Organisasi umumnya keefektifitasan organisasi dapat dilihat dari pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*), pendekatan sistem *system approach*, pendekatan konstituensi-strategis *strategic constituent approach* dan *BSC*. Jika telah terpenuhi setiap pendekatan tersebut berarti telah terjadi proses perubahan dan perubahan perilaku dan itu berarti pendekatan dan penataan organisasinya efektif. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

Efektivitas dalam organisasi merupakan konsep yang bersifat terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi di dalam suatu organisasi. Efektivitas menunjukkan banyaknya input atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan suatu satuan output, karenanya efektivitas dapat diukur sebagai rasio input terhadap output, (Lubis & Huseini, 1987).

Keefektifan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya (Robbins, 1994). Pada sebagian organisasi, efektivitas dan efisiensi bisa saja tidak berhubungan sama sekali. Sebuah organisasi

bisa sangat efisien tetapi tidak mampu mencapai tujuan ataupun sasaran yang dikehendakinya, misalnya karena organisasi itu memilih untuk membuat produk yang tidak laku dipasaran. Sebaliknya, suatu organisasi bisa mempunyai efektivitas yang tinggi, misalnya mampu mencapai sasarannya, tetapi tidak efisien. Karena organisasi melakukan banyak hal, maka keefektivasan dan keberhasilannya bergantung pada prestasi yang memuaskan di berbagai bidang sesuai kompleksnya.

### **1. Pendekatan pencapaian tujuan**

Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*) menyatakan bahwa keefektivasan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan ketimbang caranya (*means*) seperti memaksimalkan laba. Tercapainya tujuan yang ditetapkan, itu berarti telah terjadi proses perubahan dan perubahan perilaku. Lazimnya dimulai dengan mengidentifikasi sasaran/tujuan, dan mengukur atau menilai keberhasilan organisasi di dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran/tujuan yang digunakan adalah sasaran aktual.

### **2. Pendekatan sistem**

Organisasi memperoleh masukan (*input*), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (*output*). Pendekatan sumber yang berasal dari sisi input, proses internal yang berasal dari proses (transformasi proses), dan sasaran/tujuan yang berasal dari sisi *output* dapat digunakan untuk mengukur atau menilai efektivitas organisasi. Telah dijelaskan bahwa menetapkan ukuran keefektivasan organisasi hanya atas dasar pendekatan pencapaian tujuan, merupakan ukuran yang tidak sempurna.

Dengan hanya berbekal dari hasil pencapaian tujuan atau sasaran, berarti fokusnya hanya pada keluaran saja. Sebuah organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan (sumber daya), memproses masukan tersebut, menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan melalui pendekatan sistem. Dengan beroperasinya sistem, itu berarti telah terjadi proses perubahan dan perubahan perilaku.

Perubahan perilaku mencakup sebagai berikut :

- 1) Pendekatan pencapaian sasaran/tujuan
- 2) Pendekatan sumber
- 3) Secara sederhana, efektivitas organisasi dapat diukur dengan kuantitas sumber yang berhasil diperoleh dari lingkungannya.
- 4) Pendekatan proses internal

Pendekatan ini memandang efektivitas sebagai tingkat efisiensi dan kondisi (kesehatan) organisasi internal. Dengan demikian semakin lancar aliran proses internal organisasinya, berarti semakin efektif organisasinya.

### 3. Pendekatan konstituensi-strategis

Pendekatan konstituensi-strategis (*strategic-constituencis approach*), mengemukakan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari kontituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pandangan sistem tetapi penekanannya berbeda. Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konstituensi – strategis tidak memperhatikan semua lingkungan

organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan atas hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi. Dengan dipenuhinya tuntutan ini, itu berarti telah terjadi proses perubahan dan perubahan perilaku. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya kepada konstituen organisasi, yaitu berbagai kelompok di dalam maupun di luar organisasi, yang mempunyai kepentingan terhadap performansi organisasi. Dengan pendekatan ini, efektivitas organisasi diukur melalui tingkat kepuasan setiap elemen konstituen terhadap organisasi.

#### 4. Pendekatan *Balance Scorecard*

Tema utama yang mendasari pendekatan nilai-nilai bersaing (*competing-values approach*) adalah bahwa kriteria yang anda nilai dan gunakan dalam menilai keefektifan organisasi – laba atas investasi, pangsa pasar, pembaharuan produk, dan keamanan kerja, bergantung kepada siapa sebenarnya anda, dan siapa yang anda wakili. Tidak mengherankan bahwa, para pemegang saham, serikat buruh, pemasok, manajemen, atau spesialis intern dalam bidang pemasaran, personalia, produksi, atau akuntansi dapat melihat pada organisasi yang sama namun keefektifannya sangat berbeda.

Keseluruhan pendekatan keefektifan organisasi dapat dibandingkan dan dirangkum sebagaimana terlihat didalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pendekatan Keefektifan

PENDEKATAN	DEFENISI	BERGUNA PADA SAAT
------------	----------	-------------------

Pencapaian tujuan	Organisasi efektif sampai sejauh organisasi dapat mencapai yang telah ditetapkan	Pendekatan lebih disukai pada saat tujuan jelas, dibatasi waktu, dan dapat diukur.
Sistem	Organisasi memperoleh sumber yang dibutuhkan	Ada hubungan yang jelas antara masukan dan keluaran.
Konstituensi strategis	Semua konstituensi strategis, paling tidak dipenuhi.	Konstituensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap organisasi, dan organisasi harus menanggapi tuntutannya.
<i>Balance Scorecard</i>	Penekanan organisasi utama sesuai dengan preferensi dari konstituensi.	Organisasi sendiri tidak jelas mengenai apa yang menjadi penekanannya, atau mengenai minat dalam perubahan kriteria dalam jangka waktu tertentu.

Sumber: Stephen P. Robbins (1994)

## II.5 Manajemen Bencana

### II.5.1 Pengertian Manajemen Bencana

Istilah manajemen bencana didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Carter (2008: 19) menjelaskan bahwa manajemen bencana merupakan suatu ilmu terapan untuk mencari dengan observasi secara sistematis dan menganalisis bencana untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Selanjutnya, Niekerk (2011: 39) menyatakan bahwa secara nasional manajemen bencana mensyaratkan integrasi kegiatan sebelum dan sesudah bencana untuk melindungi nyawa dan harta benda

dari kemungkinan bencana. Berikutnya, menurut Lindsey (2011: 1) manajemen bencana dipahami sebagai proses yang sedang berlangsung, dimulai dari persiapan yang akan mengurangi risiko, merespons, mitigasi hingga pemulihan.

Secara sederhana, Modh (2015) menjelaskan bahwa manajemen bencana di tingkat individu dan organisasi dapat menangani masalah terkait dengan perencanaan, koordinasi, komunikasi serta penilaian risiko. Manesh (2015: 24) juga menjelaskan bahwa manajemen bencana dapat diartikan sebagai tindakan segera dan tepat untuk mengatasi bencana serta dampaknya karena bahaya yang besar, kurangnya sumber daya, informasi yang memadai serta akurat. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen bencana yang efektif dipengaruhi oleh kegiatan dari sejumlah organisasi independen di tingkat nasional dan internasional.

### II.5.2 Tujuan Manajemen Bencana

Secara umum tujuan manajemen bencana menurut Carter (2008: 32) adalah untuk membangun dan memelihara sistem secara optimal untuk menangani bencana yang dapat dicapai dengan sumber daya nasional. Pendapat tersebut diperkuat oleh Manesh (2015: 15) yang menyatakan bahwa tujuan manajemen bencana untuk meminimalkan konsekuensi dan tuntutan yang luas dari suatu bencana yang berkaitan dengan kesiapan organisasi, komunikasi, dan koordinasi di antara semua mitra, ketersediaan sumberdaya, dan keterlibatan *stakeholder* yang profesional.

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2015), terdapat beberapa tujuan manajemen bencana sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban, harta benda dan lingkungan

2. Menghilangkan penderitaan dan kesulitan hidup para korban
3. Memindahkan korban ke area baru yang layak huni dan aman
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi atau transportasi, air minum, listrik dan telepon, termasuk memulihkan kehidupan ekonomi dan sosial di daerah bencana
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut
6. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan.

### **II.5.3 Faktor-Faktor Manajemen Bencana**

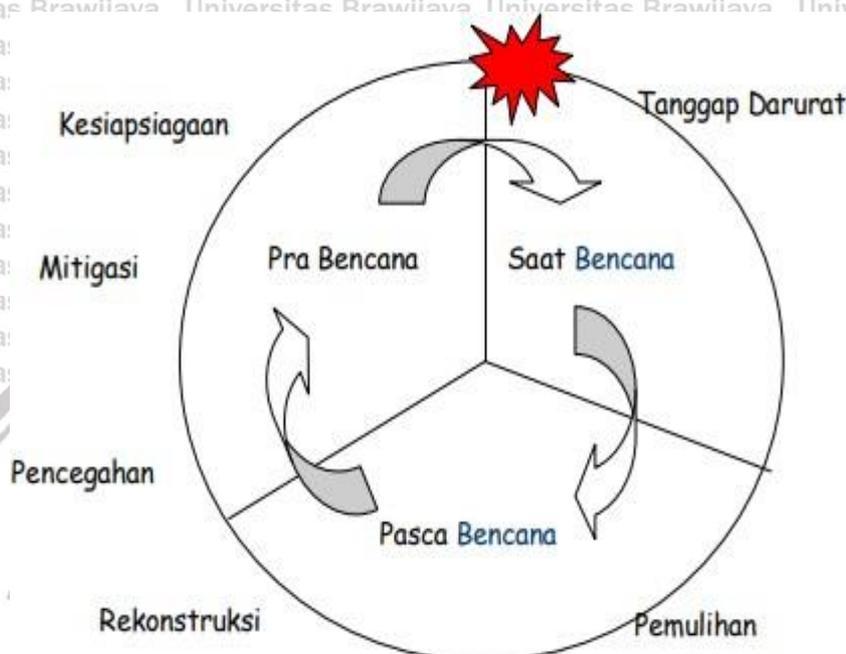
Faktor-faktor atau pilar yang perlu dilakukan dalam manajemen bencana menurut Carter (2008: 26) diantaranya sebagai berikut:

- 1 Mendefinisikan ancaman bencana secara akurat
- 2 Mengidentifikasi dampak bencana yang mungkin disebabkan oleh ancaman
- 3 Memberikan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi ancaman bencana
- 4 Pengaturan organisasi yang diperlukan untuk mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan dari peristiwa bencana
- 5 Mendefinisikan bagaimana kebijakan manajemen bencana nasional saling terkait dengan aspek lain seperti kebijakan nasional, terutama yang terkait pembangunan nasional dan perlindungan lingkungan
- 6 Faktor nasional lainnya yang mungkin berlaku.

### **II.5.4 Siklus Manajemen Bencana**

Siklus penanggulangan bencana menggambarkan proses perencanaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk

mengurangi dampak bencana, untuk segera merespons selama dan setelah bencana, dan mengambil tindakan untuk pemulihan setelah bencana. Setiap tahapan bencana tersebut dapat digambarkan dalam suatu siklus seperti berikut:



Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana

Sumber: Kementerian Kesehatan (2011)

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, siklus manajemen bencana dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

1. Pra bencana (sebelum bencana) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh potensi bahaya. Kegiatan pra bencana meliputi langkah-langkah seperti berikut:

- a. Pencegahan

Tindakan dalam segmen ini dirancang untuk menghambat terjadinya bencana dan atau mencegah kejadian tersebut yang memiliki efek

berbahaya pada masyarakat. Beberapa bentuk undang-undang juga dapat dianggap sebagai pencegahan seperti peraturan bahwa masyarakat tidak diizinkan untuk berkembang di lokasi yang rentan.

b. Mitigasi

Tindakan dalam siklus ini biasanya mengambil bentuk program tertentu yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana pada suatu bangsa atau komunitas. Terdapat dua macam bentuk mitigasi yakni mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural contohnya check dam, bendungan, dan rumah tahan gempa. Sedangkan mitigasi non struktural misalnya peraturan perundang-undangan, pelatihan dan lain-lain.

c. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan biasanya dianggap terdiri dari langkah-langkah yang memungkinkan pemerintah, organisasi, komunitas, dan individu untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap situasi bencana. Contoh langkah-langkah kesiapsiagaan yakni: a) merumuskan dan memelihara rencana penanganan yang valid dan diperbarui yang dapat diberlakukan bilamana diperlukan; b) ketentuan khusus untuk tindakan darurat sementara waktu ke tempat yang aman; c) menyediakan sistem peringatan; d) komunikasi darurat dan kesadaran publik; e) program penanggulangan termasuk tes. Salah satu aspek kesiapsiagaan yang tidak selalu diprioritaskan secara memadai adalah kesiapsiagaan individu dan atau keluarga. Dalam banyak keadaan di mana sumber daya pemerintah dan

layanan darurat terbatas, kesiapsiagaan individu dan keluarga penting untuk bertahan hidup. Beberapa siklus manajemen bencana dapat membagi segmen kesiapsiagaan menjadi beberapa sub divisi seperti peringatan dimana waktu atau periode ketika bahaya telah diidentifikasi tetapi belum mengancam area tertentu, ancaman yakni waktu atau periode ketika bahaya telah diidentifikasi dan dinilai mengancam wilayah tertentu dan pencegahan merupakan tindakan yang diambil setelah menerima peringatan untuk mengimbangi efek dari dampak bencana.

2. Saat bencana merupakan upaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan korban, serta meminimalisir dampak penderitaan. Saat bencana terjadi meliputi langkah seperti berikut:

a. Tanggap darurat

Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera pada saat terjadi bencana, tujuannya untuk mengatasi dampak, terutama untuk melakukan tindakan penyelamatan korban dan harta benda, serta evakuasi.

3. Pasca bencana (setelah bencana) merupakan upaya yang dilakukan dalam menanggapi bencana bertujuan untuk memulihkan pemulihan masyarakat yang terkena dampak segera setelah bencana. Pasca bencana meliputi meliputi langkah-langkah seperti berikut:

a. Pemulihan

Pemulihan adalah proses di mana masyarakat dan negara dibantu untuk kembali ke tingkat fungsi yang tepat setelah bencana. Proses pemulihan bisa sangat berlarut-larut, memakan waktu 5-10 tahun atau bahkan lebih.

Tinjauan pasca bencana juga harus dimasukkan sebagai bagian dari proses pemulihan. Hal ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah bencana.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah rencana jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial dan ekonomi serta memulihkan kehidupan masyarakat ke tingkat sebelumnya atau bahkan lebih tinggi, yaitu rencana jangka menengah dan jangka panjang.

## II.6 Pemulihan (*Recovery*)

### II.6.1 Definisi Pemulihan (*Recovery*)

Haas, Kates dan Bowden (1977) dalam *Handbook Of Disaster Research* mendeskripsikan upaya pemulihan sebagai :

*“Early definitions of recovery emphasized that recovery was predictable, made up of identifiable parts occurring in a sequential manner; choices and decisions were value driven; and outcomes (i.e., paths to recovery) emphasized a return to normalcy or the incorporation of those actions that have become more recently associated with sustainability—a reduction of future vulnerability (post-disaster mitigation), equity, and amenity.”*

“Definisi awal pemulihan menekankan bahwa pemulihan yang dapat diprediksi terdiri dari bagian yang dapat diidentifikasi terjadi secara berurutan, pilihan dan keputusan ditentukan oleh nilai dan hasil (misalnya, jalur untuk pemulihan) yang ditekan kembali ke kondisi normal atau penggabungan tindakan yang telah menjadi lebih baru yang terkait dengan reduksi keberlanjutan kerentanan di masa depan (pasca-bencana mitigasi),

ekuitas, dan kemudahan.” (Haas, Kates, dan Bowden, 1977, p. xxvi)

Sementara itu Damon P. Coppola (2007: 299) dalam bukunya mendefinisikan upaya pemulihan sebagai : *“Disaster recovery is the emergency management function by which country, communities, families, and individual repairs, reconstruct, or regain what has lost as a result of disaster. Ideally reduce the risk of catastrophe in the future.”* (Pemulihan bencana merupakan fungsi dari manajemen bahaya yang dilakukan oleh negara, dimana setiap komunitas, keluarga dan memperbaiki individu, merekonstruksi atau mendapatkan kembali apa yang hilang ketika bencana terjadi. Idealnya, mengurangi resiko dari kejadian yang sama ketika bencana tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang.)

Dalam sistem manajemen darurat yang komprehensif, yang meliputi perencanaan pra bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan tindakan pemulihan dapat dimulai sedini selama kegiatan perencanaan, jauh sebelum bencana terjadi. Setelah terjadi bencana, tindakan pemulihan terencana dan tidak terencana harus dilaksanakan dan mungkin diperpanjang selama berminggu-minggu, bulan dan bahkan bertahun-tahun (Gustin, 2005: 18). Pada kenyataannya, upaya pemulihan merupakan langkah yang sulit dan tidak tentu, termasuk informasi, semuanya memiliki peran dalam upaya pemulihan di masyarakat. Tindakan yang terkait dengan pemulihan bencana merupakan yang paling beragam dari semua fungsi manajemen bencana. Cakupan individu, organisasi dan kelompok yang terlibat juga lebih besar daripada di fungsi lain. Akibat dari sifat luar biasa sebuah bencana dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang, uapaya pemulihan dapat menarik perhatian masyarakat dunia secara keseluruhan. Sehubungan dengan fungsi-fungsi

manajemen bencana lain, fungsi pemulihan adalah yang paling memakan biaya.

Pemulihan bencana juga setidaknya dipelajari dan paling terorganisir dari semua fungsi manajemen bencana, dan karena itu yang paling penting untuk dilakukan.

Pemulihan melibatkan lebih dari sekedar mengganti apa yang ada. Ini adalah proses yang kompleks, terkait erat dengan tiga fase lain dari manajemen bencana dan membutuhkan jumlah besar perencanaan, koordinasi dan pendanaan. (Barry, 1997)

Bagian yang paling penting dalam upaya pemulihan adalah termasuk rekonstruksi fisik dalam sebuah pembangunan lingkungan. Contoh spesifiknya meliputi membangun dan memperbaiki bangunan yang rusak, rumah, kawasan perniagaan, sarana publik, seperti taman, gedung umum, dll. Dalam masa pemulihan, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat vital dalam menentukan seberapa cepat daerah tersebut bisa pulih. (Gregory, 2000: 151-160)

Adapun Aksi dan kegiatan umum dilakukan pada periode pemulihan bencana menurut Coppola (2007: 299) meliputi:

1. Komunikasi dengan masyarakat
2. Penyediaan perumahan sementara atau tempat berteduh jangka panjang
3. Pengkajian kerusakan dan kebutuhan
4. Pembongkaran struktur kerusakan
5. Pembersihan, penghapusan, dan pembuangan puing
6. Rehabilitasi infrastruktur
7. Pemeriksaan kerusakan struktur
8. Perbaikan kerusakan struktur
9. Konstruksi baru

10. Program rehabilitasi Sosial
11. Penciptaan kesempatan kerja
12. Penggantian kerugian properti
13. Rehabilitasi terluka
14. Pengkajian kembali manajemen risiko

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aspek penting dalam setiap upaya pemulihan, niscata setiap kegiatan tersebut mempunyai peranan yang sangat berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat pasca bencana. Pada kenyataannya, upaya pemulihan bencana merupakan aspek paling sedikit dipahami manajemen darurat, dari sudut pandang komunitas peneliti dan praktisi. Bila dibandingkan dengan fase lain yang diakui secara luas oleh manajemen darurat, yaitu kesiapsiagaan, respon dan mitigasi, para ahli belum menjawab pertanyaan mendasar, sementara praktisi telah gagal membangun suatu kerangka kebijakan terpadu atau memanfaatkan alat tersedia untuk meningkatkan hasil pemulihan bencana (Berke, Kartez, dan Wenger, 1993).

Beberapa definisi pemulihan telah difokuskan pada perbaikan dan pemulihan pembangunan lingkungan serta diferensiasi temporal antara pemulihan jangka pendek dan jangka panjang atau rekonstruksi, termasuk penghargaan tindakan pra-bencana seperti penggunaan lahan dan perencanaan pemulihan. Pemulihan melibatkan lebih dari rekonstruksi lingkungan binaan. Dengan demikian, definisi alternatif pemulihan bencana adalah salah satu yang menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dan dampak bencana pada konstruksi yang dibuat oleh manusia serta keterangan tentang bagaimana sistem alam yang

terkena dampak dan "pulih" dari bencana. Oleh karena itu disarankan bahwa pemulihan bencana dapat didefinisikan sebagai proses diferensial untuk memulihkan, membangun kembali, dan membentuk kembali lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan alam melalui perencanaan. (Rubeen dan Barbee, 2005; Schwab, 2008). Akibatnya, orang-orang, kelompok, organisasi, masyarakat, pemerintah, ekonomi, dan lingkungan sering pulih pada tingkat yang berbeda, dan dalam beberapa kasus gagal mencapai kondisi pra-bencana mereka. Sebaliknya, ada peluang untuk pulih dengan cara perbaikan atas kondisi-kondisi yang lazim (sosial, ekonomi, dan lingkungan) sebelum terjadinya bencana.

## II.6.2 Tipe-Tipe Pemulihan (*Discovery*)

Adapun tipe-tipe *recovery* (pemulihan) dapat dibedakan menjadi *Public Assistance, Housing Sector, Economic Recovery* dan *Individual, Family and Social Recovery* (Coppola, 2007: 315):

### 1. *Public Assistance*

Bantuan publik merupakan salah satu tipe dari upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemulihan ini meliputi semua aspek yang hancur dari ranah publik atau sarana umum. Secara umum, tipe ini mencakup seperti struktur, sistem dan pelayanan yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memproteksi ketiga hal tersebut, disamping itu faktor lingkungan juga termasuk kedalam kategori ini. Di negara lain pada umumnya, sarana umum biasanya dikelola dan dipelihara dengan baik. Hal itu merupakan tanggung

jawab pemerintah untuk membiayai perbaikan dan perawatan sarana tersebut.

Kebanyakan dari bencana menghasilkan puing dalam jumlah yang banyak seperti pohon tumbang, lumpur, reruntuhan batu-batu, puing-puing bangunan, properti yang berbahaya dari sisa-sisa kendaraan bermotor serta material lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk membereskan dan memindahkan seluruh puing-puing yang dihasilkan oleh bencana tersebut.

Yang selanjutnya mereka harus mampu membersihkan wilayah yang dilanda bencana dari segala macam material puing sisa bencana yang biasanya melibatkan pihak swasta, karena biasanya pemerintah sering kewalahan dalam menghadapi itu semua. Pada akhirnya adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi bencana yang berkaitan dengan lingkungan yang cenderung dapat menimbulkan penderitaan ada masyarakat. Apabila pemerintah gagal, hal itu dapat mengakibatkan bertambahnya resiko bencana di masa depan.

## 2. *The Housing Sector*

Perumahan di seluruh daerah yang terkena dampak akan menunjukkan perbedaan tingkat kerusakan dan kehancuran karena komposisi, lokasi, elevasi, dan kedekatan dengan bahaya, serta beberapa faktor lainnya. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mensuplai inspektur perumahan yang mampu mendeterminasi struktur mana yang harus diperbaiki atau struktur mana yang harus dihancurkan dan yang mana yang tidak perlu dikerjakan sama sekali. Apabila pembangunan sektor perumahan dalam rangka upaya pemulihan bencana ditunda, niscaya hal tersebut akan menyebabkan

tertundanya seluruh dimensi pemulihan (Bolin, 2010). Pada umumnya tidak akan ada jumlah inspektor perumahan yang mencukupi untuk mengemban tugas ini, maka dari itu asiten dari luar dibutuhkan jika memungkinkan.

Biaya aktual dari perbaikan kontruksi rumah tersebut tergantung dari pemilik rumah tersebut. Biasanya, korban yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah tidak mampu membiayai perbaikan rumahnya. Maka dari itu mereka beralih untuk mencari bantuan dari luar. Sayangnya, bantuan tersebut tidak selalu tersedia seperti yang terjadi di Mexico City pasca gempa tahun 1985, dimana para korban gempa tidak memiliki rumah secara permanen selama 15 tahun setelah gempa tersebut terjadi. Rekonstruksi perumahan yang paling sukses terjadi ketika hal itu dilaksanakan dengan masukan dari populasi resipien (Vale dan Campanella, 2005: 255). Perbaikan sektor perumahan, tergantung dari sumber keuangan untuk membangun kembali perumahan tersebut. Perumahan dibangun oleh sumber daya dari dalam masyarakat, yang bertentangan dengan kontraktor eksternal, cenderung mengurangi biaya dan lebih diterima oleh penerima. Hal itu juga menjamin bahwa bantuan dana tetap dalam ekonomi lokal. (Bolin dan Stanford, 1991)

Korban yang mampu memperbaiki kondisi rumahnya dengan sesegera mungkin akan melakukannya secepat yang ia bisa. Untuk membuat rumah baru atau memperbaiki rumah yang rusak dengan cepet, tentu saja dibutuhkan semangat, selain itu mereka juga harus yakin bahwa rumah yang akan dibangun atau diperbaiki harus mempunyai struktur yang lebih baik atau setidaknya apabila kejadian serupa terulang rumah tersebut mampu bertahan

(Pettersson, 2009). Untuk mengatasi masalah ini, seorang perencana harus mengidentifikasi dengan cepat area mana yang bisa untuk direkonstruksikan, mana yang membutuhkan rekayasa ulang dan mana yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk daerah yang berisiko tinggi terhadap pembangunan kawasan perumahan setelah bencana sebaiknya meninggalkan rencana tersebut dan mencari daerah alternative yang lebih aman untuk membangun rumah mereka kembali.

### 3. *Economic Recovery*

Bencana memberikan tekanan yang hebat kepada ekonomi lokal dan nasional.

Bahkan pada bencana yang sangat hebat, tidak jarang menimbulkan gejolak pada perekonomian dunia. Kehilangan pekerjaan, kehilangan faktor produksi, kehilangan kesempatan bisnis serta pengeluaran pemerintah yang sangat besar merupakan beberapa dampak bencana terhadap kejatuhan kondisi ekonomi yang harus dikembalikan sesegera mungkin agar kembali stabil.

Ekonomi lokal individu ditopang oleh faktor dimana termasuk didalamnya adalah pariwisata, pertambangan, pabrik produksi, pertanian, kerajinan tangan serta pendidikan. Masyarakat tumbuh dan berkembang serta menjadi mandiri tergantung kepada industry yang disebutkan tadi, dan penduduk kota membutuhkan skill untuk menjalankan industri tersebut. Industri pendukung dan pelayanan seperti transportasi, komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan akan ikut berkembang seiring dengan industri pokok tersebut. Pada dasarnya, upaya pemulihan di bidang ekonomi harus diawali dengan pembangunan kegiatan industri tersebut.

Mengembalikan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama dalam pemuliharaan ekonomi bagi para perencana. Hal itu sangat vital karena bisnis lokal kembali ke dalam kapasitas penuh khususnya dalam periode awal upaya pemulihan (Rittinghouse dan Ransome, 2005: 171). Apabila bisnis lokal tidak mampu untuk memanfaatkan keuangan dari hal tersebut maka penanaman modal asing yang akan meraih keuntungan dari kondisi tersebut. Apabila pendanaan dan investasi dalam jumlah besar mampu dikumpulkan di periode awal dalam upaya pemulihan, maka hal itu akan memungkinkan untuk mengembalikan kondisi ekonomi dengan cara memperbaiki kondisi infrastruktur yang sudah ada sebelumnya. Semua kerusakan yang menimpa seperti sarana komunikasi, akses internet dan peralatan-peralatan lainnya harus dapat diperbaiki dan mengacu kepada standart yang modern, oleh karena itu secara keseluruhan potensi ekonomi lebih besar daripada kondisi sebelum bencana.

Sebagus apa sebuah masyarakat melakukan upaya pemulihan cenderung untuk mengikuti secara langsung sebaik apa masyarakat tersebut melakukan kegiatan ekonomi sebelum bencana terjadi. Kegiatan ekonomi yang berlangsung dengan sukses sebelum bencana terjadi, jauh lebih mungkin untuk memiliki cadangan untuk membawa mereka untuk melalui kondisi upaya pemulihan terburuk yang dioperasikan dalam tepi jurang kebangkrutan meskipun itu terjadi sebelum adanya bencana. Masyarakat yang sukses lebih mungkin untuk memiliki kebanggaan sipil dan kekompakkan untuk secara bersama-sama bergerak maju dan bahkan melebihi tingkat kesejahteraan pada

saat sebelum bencana terjadi sementara masyarakat yang gagal tentu saja akan membuat tingkat kesejahteraan setelah bencana akan menjadi lebih buruk.

Pengangguran adalah salah satu konsekuensi umum akibat dari sebuah bencana. Kehilangan pekerjaan datang sebagai pukulan ganda kepada korban yang tidak hanya harus berenang ke dalam tabungan mereka dan mungkin harus mendukung keluarga mereka dalam jangka pendek tetapi juga berusaha untuk menutup kerusakan rumah dan property mereka. Korban yang tidak bekerja lebih mungkin untuk bertahan dengan tangan kosong dari pada membeli barang-barang di pasar lokal yang mungkin akan membuat lemah ekonomi lokal.

Kualitas dari rencana dan koordinasi upaya pemulihan akan mempengaruhi pekerja dalam beberapa cara. Pertama, hanya ketentuan yang efisien dari pelayanan upaya pemulihan termasuk distribusi bantuan akan memperbolehkan waktu penduduk untuk mendedikasikan pekerjaan.

Distribusi bantuan yang buruk akan menyebabkan korban menunggu atau barbaris dalam antrian selama berjam-jam dan menghambat mereka untuk mencari pekerjaan. Kedua, korban harus disediakan sarana untuk menerima pekerjaan yang akan buat seperti pelatihan, transportasi atau bantuan aplikasi.

Para pekerja harus mempertimbangkan komitmen ekstra yang mana mungkin dimiliki oleh korban diluar pekerjaan seperti membangun kembali rumah mereka, meyakinkan bahwa anak mereka pergi ke sekolah atau memiliki hari-hari yang memadai dan mungkin menghadiri pertemuan medis.

Banyak bisnis yang berimbas kepada bencana secara umum akan menemukan kegagalan sebagai hasil dari kerugian jangka panjang. Hal ini khususnya terjadi pada bisnis yang kecil. Statistik di Amerika menunjukkan bahwa 25% bisnis kecil terpaksa gulung tikar akibat dari kerugian yang disebabkan oleh bencana dan tidak pernah membuka usahanya kembali dan 40-60% bisnis kecil lainnya tutup secara permanen setelah bertahan selama dua tahun setelah bencana. Pemulihan pendanaan dapat mengatasi masalah ini dan menahan pekerjaan yang mungkin saja bisa hilang.

#### 4. *Individual, Family and Social Recovery*

Pemulihan pada masyarakat berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental dalam diri individu, keluarga dan grup sosial (Marsella, Johnson, Watson dan Gryczynski, 2008: 47). Meskipun gedung-gedung, rumah dan komponen infrastruktur lainnya sudah diperbaiki, masyarakat akan tetap menderita sampai kebutuhan sosial mereka terpenuhi. Ketika kebutuhan ini ada dalam setiap bencana, tingkat kebutuhan akan meningkat secara bertahap seiring dengan jumlah korban cedera dan meninggal. Upaya pemulihan dari kondisi darurat sosial kemanusiaan yang kompleks, di mana gangguan keamanan penuh juga cenderung terjadi, seringkali membutuhkan perhatian yang cukup. Tanpa memperhatikan tingkat kehilangan ataupun cedera, seluruh masyarakat di dalam wilayah yang terkena bencana akan menghadapi stress emosional dan kegelisahan dalam tingkat yang tinggi. Bencana merupakan hal yang dapat membuat manusia menjadi stress dan membuat masalah karena hal itu memaksa manusia untuk melawan bahaya dan mungkin

membuat masyarakat berasumsi bahwa bencana itu menghancurkan. Mereka yang cedera, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal menjadikan ini sebagai pengalaman untuk tingkat yang lebih tinggi. Kehidupan mereka menjadi terganggu dan menjadi dislokasi dan mungkin saja masa depan mereka menjadi hancur. Penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang tertimpa bencana sangat rentan terhadap emosional stress. Cacat fisik merupakan masalah lain yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Pertama, Bencana yang mengabaikan orang cedera dapat menyebabkan bertambahnya kebutuhan mengenai rehabilitasi fisik melebihi dampak yang ditangani oleh masyarakat. Kedua, mereka yang sebelumnya sudah mengalami cacat fisik sebelumnya akan merasakan kerugian yang sangat besar ketika panti sosial dimana mereka bernaung sebelumnya menjadi hancur atau rusak akibat bencana. Berikut merupakan hasil yang diakibatkan oleh bencana yang berimbas kepada cacat fisik dan disabilitas (WHO, 2020):

1. Untuk korban yang sudah mengalami disabilitas sebelum terjadi bencana
  - a. Dibandingkan dengan mereka yang tidak cacat, orang yang mengalami cacat fisik lebih beresiko ketika menghadapi bencana.
  - b. Banyak orang cacat yang kehilangan alat bantu seperti alat bantu jalan (tongkat), kruk, alat bantu dengar dan kacamata
  - c. Orang cacat dapat memperoleh kesulitan yang besar dalam mengakses kebutuhan seperti air, makanan, pelayanan kesehatan, perumahan dan MCK
  - d. Rehabilitasi infrastruktur dapat mengalami kerusakan atau gangguan

dan rehabilitasi personil termasuk pengasuh utama, mungkin saja terbunuh cedera atau dialihkan kepada tugas yang lain.

2. Untuk korban yang mengalami disabilitas akibat bencana

a. Tidak memadainya pengobatan pada korban bencana yang mengalami patah tulang dan luka infeksi dapat mengakibatkan kecacatan dalam jangka waktu tertentu atau bahkan pemanen.

b. Rujukan kepada korban untuk memperoleh fasilitas pelayanan pengobatan menjadi sulit atau bahkan menjadi mustahil.

c. Dapat terjadinya kelangkaan personil pelayanan kesehatan dan rehabilitasi lokal untuk menangani orang-orang yang baru saja mengalami cacat fisik akibat gempa.

d. Mereka yang terluka, akan mengalami kerugian yang berbeda-beda dalam menerima dan bantuan pemulihan apabila dibandingkan dengan mereka yang tidak terluka, dan mungkin akan memperoleh resiko yang lebih besar dalam mengembangkan kesehatan mental.

5. *Cultural Recovery*

Setelah bencana, masyarakat seringkali menemukan warisan mereka hancur.

Bangunan bersejarah dan stuktur lainnya, seni, pakaian dan tradisi hilang.

Kehilangan dari komponen budaya seperti ini dapat menyebabkan hilangnya

identitas masyarakat yang sekarang menjadi tinggal dan menggunakan dalam

bangunan yang tidak menunjukkan kebutuhan budaya mereka. Mereka

mungkin saja menggunakan pakaian yang di donasikan oleh donator yang

tidak formal untuk mereka dan makan makanan yang tidak biasanya mereka

makan. Sangat penting untuk memahami nilai-nilai budaya untuk menentukan langkah pemulihan seperti apa yang tepat untuk diterapkan di wilayah tersebut (Marsella, Johnson, Watson dan Gryczynski, 2008: 48)

### II.6.3 Komponen Pemulihan (*Discovery*)

Periode yang paling lama dalam upaya pemulihan dari bencana yang dahsyat membutuhkan beberapa pasokan kebutuhan. Setiap kategori kebutuhan bergantung satu sama lain dan apabila ada kebutuhan yang terputus, maka hal itu akan berdampak kepada kebutuhan lainnya. Adapun komponen dari upaya pemulihan ini adalah (Coppola, 2007: 302):

1. Perencanaan

Perencanaan setelah bencana terjadi adalah suatu tindakan yang sangat jauh berbeda yang berdampak kepada lingkungan dengan perencanaan sebelum terjadinya bencana. Langkah penting yang dapat dilakukan dalam perencanaan ialah mengkonduksikan survey dasar dengan analisa bahaya sehingga dapat menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Hal penting lainnya dalam perencanaan untuk upaya pemulihan adalah adanya upaya perbaikan konstruksi atau aksi-aksi lainnya yang dapat bertahan lama yang dapat menopang kehidupan masyarakat (Gustin, 2005: 147). Salah satu opsi yang dapat membantu manajer bencana seperti memberlakukan penagguhan pada kontstruksi baru. Dalam memulai sebuah perencanaan, diharuskan mengembangkan sebuah peta kerusakan atas dampak bencana tersebut. Biasanya dimulai dari dua atau tiga hal yang paling mendesak untuk dilakukan (Gregory, 2000: 13).

William Spangle (1991) menjabarkan dua langkah yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh perencana untuk melakukan proses perencanaan:

- a. Perencanaan dan pembangunan kembali dapat terjadi secara serentak, beberapa pembangunan kembali dapat dilaksanakan sebelum rencana utama dapat diselesaikan. Meskipun penundaan pembangunan kembali dirasa tepat setelah bencana, mempersingkat prosedur pengambilan keputusan harus diselesaikan dengan baik. Secepatnya, pekerja lokal perlu untuk menentukan area mana saja yang dapat di bangun kembali dengan rencana dan regulasi yang telah disusun.
- b. Setelah bencana, perencana biasanya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk perluasan tata kota dengan menghindari lahan yang tidak aman. Apabila daerah tersebut dapat ditemukan dengan cepat, perencana dapat mempercepat upaya relokasi korban bencana dan perdagangan dari kerusakan parah.

Meskipun beberapa manajer bencana menghadapi upaya pemulihan pasca bencana tanpa rencana, mereka tidak perlu takut. Rencana dan regulasi yang sudah ada dapat diterima di beberapa bagian kota, khususnya dimana banyak bangunan hancur karena mereka tidak di disain secara modern. Sebagai tambahan, meskipun usaha terbaik sudah dilakukan oleh manajer untuk melakukan apa yang sudah direncanakan secepat yang dia bisa, ada beberapa konstruksi yang tidak bisa dikerjakan secara cepat. Bangunan yang sudah ada sebelumnya dan pengembangan rencana, peraturan penetapan wilayah, peraturan untuk memilih tempat tinggal dapat membantu

kelompok yang terpisah dari beberapa komponen yang terlibat. (Clarke, 2019)

## 2. Koordinasi

Haas dan Drabek (1973) dalam *Handbook of Disaster Research* mendefinisikan koordinasi sebagai: “*Those sets whose behaviors through which the complex network of interrelated events are maintained.*” (Suatu ketetapan dimana perilaku melalui hubungan yang kompleks saling berkaitan satu sama lain yang terjaga dengan baik).

Koordinasi ketika melakukan proses upaya pemulihan merupakan hal yang sulit untuk dicapai, tetapi hal tersebut sangat vital untuk mensukseskan tujuan dari upaya pemulihan disamping mengurangi resiko yang ada. Kesuksesan dari koordinasi upaya pemulihan pasca-bencana tergantung kepada kemampuan perencana untuk mencapai gambaran secara luas dalam struktur koordinasi (Schneid dan Collins, 2000: 39). Dalam melakukan koordinasi, dibutuhkan komunikasi dua arah yang baik antara pihak penerima dan pengirim. Tanpa kedua hal tersebut, koordinasi yang baik tidak akan tercapai. Komunikasi yang baik membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemulihan berlangsung aman (Gustin, 2005: 46).

Rencana pemulihan yang digunakan untuk mengatasi demografi masyarakat dan kebutuhan kultur sosial, semua golongan masyarakat harus dilibatkan, termasuk pemuka agama, organisasi sipil, pihak swasta, pemerintah, dan media. Hal itu memungkinkan adanya interaksi antara pihak lokal dan regional atau mungkin internasional melalui proses pemulihan, sehingga penyertaan dari pihak-pihak tersebut menjadi sangat vital.

Menurut Petterson (2009), dengan melibatkan pihak-pihak yang sudah disebutkan diatas, upaya pemulihan yang terorganisir dengan baik dapat memungkinkan terjaminnya banyak hal yang dipelajari, pelatihan terbaik dan efisensi buruh dapat berjalan secara maksimal. Dengan ketiadaannya koordinasi dan komunikasi yang baik, upaya pemulihan menjadi tidak mungkin untuk menjangkau kebutuhan di tingkat lokal.

Apabila struktur yang terbentuk sudah benar, hasil dari mekanisme koordinasi akan menjadi tempat penyimpanan informasi dan bantuan untuk semua kelompok ataupun individu yang terlibat. Struktur tersebut dapat dibentuk dari masyarakat sekitar atau pemerintah yang terlibat atau dari komite perwakilan. Adapun petugas yang terlibat dalam struktur koordinasi pemuliharaan adalah (Coppola, 2007: 304):

1. Petugas lingkungan
2. Manager banjir
3. Petugas bangunan
4. Petugas pengembangan ekonomi
5. Petugas keuangan
6. Petugas transportasi
7. Petugas perumahan
8. Organisasi lingkungan
9. Organisasi perencanaan regional
10. Organisasi lokal darurat
11. Direktur taman rekreasi

12. Perwakilan publik
13. Palang merah
14. Konstruksi dan Pengembangan
15. Asosiasi rumah tangga
16. Organisasi keagamaan
17. Agensi pelayanan sosial

Otoritas hukum harus diberikan kepada kelompok tersebut untuk menjamin bahwa mereka memiliki kekuatan yang memadai untuk melakukan aksi dan rekomendasi mereka. Adapun fungsi dari struktur tersebut (Coppola, 2007: 304) :

1. Mengkaji dan menyusun daftar kebutuhan
2. Menjaga dan memfasilitasi proses rencana upaya pemulihan
3. Membuat tujuan upaya pengurangan resiko
4. Memusatkan informasi bantuan dan sumber daya upaya pemulihan
5. Meminimalisir hal-hal yang tidak efisien dalam pelayanan
6. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pada korban

Dibeberapa negara berkembang, dimana pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibutuhkan untuk menjalankan rencana pemuliharaan, kadangkala tidak ada disetiap tingkat pemerintahan, koordinasi eksternal bisa menjadi alternatif. Secara umum, organisasi seperti PBB yang mempunyai hubungan dengan hampir seluruh pemerintahan negara di dunia akan beramsumsi seperti sebuah peran. Terputusnya hubungan yang sering terjadi dalam perencanaan dan koordinasi upaya pemulihan seringkali berasal dari

pemahaman yang tidak akurat mengenai apa yang terbaik bagi masyarakat.

Maka dari itu dibutuhkan pembagian tugas dalam mengerjakan upaya pemulihan (Gregory, 2000: 227). Petugas negara, perwakilan organisasi multilateral, dan organisasi non profit baik lokal maupun asing, semua mungkin bekerja dibawah asumsi bahwa walaupun mereka berpendidikan dan mempunyai informasi yang luas belum tentu tepat untuk untuk melakukan proses pemulihan dalam menentukan kondisi sosial dan budaya yang spesifik di lapangan.

### 3. Pengkajian Kerusakan

Sebelum rencana upaya pemulihan yang efektif memungkinkan untuk dilakukan, manager bencana harus memiliki akses untuk mengakurasi mengenai informasi kerusakan yang terjadi. Hal ini akan membantu mengidentifikasi strategi yang paling baik untuk mempekerjakan sumberdaya yang memungkinkan dan prioritas aksi yang harus dilaksanakan. Pengkajian kerusakan dapat membantu perencanaan untuk mengidentifikasi jumlah dan tipe bangunan yang hancur ataupun rusak (Gustin, 2005: 11). Selama proses perencanaan upaya pemulihan, pengkajian ini akan bertindak sebagai panduan utama untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian dan dalam prioritas yang seperti apa serta bagaimana mendistribusikan sumberdaya yang ada secara efektif. Hal ini diperlukan untuk mendukung proses pemulihan sebagai sebuah sistem.

Sistem ini lah yang nantinya akan menentukan seberapa cepat proses pemulihan itu berlangsung. (Gregory, 2000:90) Sayangnya, pengkajian

yang dihasilkan pada fase respon tidak akan mengandung semua unsur informasi yang dibutuhkan oleh perencana, khususnya ketika mereka bermaksud untuk mengurangi resiko pada bencana yang akan datang.

Pengkajian selanjutnya akan memungkinkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan pengkajian tersebut perlu untuk dilakukan oleh berbagai bidang ahli untuk menentukan kebutuhan pemulihan yang aktual.

Sebagai contoh, dibeberapa kasus inspeksi teknis dari kerusakan bangunan perlu untuk dilakukan dalam rangka menentukan apakah perlu untuk dihancurkan, diperbaiki dan mana yang perlu dikerjakan sesegera mungkin.

Perencana upaya pemulihan, akan membutuhkan peninjauan ulang secara berkala area yang terkena bencana untuk menentukan jangka waktu yang dibutuhkan dalam memulihkan daerah tersebut. Dalam upaya pengkajian ini, segala jenis sumberdaya perlu dialokasikan kembali dan dicari masalah-masalah yang ada sebelum terlambat untuk memperbaikinya. Dengan mekanisme koordinasi yang baik dan memaksimalkan jumlah organisasi yang bertaspasi, upaya pengkajian akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

#### 4. Uang dan Perlengkapan

Tanpa dana yang mencukupi, akan sulit untuk memulihkan suatu wilayah yang terkena bencana meskipun banyak relawan lokal dan internasional memberikan bantuan peralatan serta perlengkapan. Investasi keuangan dalam rekonstruksi suatu komunitas sangat dibutuhkan untuk memenuhi target upaya pemulihan seperti memperbaiki dan membangun kembali

bangunan yang hancur, memulai kembaliperekonomian ataupun kegiatan lainnya. Tanggung jawab mengenai dana rekonstruksi ditentukan oleh berbagai macam sektor dalam komunitas (Rittinghouse dan Ransome, 2005: 13).

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab secara umum dalam membangun kembali fasilitas umum. Pihak swasta termasuk industri, individu dan keluarga akan berada di garis depan dalam membangun kembali sektor perumahan perdagangan, meskipun pemerintah turut mempunyai andil dalam hal tersebut. Sektor publik dan swasta akan bekerja sama dan saling berbagai mengenai dana rekonstruksi. Seberapa cepat negara yang terkena bencana mampu mengorganisir keuangan dan sumber-sumber lainnya akan menentukan seberapa cepat dan seefektif apa negara tersebut melakukan upaya pemulihan atas terjadinya suatu bencana. Seberapa cepat negara yang terkena bencana dapat mengkoordinir faktor keuangan dan sumber-sumber lainnya akan menentukan seberapa cepat negara tersebut pulih dari bencana tersebut. Sebuah negara mempunyai beberapa pilihan dalam memperoleh keuangan untuk menangani sebuah bencana: asuransi, organisasi keuangan pemerintah, donasi, instansi swasta dan kenaikan pajak.

Sistem dan alat-alat bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatasi bahaya yang terjadi dalam masyarakat cenderung cenderung relatif sama di seluruh dunia. Meskipun setiap organisasi manajemen bencana disetiap negara telah berkembang secara mandiri dari berbagai

macam sumber daya, sebagai tambahan globalisasi telah memfasilitasi standarisasi praktek, protocol dan peralatan yang digunakan oleh organisasi manajemen bencana. Adapun komponen pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam setiap manajemen penanggulangan bencana ialah (Coppola, 2007: 338):

- a. Departemen kebakaran
- b. Departemen hukum
- c. Manajemen bahaya (proteksi masyarakat)
- d. Pelayanan medis
- e. Militer

## II.7 COVID-19 (*Corona Virus Disease-2019*)

### II.7.1 Definisi COVID-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Hingga 23

April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia.

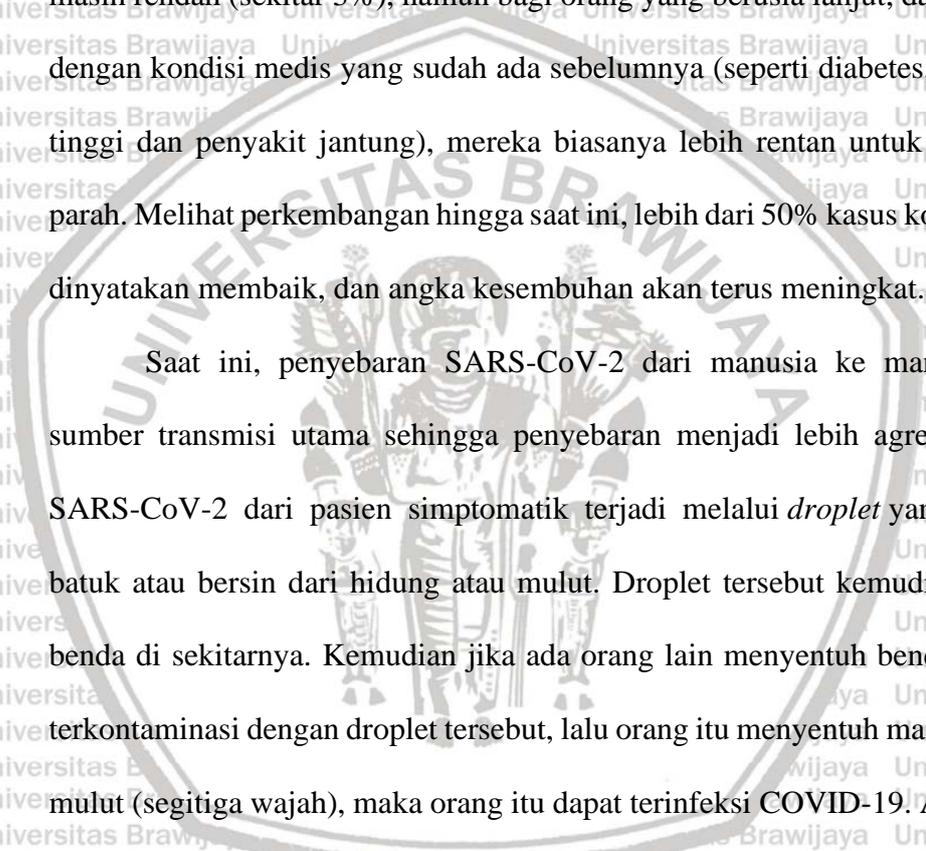
### II.7.2 Dampak Pandemi COVID-19

Gejala penderita COVID-19 pada umumnya umum berupa demam  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosis.

repository.ub.ac.id

Sebagai contoh, seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau bersin dari hidung atau mulut. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisabjuga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Selain itu, telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat viabel pada aerosol (dihasilkan melalui *nebulizer*) selama setidaknya 3 jam. WHO memperkirakan *reproductive number* (R0) COVID-19 sebesar 1,4 hingga 2,5. Namun, studi lain memperkirakan R0 sebesar

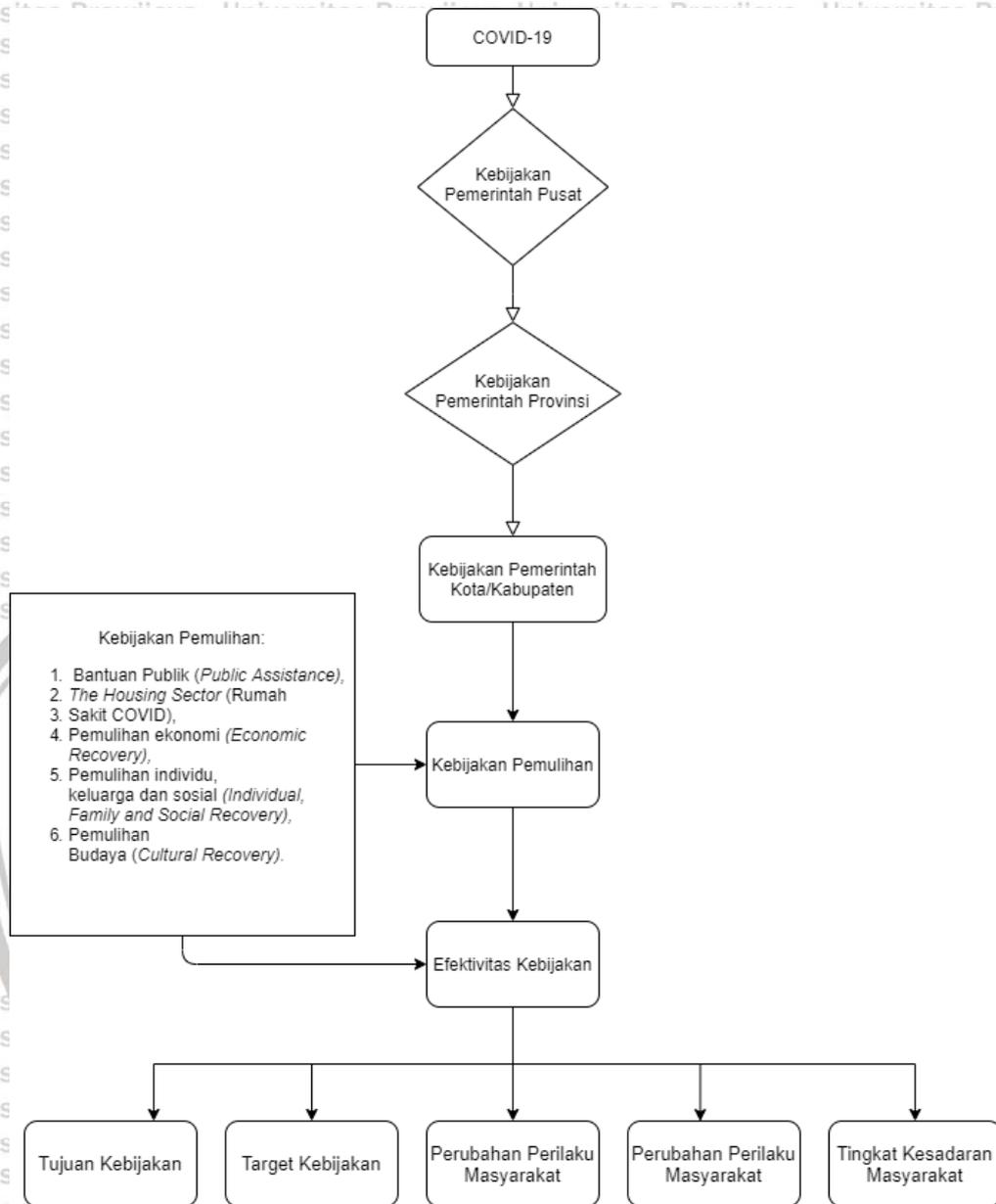


3,28. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit.

Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19.

## II.8 Kerangka Konseptual

Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu bagian dari penyelesaian masalah pelayanan sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini didasarkan atas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dan perlu dilakukan perbaikan terus menerus sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan dilakukan didasarkan atas dasar pengaduan atau keluhan dari masyarakat pengguna layanan. Adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat mengindikasikan bahwa pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian perlu adanya suatu pengelolaan pengaduan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Sumber : Olahan peneliti. (2021).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### III.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan menurut Zed (2004: 3) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa menurut Bungin (2005: 55), penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan objek pada bahan-bahan kepustakaan, peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Penelitian kepustakaan menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori dari waktu ke waktu dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya, Khatibah (2021: 36) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data literatur, pembacaan, pencatatan dan pengolahan bahan pustaka. Aktivitas ini tidak lepas dari koleksi perpustakaan yang berupa media cetak, media elektronik, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpustakaan.

Membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan harus dipersiapkan

dalam penelitian tersebut dimana kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan data. Berikutnya, menurut Danandjadja (1994: 82), penelitian kepustakaan merupakan cara untuk me review literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi.

Secara lebih jelas, Zed (2008: 4) menjelaskan bahwa terdapat empat ciri utama studi kepustakaan diantaranya yakni, pertama peneliti berhadapan langsung dengan teks (*Nash*) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-saksi (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.

Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” (*readymade*) artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Zed (2008: 16-19) juga menyebutkan terdapat empat langkah dalam penelitian kepustakaan yakni sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan;
- (2) Menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian;
- (3) Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang;
- (4) Mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang

memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, tergantung pada personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data menggunakan bantuan berbagai macam sumber perpustakaan atau internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data. Dengan demikian, maka penggunaan penelitian kepustakaan dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat COVID-19 Kota Malang.

### **III.2 Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian menurut Kimbal (2015: 65) mempunyai dua tujuan yakni penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus maka penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penentuan fokus penelitian secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menjangkau informasi yang mengalir masuk. Perumusan fokus penelitian yang tepat membuat peneliti akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, menurut Sutinah & Suyanto (2015: 171) penetapan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti dan berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan

tujuan penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitiannya. Oleh karena itu, dengan adanya fokus penelitian maka masalah-masalah, data, informasi dan hasil yang dikumpulkan, diamati, diolah dan dianalisis oleh peneliti agar tidak melebar ke permasalahan lain yang bukan menjadi fokus penelitian yang telah ditentukan. Sehingga nantinya penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

Selain itu fokus penelitian sangat penting dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan

Tujuan kebijakan tak lain yakni untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Kebijakan sendiri merupakan suatu komponen yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan di sebuah negara. Tujuan kebijakan Pemerintah Kota Malang dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan berdasarkan Kebijakan Gubernur, Menteri, Presiden serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Kejelasan tujuan kebijakan pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sangat penting untuk diketahui. Karena hal itu berkaitan dengan efektivitas kebijakan yang menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat. Strategi, target

pencapaian tujuan kebijakan yang dibuat, proses analisis dan perumusan kebijakannya yang matang serta penyusunan program yang tepat akan menghasilkan tujuan kebijakan yang tepat pula. Sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilihat secara jelas dan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemulihan.

## 2. Target kebijakan

Target kebijakan berkenaan dengan target yang direncanakan tidak terjadi tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Realitas target apakah selaras dengan target-target lainnya, dan apakah target tersebut dapat dicapai atau tidak. Dengan adanya kebijakan ini, target-target tersebut diharapkan dapat dicapai. Dalam penelitian ini target kebijakan Pemerintahan Kota Malang dapat diketahui dengan kebijakan yang dikeluarkan selama masa pandemi dengan menyeleraskannya dengan target-target dari Kebijakan Gubernur, Menteri, Presiden serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19. Target kebijakan harus disesuaikan dengan sebaik mungkin. Target kebijakan harus disesuaikan dengan ukura-ukuran yang jelas dalam setiap tahapannya agar mencapai dampak dan tingkat efektivitas kebijakan yang dikeluarkan.

## 3. Perubahan perilaku masyarakat

Kebijakan dibuat oleh pengambil keputusan ditingkat nasional ataupun daerah. Efektivitas kebijakan dilihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam mentaati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Malang dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kota Malang. Dengan adanya kebijakan perubahan perilaku tersebut, masyarakat akan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang telah diatur. Maka, jika perubahan perilaku masyarakat tidak mengalami yang baik maka hal itu akan berdampak terhadap tingkat efektivitas kebijakan yang telah dikeluarkan. Meskipun pada dasarnya perubahan perilaku masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor lain baik secara individu atau kelompok di dalam lingkungannya. Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana perubahan perilaku masyarakat terhadap kebijakan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

#### 4. Tingkat kesadaran masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat adalah pengetahuan dan keadaan mengerti tentang hal yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat secara individu atau kelompok yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Tingkat kesadaran masyarakat akan sejalan dengan efektivitas kebijakan yang ada apabila perilaku baik untuk mencapai tujuan atau target yang dibuat. Dalam penelitian ini akan mengetahui tingkat kesabaran masyarakat melalui informasi secara sekunder terhadap ketaatan terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang.

#### 5. Dampak kebijakan

Kebijakan yang baik akan menghasilkan dampak yang baik pula. Dampak kebijakan merupakan keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dampak kebijakan juga bisa berbentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Dampak kebijakan bisa meliputi berbagai bidang seperti sosia, budaya, kesehatan dan lainnya. Dampak pada bidang-bidang tersebut akan dilihat dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi ukuran yang pas untuk melihat efektivitas kebijakan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa Pandemi COVID-19 di Kota Malang.

### III.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Pemilihan lokasi dan situs penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian agar peneliti mudah memperoleh data dan informasi yang menunjang dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kota Malang. Alasan pemilihan Kota Malang sebagai lokasi penelitian yaitu Kota Malang sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki dampak epidemiologi perkembangan COVID-19 di kawasan Malang Raya. Bahkan sampai terjadi *doubling time* atau peningkatan kasus menjadi dua kali lipat yang sudah terjadi sebanyak empat periode di Malang Raya. Hal ini menjadi salah satu bobot pertimbangan yang mengkhawatirkan. Bahkan daerah Malang terdapat adanya transmisi lokal yang ditandai dengan terus bertambahnya peta sebaran COVID-19 berdasarkan wilayah kecamatan yang kian memerah. Namun, kebijakan

penanggulangan COVID-19 di Kota Malang terus dilakukan dan diupayakan. Hal inilah yang menjadi alasan utama peneliti untuk melihat tingkat efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Malang dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

#### III.4 Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas dari suatu penelitian, dan hal yang paling memengaruhi kualitas data adalah sumber data tersebut ditetapkan dan cara mendapatkannya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Silalahi (2009) data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia. Data yang dijadikan acuan atau referensi sebagai data sekunder bagi peneliti adalah penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui dokumen atau arsip, foto, buku, jurnal, dan laporan resmi, peraturan-peraturan, dan referensi dari internet, koran maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Adapun sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari:

Tabel 3.1 Sumber Data

No	Judul dokumen atau Artikel	Informasi	Sumber
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	<a href="http://www.peraturan.bpk.go.id">www.peraturan.bpk.go.id</a>

No	Judul dokumen atau Artikel	Informasi	Sumber
	Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional		
2.	Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	<a href="http://www.peraturan.bpk.go.id">www.peraturan.bpk.go.id</a>
3.	Bangun Optimisme Pemulihan Ekonomi Malang Raya	Agenda Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.go.id">www.malangkota.go.id</a>
4.	Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas Kota	Agenda Kebijakan	<a href="http://www.malangkota.go.id">www.malangkota.go.id</a>

No	Judul dokumen atau Artikel	Informasi	Sumber
5.	Malang Pascapandemi Covid-19 Wali Kota Malang Optimis Pemulihan Ekonomi Kota Malang Lebih Cepat	Pemulihan Ekonomi Kota Malang Agenda Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.go.id">www.malangkota.go.id</a>
6.	OJK Dorong Pemulihan Ekonomi melalui Perbankan Syariah	Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.go.id">www.malangkota.go.id</a>
7.	Kota Malang Ikuti Rakor Apeksi Bahas Pemulihan Ekonomi	Agenda Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.go.id">www.malangkota.go.id</a>
8.	Kota Malang Dalam Angka 2021	Pertumbuhan Ekonomi	<a href="http://www.malangkota.bps.go.id">www.malangkota.bps.go.id</a>
9.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Pengeluaran 2016 - 2020	Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Pengeluaran	<a href="http://www.malangkota.bps.go.id">www.malangkota.bps.go.id</a>
10.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Lapangan Usaha 2016 - 2020	Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Lapangan Usaha	<a href="http://www.malangkota.bps.go.id">www.malangkota.bps.go.id</a>
11.	Inflasi Kota Malang 2020	Inflasi Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.bps.go.id">www.malangkota.bps.go.id</a>
12.	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2020	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.bps.go.id">www.malangkota.bps.go.id</a>
13.	Statistik Daerah Kota Malang 2020	Statistik Daerah Kota Malang	<a href="http://www.malangkota.bps.go.id">www.malangkota.bps.go.id</a>
14.	JURNAL ILMIAH	Penelitian	<a href="http://www.jurnal.stie-aas.ac.id">www.jurnal.stie-aas.ac.id</a>

No	Judul dokumen atau Artikel	Informasi	Sumber
	EKONOMI ISLAM	Terdahulu	
15.	JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA	Penelitian Terdahulu	<a href="http://www.jurnal.untag-sby.ac.id">www.jurnal.untag-sby.ac.id</a>
16.	Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020	Penelitian Terdahulu	<a href="http://www.untan.ac.id">www.untan.ac.id</a>
17.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.071menkes/305/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Intruksi Kemenkes tentang penerapan PSBB di Wilayah Kota Malang	<a href="http://www.covid-19.malangkota.go.id/beranda">www.covid-19.malangkota.go.id/beranda</a>
18.	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/242/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu	Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerapan PSBB	<a href="http://www.kominfo.jatimprov.go.id/">www.kominfo.jatimprov.go.id/</a>
19.	<i>Coronavirus COVID-19 Global Cases</i>	Jumlah orang yang terinfeksi	<a href="http://coronavirus.jhu.edu">coronavirus.jhu.edu</a>

No	Judul dokumen atau Artikel	Informasi	Sumber
		COVID-19 dan korban meninggal diseluruh dunia	
20.	Peta sebaran COVID-19	Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia	Covid19.go.id
21.	<i>Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19</i>	Dampak yang ditimbulkan COVID-19	www.imf.org
22.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Persentase kematian COVID-19 dengan kasus positif tertinggi di Indonesia terdapat pada 10 provinsi	infeksiemerging.kemkes.go.id
23.	Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional	COVID-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam di Indonesia	Database Peraturan BPK RI
24.	COVID-19 Indonesia terus naik: 'Orang yang tak taat protokol makin banyak' karena masyarakat menengah bawah tak paham?	Sosialisasi protokol COVID-19 yang tidak efektif bagi masyarakat	BBC News Indonesia
25.	Presiden Jokowi menekan aturan resmi yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Penetapan Kedaruratan	Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19	Database Peraturan BPK RI

No	Judul dokumen atau Artikel	Informasi	Sumber
	Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		

*Sumber: Olahan Peneliti (2021)*

### III.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Menurut Luthfiyah (2017: 142) menjelaskan bahwa dengan melakukan studi pustaka, para peneliti mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang hendak diteliti. Lebih lanjut, Setiawan (2020: 33) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan studi yang dilakukan dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data utamanya, seperti naskah, buku, koran, majalah, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, makna pustaka juga mengacu pada dokumen digital yakni dokumen yang ada di dalam internet.

Sedangkan menurut Walujo (2020: 128), studi dokumentasi diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan data yang bersifat “non behavior”, dalam hal ini ialah data dokumen. Studi dokumentasi dapat didefinisikan sebagai pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yang terdapat pada dokumen. Data dokumen dapat berupa tulisan atau lukisan (gambar), dapat pula berupa benda-benda. Dokumen sekunder merupakan dokumen yang dibuat oleh orang yang mengalami atau mengamati sendiri gejalanya melainkan hanya mendasarkan pada informasi yang diperoleh tentang dokumen tersebut melalui bacaan, wawancara, maupun pengamatan. Hal senada juga disebutkan oleh Sugiyono (2016: 240) yang

menjelaskan bahwa dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti mengumpulkan dokumen terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang telah ada.

Secara umum dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan mereview dan meneliti buku, dokumen, catatan dan laporan terkait masalah yang akan dipecahkan. Dengan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka dapat memperoleh pengetahuan dan opini dasar tertulis. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori dan praktik. Data ini dapat diperoleh dengan cara browsing di internet, membaca berbagai dokumen, hasil penelitian peneliti terdahulu, catatan kuliah dan sumber terkait lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pencatatan, meringkas maupun menganalisis dan memanfaatkan data yang ada, berhubungan dengan objek yang diteliti seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, arsip-arsip penting atau juga dapat berupa gambar. Dalam hal ini studi pustaka dan dokumentasi yang didapat berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam tanggap darurat COVID-19 di Kota Malang:

Tabel 3. 2 Studi Pustaka

No	Nama Dokumen	Teknik Pengumpulan Dokumen	Tanggal Dokumen Dikumpulkan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional	Penelusuran Web	17 Februari 2021
2.	Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara	Penelusuran Web	23 Februari 2021

No	Nama Dokumen	Teknik Pengumpulan Dokumen	Tanggal Dokumen Dikumpulkan
	Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional		
3.	Bangun Optimisme Pemulihan Ekonomi Malang Raya	Penelusuran Web	30 Januari 2021
4.	Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas Kota Malang Pascapandemi Covid-19	Penelusuran Web	16 Februari 2021
5.	Wali Kota Malang Optimis Pemulihan Ekonomi Kota Malang Lebih Cepat	Penelusuran Web	21 Mei 2021
6.	OJK Dorong Pemulihan Ekonomi melalui Perbankan Syariah	Penelusuran Web	5 Mei 2021

No	Nama Dokumen	Teknik Pengumpulan Dokumen	Tanggal Dokumen Dikumpulkan
7.	Kota Malang Ikuti Rakor Apeksi Bahas Pemulihan Ekonomi	Penelusuran Web	4 Mei 2021
8.	Kota Malang Dalam Angka 2021	Penelusuran Web	1 Maret 2021
9.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Pengeluaran 2016 - 2020	Penelusuran Web	29 April 2021
10.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Lapangan Usaha 2016 - 2020	Penelusuran Web	14 April 2021
11.	Inflasi Kota Malang 2020	Penelusuran Web	15 Maret 2021
12.	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2020	Penelusuran Web	1 Februari 2021
13.	Statistik Daerah Kota Malang 2020	Penelusuran Web	11 Februari 2021

No	Nama Dokumen	Teknik Pengumpulan Dokumen	Tanggal Dokumen Dikumpulkan
14.	JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM	Penelusuran Web	29 Juni 2021
15.	JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA	Penelusuran Web	29 Juni 2021
16.	Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020	Penelusuran Web	29 Juni 2021
17.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/1menkes/305/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Penelusuran Web	1 Februari 2021
18.	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/242/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019	Penelusuran Web	1 Februari 2021

No	Nama Dokumen	Teknik Pengumpulan Dokumen	Tanggal Dokumen Dikumpulkan
	(COVID-19) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu		
19.	<i>Coronavirus COVID-19 Global Cases</i>	Penelusuran Web	11 Februari 2021
20.	Peta sebaran COVID-19	Penelusuran Web	16 Februari 2021
21.	<i>Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19</i>	Penelusuran Web	21 Mei 2021
22.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Penelusuran Web	5 Mei 2021
23.	Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non- alam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) sebagai Bencana Nasional	Penelusuran Web	11 Desember 2020
24.	COVID-19 Indonesia terus naik: 'Orang yang tak taat protokol makin banyak' karena 'masyarakat menengah bawah tak paham'?	Penelusuran Web	16 Februari 2021

No	Nama Dokumen	Teknik Pengumpulan Dokumen	Tanggal Dokumen Dikumpulkan
25.	Presiden Jokowi meneken aturan resmi yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Penelusuran Web	21 Mei 2021

Sumber: *Olahan Peneliti (2021)*

### III.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Wijaya (2018: 52) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengkan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Menurut Braun & Clarke (2016: 297), analisis tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan pola makna (tema) di dalam data kualitatif. Analisis tematik mengajarkan mekanisme pengkodean dan menganalisis data kualitatif secara sistematis, yang kemudian dapat dikaitkan

dengan masalah teoritis atau konseptual yang lebih luas. Adapun tahapan dari analisis tematik menurut Braun & Clarke (2006) adalah sebagai berikut:

### **1. Mengumpulkan data**

Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan, memahami, dan mentranskripsikan data tekstual untuk menyoroti item yang penting dengan cara membaca serta mulai memikirkan arti dari data terkait efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 tersebut.

### **2. Membuat kode secara umum**

Tahap kedua dimulai dengan analisis data secara sistematis melalui pembuatan kode, dimana setelah semua data terkumpul selanjutnya diberi kode dengan menuliskan makna dari setiap data yang diperoleh terkait efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19. Kode dapat memberikan gambaran terkait isi data yang diperoleh.

### **3. Mengembangkan tema**

Tahap ketiga dalam analisis tematik adalah mengembangkan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian terkait efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19. Tema ini menggambarkan sesuatu yang penting yang ada di data terkait dengan rumusan masalah penelitian.

### **4. Mereview tema**

Tahap selanjutnya mereview tema di mana tema yang sedang berkembang ditinjau ulang dengan kode dan tema yang telah peneliti buat terkait efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.

### **5. Mendefinisikan tema**

Tahap berikutnya yakni mendefinisikan tema. Dalam mendefinisikan tema, harus jelas menyatakan apa yang penting dan spesifik pada setiap tema. Nama yang diberikan pada tema harus direvisi berulang kali, sampai tidak ada ambiguitas dalam menyusun pembahasan terkait efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.

### **6. Membuat laporan dan diskusi hasil**

Tahap terakhir dalam analisis tematik adalah membuat laporan inti dari tema-tema yang diambil peneliti untuk mendukung hasil penelitian.

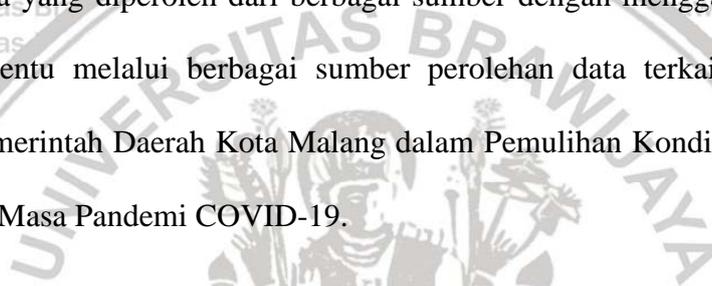
## **III.8 Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2015: 92) merupakan tingkat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kegiatan ini dibutuhkan untuk mengetahui ke-valid-an data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau

sebagai perbandingan terhadap data. Dalam penelitian ini, triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.

Menurut Denzin dalam Moleong (2012: 330), triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh melalui berbagai sumber.

Dengan triangulasi sumber, peneliti dapat membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan atau memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data terkait efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### IV.1. Gambaran Umum Kebijakan Pemulihan di Kota Malang

Sejak diumumkan pasien positif terjangkit virus Corona atau *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menekan penyebaran virus tersebut. Beberapa keputusan yang diambil, juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi masyarakat, yang diharapkan tetap bisa berputar, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Keputusan yang diambil oleh pusat itu, juga diterapkan di berbagai daerah seperti di Kota Malang, Jawa Timur. Pemerintah daerah mengambil langkah untuk menindaklanjuti Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran COVID-19. Dalam maklumat tersebut, masyarakat diminta untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di tempat sendiri.

Pada tanggal 18 Maret 2020 tercatat 8 kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Enam di antaranya merupakan hasil pemeriksaan spesimen yang dilakukan di *Institute of Tropical Disease* (ITD) Universitas Airlangga Surabaya, dan dua lainnya merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Balitbangkes Kemenkes). Jumlah orang dalam pengawasan (ODP) adalah 29 orang. Sementara itu, 11 pasien sedang dalam pengawasan (PDP). Meski 8 pasien

positif COVID-19, dua pasien tersebut dirawat satu di RSUD Saiful Anwar Malang dan satu antaranya meninggal dunia (Dinas Informasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2020). Pasien tersebut merupakan pasien kedelapan yang dirawat di RSSA dan meninggal karena memiliki faktor risiko serta penyakit lain pada tanggal 14 Maret 2020 sedangkan hasil laboratorium belum keluar. Pasien tersebut merupakan pasien wanita berusia 51 tahun tercatat sebagai warga Dau, Kabupaten Malang. Sedangkan pasien yang kedua adalah seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang masih di rawat. Ayah pasien meninggal pada tanggal 3 Maret 2020 karena pneumonia parah, dan sempat tes laboratorium dengan hasil dinyatakan negatif. Wakil Direktur RSSA Kota Malang, Saifullah Asmiragani di Malang pada 18 Maret 2020 mengungkapkan bahwa kondisi dari pasien tersebut berangsur membaik (CNBC Indonesia, 2020). Jumlah kasus COVID-19 tersebut dapat berkembang setiap harinya. Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga tanggal 31 Maret 2020 terdapat 6.565 orang dalam pengawasan (ODP) dan 420 pasien dalam pengawasan (PDP), 93 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 dan satu orang kembali dinyatakan negatif sehingga total sembuh 17 orang dan 8 orang meninggal.

Sejak kasus pertama COVID-19 di Jawa Timur dilaporkan, kini kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Kasus COVID-19 padabulan April 2020 hingga bulan berikutnya dapat dilihat pada tabel perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur, menggunakan sumber data WHO dan PHEOC Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Pasien COVID-19 di Jawa Timur

No	Tanggal	Jumlah Kasus Kumulatif Konfirmasi Positif	Jumlah Kasus Kumulatif Sembuh	Jumlah Kasus Kumulatif Meninggal
1	30 April 2020	1.001	721	209
2	31 Mei 2020	4.862	2.066	583
3	30 Juni 2020	11.833	6.776	1.237
4	31 Juli 2020	21.436	14.904	2.004
5	31 Agustus 2020	33.278	26.653	2.819
6	30 September 2020	43.536	38.223	3.621
7	31 Oktober 2020	52.460	48.686	4.216
8	30 November 2020	61.918	57.646	5.020
9	31 Desember 2020	84.412	75.047	6.402
10	31 Januari 2021	112.917	97.423	8.038
11	28 Februari 2021	129.459	113.568	9.056
12	31 Maret 2021	139.545	127.461	9.893
13	30 April 2021	147.745	134.935	19.665
14	31 Mei 2021	154.781	141.338	11.345

Sumber: covid19.kemkes.go.id (2021)

Data tersebut dapat berkembang setiap bulannya. Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur semakin meningkat. Maret 2020 merupakan bulan dimana kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur mulai meningkat secara signifikan, dan angka kesembuhan masih belum signifikan. Berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2021 terdapat 154.781 orang terkonfirmasi kasus positif di Jawa Timur.

Selanjutnya jumlah pasien sembuh di Jawa Timur sebanyak 141.338 orang.

Sementara untuk pasien yang meninggal menjadi 11.338 orang.

Sementara Sejak kasus pertama COVID-19 di Kota Malang dilaporkan, kini kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Kasus COVID-19 pada bulan April 2020 hingga bulan berikutnya dapat dilihat pada tabel perkembangan kasus COVID-19 di Kota Malang, menggunakan sumber data Dinas Kesehatan Kota

Malang sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Pasien COVID-19 di Kota Malang

No	Tanggal	Jumlah Kasus Kumulatif Konfirmasi Positif	Jumlah Kasus Kumulatif Sembuh	Jumlah Kasus Kumulatif Meninggal
1	30 April 2020	17	8	1
2	31 Mei 2020	50	17	2
3	30 Juni 2020	210	54	34
4	31 Juli 2020	654	354	54
5	31 Agustus 2020	1.265	802	106
6	30 September 2020	1.780	1.495	170
7	31 Oktober 2020	2.036	1.814	205
8	30 November 2020	2.277	2.037	234
9	31 Desember 2020	3.699	3.012	366
10	31 Januari 2021	5.449	4.504	476
11	28 Februari 2021	6.028	5.397	537
12	31 Maret 2021	6.195	5.613	567
13	30 April 2021	6.369	5.751	579
14	31 Mei 2021	6.679	6.045	614

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang (2021)

Saat ini pemulihan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama. Seluruh instansi pemerintah maupun swasta bersama – sama memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian Epidemologi COVID –19. Dengan mempertimbangkan penyebaran COVID–19 di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu hingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang cukup besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kota Malang menetapkan kebijakan dan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam melakukan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang. Beberapa kebijakan yang

dilakukan yaitu:

1. Upaya pemulihan kondisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang memiliki lima strategi percepatan pemulihan ekonomi hadapi pandemi COVID-19, yakni Malang Beli Produk Lokal (Malpro), Malang Berbagi (Malber), Malang Herbal (Malherb), Malang Digital Service (Maldis), dan Malang Bahagia (Malba). Wali Kota Malang Bapak Sutiaji mengungkapkan lima strategi itu yaitu seperti Malang Beli Produk Lokal (Malpro) yang tujuan untuk mendorong penguatan ekonomi dan UMKM lokal. Meskipun sifatnya edaran, Sutiaji mengatakan sudah mewajibkan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk berbelanja di pasar rakyat. Kemudian strategi Malang Berbagi (Malber) yang berarti penguatan pentahelix selama pandemi COVID-19. Strategi percepatan berikutnya dengan konsep Malang Herbal (Malherb) yang berarti pengembangan produk herbal sebagai alternatif suplemen kesehatan. Kemudian dijelaskan ada strategi Malang *Digital Service* (Maldis) yang bertujuan untuk mendorong layanan berbasis daring. Ini juga merupakan salah satu langkah menuju Malang *Smart City*. Strategi percepatan berikutnya yang diungkapkan Sutiaji adalah Malang Bahagia (Malba), yang berarti adalah kampanye digital gaya hidup sehat kepada warga masyarakat Kota Malang.
2. Pemerintah Kota Malang terus melakukan upaya pemulihan kondisi ekonomi lainnya. Pemerintah Kota Malang membuat program prioritas yang akan dilakukan untuk melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di tahun 2021 ini, program telah disiapkan antara lain digitalisasi produk untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Malang membantu

UMKM memperluas pasar dengan memasukkan produk ke *marketplace* memanfaatkan teknologi *digital farming*. Digitalisasi pasar dan platform belanja daring dipacu untuk memudahkan masyarakat seiring keberadaan transportasi *online* menyentuh 5.267 industri kecil menengah (IKM).

Teknisnya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia. Beberapa masyarakat ikut ambil bagian dalam meningkatkan penjualan UMKM melalui online terbukti mendongkrak omzet ketimbang menjual produk secara konvensional. Saat ini, Pemerintah Kota Malang terus menggenjot sektor industri kreatif, pariwisata, kemudahan investasi melalui penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan infrastruktur. Intinya, Pemerintah Kota Malang berkomitmen mempercepat pemulihan kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

3. Pemerintah Kota Malang juga melakukan rencana aksi TPKAD. Roadmap rencana aksi TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kota Malang di tahun 2022, pihaknya akan mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital. Kemudian pada 2023 di sektor pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah. Realisasi program TPKAD Kota Malang di tahun 2020, yaitu antara lain program Laku Pandai, program Simpanan Pelajar, dan program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) yang semuanya menunjukkan tren positif. Roadmap yang telah disusun TPKAD Kota Malang juga sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Malang. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari perangkat daerah dan pihak terkait. Hal ini untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) di

Kota Malang agar bisa dioptimalkan dengan melibatkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

4. Pemerintah Kota Malang serius menerapkan kebijakan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. Berbagai kebijakan pemulihan dilakukan untuk membuat perekonomian tumbuh, menekan penularan COVID-19, serta meningkatkan kesembuhan. Harus diakui awal pandemi COVID-19 telah mengakibatkan kontraksi di semua sektor. Namun, Pemerintah Kota Malang bergerak cepat mengeluarkan kebijakan krusial *refocusing* anggaran Rp86 miliar pada awal pandemi. Anggaran itu untuk dana cadangan, bantuan sosial, penyediaan alat, dan sarana prasarana. Kebijakan pembatasan sosial pun menyusul aturan protokol kesehatan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019.

5. Mal pelayanan publik juga dimanfaatkan untuk Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat yaitu dengan memanfaatkan Mal Pelayanan Publik tersebut terkoneksi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) sebagai solusi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Dinas Komunikasi dan Informatika juga melibatkan *influencer* dan komunitas kreatif digital dalam kampanye disiplin menggunakan masker. Walikota Malang Sutiaji juga ikut turun langsung ke kampung-kampung untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan, menindak tegas kafe/restoran yang melanggar aturan protokol kesehatan. Segala regulasi dan pelayanan terhadap masyarakat harus dinamis agar membantu pemulihan

ekonomi, hal itu akan berdampak pada stok pangan dan stabilitas harga yang aman.

6. Pemulihan ekonomi di Kota Malang selama 2020 sangat efektif sejalan dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan diharapkan terus berlanjut. Sutiaji menyatakan bahwa pergerakan ekonomi sangat linier dengan mobilitas orang.

Karena itu kedisiplinan dalam aktivitas sosial merupakan kunci utama dalam pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Kedisiplinan pula akan mempercepat pemulihan ekonomi karena ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan masih cukup kuat kendati

Indeks Kondisi Ekonomi sempat tertekan pada Januari 2021. Upaya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat juga melibatkan Polri dan TNI juga dilibatkan untuk menjaga keamanan dan berjalannya pelayanan dari Pemerintah Kota Malang agar berjalan dengan baik. Hal itu juga untuk membantu dalam penerapan aturan protokol kesehatan diterapkan yang mulai diterapkan di perkantoran, sektor usaha sampai 26 pasar tradisional.

7. Pemerintah Kota Malang juga melakukan kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan hingga tingkat kelurahan, RT dan RW. Salah satu program Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah “*Kampung Tangguh*”. Pendataan, pelacakan, dan pengawasan diperkuat melibatkan warga di tiap rukun tetangga (RT). Pelaksanaan kampung tangguh itu mendahului kebijakan nasional. Pemerintah Kota Malang menginisiasi program kampung tangguh yang akhirnya diadopsi pemerintah pusat lalu memunculkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) dan PPKM skala mikro. Kampung tangguh Kota Malang pun jadi percontohan nasional. Akhirnya, inovasi kampung tangguh mendorong berbagai daerah belajar praktik terbaik penanganan COVID-19 di Kota Malang. Kampung tangguh yang menerapkan konsep pentahelix berhasil membendung kasus baru dan dianggap paling ampuh dalam menangani pandemi COVID-19. Sebanyak 88 kampung tangguh di dalamnya ada urban farming sebagai penguat ekonomi keluarga selain mencegah penularan COVID-19 juga meningkatkan kesembuhan. Kini Kota Malang berada di zona kuning. Aktivitas pelayanan publik membaik sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Angka kesembuhan meningkat mencapai 85%-90% selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

8. Selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Kota Malang juga melakukan vaksinasi. Vaksinasi masih berlangsung kendati sudah memvaksin 18.530 tenaga kesehatan. Vaksinasi juga menyentuh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Forkopimda, DPRD, TNI, Polri dan pejabat sektor publik. Baru-baru ini, Pemerintah Kota Malang memvaksin 9.873 guru dan wartawan. Tahap berikutnya menasar 10.741 pedagang di 26 pasar rakyat. Pelaksanaan vaksinasi ini selaras dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang teknisnya detail sampai 4.273 rukun tetangga. Seluruh RT zona hijau dan kuning, tidak ada yang oranye apalagi merah. Penurunan kasus baru karena usaha pencegahan melibatkan semua pihak. Selain itu, Pemerintah Kota Malang sangat serius menangani

pandemi dengan mengalokasikan anggaran Rp2,415 miliar untuk dana operasional RT/RW. Sedangkan dana operasional posko kecamatan dan kelurahan total Rp129 juta untuk 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Pemerintah Kota Malang juga menerapkan PPKM skala mikro berkelanjutan atau tidak dibatasi waktu sampai pandemi berakhir. Namun kebijakan ini juga menekankan pentingnya protokol kesehatan dan gerakan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, serta menjaga keteraturan makan dan imun.

## **IV.2. Penyajian Data**

### **IV.2.1 Tujuan Kebijakan**

Tujuan kebijakan dalam Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat sangat penting untuk menjamin efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Malang di masa Pandemi COVID-19. Dalam upaya Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat pemerintah memiliki kebijakan dalam menjamin sarana dan prasarana ekonomi seperti aksesibilitas, metode, dan teknologi yang membantu untuk mencapai Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat. Tujuan upaya pemulihan kondisi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah percepatan pemulihan ekonomi hadapi pandemi COVID-19, dengan mendorong penguatan ekonomi dan UMKM lokal. Meskipun sifatnya edaran, kebijakan Pemerintah Kota Malang juga ingin menciptakan kebiasaan kepada masyarakat di lingkungan Kota Malang untuk berbelanja di pasar rakyat. Kebijakan ini juga diperkuat dengan

memaksimalkan teori *pentahelix* selama pandemi COVID-19. Hal ini akan berdampak juga pada perekonomian dan kesehatan masyarakat di Kota Malang.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang juga memiliki tujuan untuk mendorong layanan berbasis digital gaya hidup sehat kepada warga masyarakat Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang terus melakukan upaya pemulihan kondisi ekonomi lainnya. Pemerintah Kota Malang membuat program prioritas yang akan dilakukan untuk melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di tahun 2021 ini, program telah disiapkan antara lain digitalisasi produk untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Malang membantu UMKM memperluas pasar dengan memasukkan produk ke *marketplace* memanfaatkan teknologi *digital farming*. Digitalisasi pasar dan platform belanja daring dipacu untuk memulihkan perekonomian serta memudahkan masyarakat seiring keberadaan transportasi *online* menyentuh sebanyak mungkin industri kecil menengah (IKM). Pemerintah Kota Malang juga berusaha menguatkan sektor industri kreatif, pariwisata, kemudahan investasi melalui penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan infrastruktur. Pemerintah Kota Malang berkomitmen mempercepat pemulihan kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.



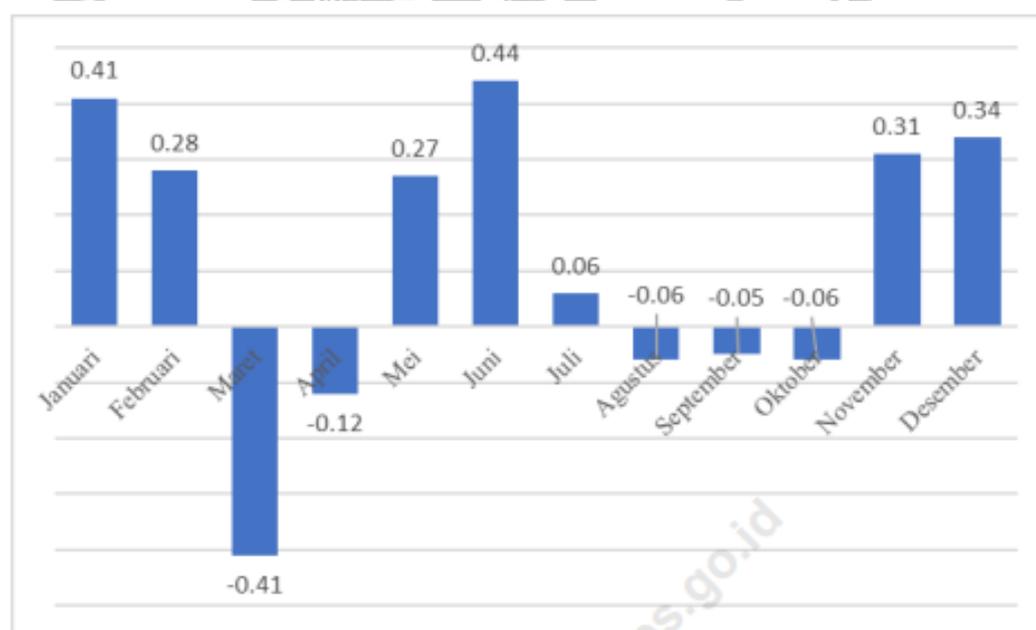
Gambar 4. 1 FGD Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Malang

*Sumber: malangkota.go.id (2021)*

Pemerintah Kota Malang juga melakukan rencana aksi TPKAD. Roadmap rencana aksi TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kota Malang hal itu bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital. Kemudian pada 2023 di sektor pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah. Roadmap yang telah disusun TPKAD Kota Malang juga sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Malang dalam pemulihan ekonomi di Kota Malang. Hal ini untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Malang agar bisa dioptimalkan dengan melibatkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Hal itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Wali Kota Malang:

“Roadmap rencana aksi TPKAD Kota Malang 2021-2025, di 2021 sudah ditetapkan secara nasional bahwa program TPKAD berkaitan dengan akselerasi pembukaan rekening, baik buku tabungan dan atau pembiayaan yang mudah cepat dan berbiaya rendah antara lain melalui digitalisasi produk dan layanan keuangan. Ini untuk memudahkan layanan kepada masyarakat”

Pemerintah Kota Malang serius menerapkan kebijakan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Malang bergerak cepat mengeluarkan kebijakan krusial *refocusing* anggaran Rp86 miliar pada awal pandemi. Anggaran itu untuk dana cadangan, bantuan sosial, penyediaan alat, dan sarana prasarana. Kebijakan pembatasan sosial pun menyusul aturan protokol kesehatan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019.



Gambar 4. 2 Inflasi per Bulan Kota Malang Tahun 2020

Sumber: Inflasi Kota Malang 2020

*Refocusing* tersebut dilakukan agar mendukung tujuan kebijakan meminimalisir

dampak terhadap sektor lainnya. Selama pandemi COVID-19 Kota Malang mengalami inflasi yang cukup mengkhawatirkan. Hal itu yang tidak ingin dialami kembali oleh Kota Malang terutama agar menjaga ekonomi di Kota Malang tetap tumbuh.

Mal pelayanan publik juga dimanfaatkan untuk Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat yaitu dengan memanfaatkan Mal Pelayanan Publik tersebut terkoneksi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) sebagai solusi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pergerakan ekonomi sangat linier dengan mobilitas orang. Karena itu kedisiplinan dalam aktivitas sosial merupakan kunci utama dalam pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Upaya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat juga melibatkan Polri dan TNI juga dilibatkan untuk menjaga keamanan dan berjalannya pelayanan dari Pemerintah Kota Malang agar berjalan dengan baik.

Kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan hingga tingkat kelurahan, RT dan RW merupakan program Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah “Kampung Tangguh”. Inovasi kampung tangguh mendorong pemulihan ekonomi masyarakat penanganan COVID-19 di Kota Malang. Kampung tangguh yang menerapkan konsep pentahelix tersebut mengandung *urban farming* sebagai penguat ekonomi keluarga selain mencegah penularan COVID-19 juga meningkatkan kesembuhan.

Pemerintah Kota Malang juga melakukan vaksinasi. Vaksinasi masih akan terus berlangsung hingga mencapai *Herd Immunity*. Vaksinasi menjadi kunci untuk

mengurangi kesenjangan antara mobilitas dan aktivitas ekonomi di masa pandemi.

Semakin masif pemberian vaksinasi, maka kesenjangan antara masalah kesehatan dan perekonomian ini akan semakin mengecil. Pemerintah Kota Malang sangat serius menangani pandemi dengan mengalokasikan anggaran Rp2,415 miliar untuk dana operasional RT/RW. Sedangkan dana operasional posko kecamatan dan kelurahan total Rp129 juta untuk 5 kecamatan dan 57 kelurahan.

Tujuan Pemerintah Kota Malang dalam membuat kebijakan pemulihan ekonomi sudah sesuai dengan pendapat Suharno (2010: 31) yang menyatakan tujuan kebijakan yang akan dicapai apabila memperhatikan kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. Pemerintah Kota Malang sangat menyesuaikan dengan kompleksitas tujuan kebijakan pemulihan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Strategi yang digunakan untuk mengefektifkan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis

#### **IV.2.2 Target Kebijakan**

Pemerintah Kota Malang terus memaksimalkan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Malang. Target kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah penyelamatan adalah kegiatan

penyelamatan dalam perkonomian yang penting dilakukan untuk memberikan penguatan ekonomi di Kota Malang dalam masa pandemi COVID-19.



Gambar 4.3 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi

*Sumber: malangkota.go.id (2020)*

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 Bank Indonesia Malang, pertumbuhan ekonomi Kota Malang diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,7 persen hingga 4,7 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang ini didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, dan konstruksi. Bank Indonesia Malang turut berupaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah seperti menjaga terkendalinya inflasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Maka, target kebijakan dari pemulihan ekonomi yang dilakukan adalah mendorong potensi tinggi dalam ekspor, pariwisata, pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan transaksi non tunai dan keuangan digital, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta meningkatkan kolaborasi hexahelix (pemerintah, swasta, intelektual, komunitas kreatif, media dan

investor). Pemerintah Kota juga menargetkan diseminasi, *sharing knowledge*, dan menumbuhkan optimisme dalam pemulihan ekonomi agar dapat menjadi pijakan dalam transformasi ekonomi. Sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi.



Gambar 4. 4 Seminar Pemulihan Ekonomi Malang Raya 2021

Sumber: [malangkota.go.id](http://malangkota.go.id) (2021)

Perekonomian di Jawa Timur sudah melewati masa kritis dan sudah mulai *recovery*. Namun masih ada ketidakpastian sejauh mana dampak pandemi terhadap perekonomian Jawa Timur, khususnya aktivitas belanja terutama dalam bidang pariwisata dan jasa. Karena itu merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi Malang Raya. Landasan utama pemulihan ekonomi, yakni berhasilnya pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan bisa menjadi *game changer* yang bisa memulihkan perekonomian. Target kebijakan berikutnya adalah pengembangan terobosan sektor baru ekonomi. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Wali Kota Malang:

“Kebijakan pemulihan ekonomi 2021 terdiri dari tiga hal yaitu intervensi kesehatan berupa vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat, *survival and recovery kit* dalam rangka menjaga kesinambungan bisnis dan program perlindungan sosial, serta reformasi struktural berupa Undang-Undang Cipta Kerja”

Sektor-sektor baru ini sangat potensial dikembangkan di Kota Malang, seperti

UMKM. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Malang mendorong UMKM untuk memanfaatkan *marketplace* dan digitalisasi agar peluang pasarnya semakin luas.

Pemulihan ekonomi di Kota Malang tahun 2021 menjadi salah satu prioritas yang bakal dilakukan. Sederet program bahkan telah disiapkan oleh Tim Percepatan

Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Malang guna memperkuat potensi perekonomian berkonsep digitalisasi. Target kebijakan ini adalah pembukaan

rekening tabungan atau pembiayaan yang lebih mudah, cepat dengan berbiaya

rendah melalui digitalisasi produk/layanan keuangan. Target kebijakan yang

lainnya yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Malang di antaranya, optimalisasi

produk dan layanan keuangan, yang meliputi kredit usaha rakyat (KUR), simpanan

pelajar, laku pandai, AUTP, AUTS dan Asnel, bank wakaf mikro (BWM). Hal itu

sesuai dengan target kebijakan dari pemulihan ekonomi yang disampaikan oleh Pak

Wali Kota:

“Target dari kebijakan ekonomi tersebut dapat memberikan pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal melalui peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, pengembangan dan revitalisasi pasar daerah dan desa, pembangunan kawasan industri UMKM yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja, serta pengembangan destinasi pariwisata potensial”

Kemudian, juga bakal dilakukan penguatan infrastruktur akses keuangan yang meliputi, pembentukan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membentuk unit usaha lembaga keuangan mikro (LKM) dan pengembangan desa binaan.

Menurut pendapat dari Henry, Brian dan White dalam Samodra W., 1994:65 Target kebijakan harus disesuaikan dengan sebaik mungkin. Target

kebijakan harus disesuaikan dengan ukura-ukuran yang jelas dalam setiap tahapannya. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sasaran-sasaran atau target yang ingin dicapai pada satu kurun waktu tertentu dengan takaran yang sesuai. Target kebijakan berkerkenaan dengan dua hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau keselesarasan, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Pemerintah Kota Malang sangat menyesuaikan dengan kajian teoritis tentang Henry, Brian dan White tersebut dalam melihat target kebijakan yang harus memperhatikan dau hal tersebut.

#### **IV.2.3 Perubahan Perilaku Masyarakat**

Perubahan perilaku masyarakat adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kebijakan. Karena perubahan perilaku masyarakat merupakan salah satu penilaian efektivitas kebijakan bagi Pemerintah Daerah. Perubahan perilaku yang positif merupakan harapan oleh pemerintah Kota Malang untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Malang telah memaksimalkan peran kampung tangguh yang sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat secara optimal. Gerakkan dari unit terkecil mulai RT, RW, dan kampung mampu memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Secara perlahan masyarakat sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang sulit melalui kampung tangguh.

Upaya penguatan UMKM yakni melalui pendampingan perbaikan kualitas produk, permodalan, mencari pasar, dan sertifikasi halal membuat perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Perilaku masyarakat semakin percaya diri dalam memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Malang.

Sebelumnya masih banyak masyarakat yang belum paham terkait pemasaran dengan digital. Namun setelah Pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi ini yang dilakukan secara masif akhirnya masyarakat bisa memahami dan mendapatkan pengetahuan baru tentang digitalisasi pemasaran produk UMKM/IKM yang terfasilitasi lewat website [Malanggleerrr.com](http://Malanggleerrr.com).

Masyarakat Kota Malang bisa memahami dalam pengelolaan website. Marketplace untuk produk warga Kota Malang lokal ini membantu UMKM/IKM dalam pemasaran produk sehingga perekonomian tetap berjalan meskipun tidak secara langsung berubah, masih pada tahap proses adaptasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat usahanya tetap jalan. Bahkan diminati untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat.

Namun, disisi lain ada Pemerintah Kota Malang juga tegas memberikan Kebijakan tentang penerapan Prokes (Protokol Kesehatan) di Kota Malang. Namun masih saja terdapat perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan dengan tujuan dari pemerintah, masih banyak ratusan warga yang melanggar protokol kesehatan karena terbukti tidak memakai masker dalam operasi yustisi dalam beberapa pekan terakhir. Ratusan melanggar tersebut, dikenakan sanksi berupa denda uang dan sanksi sosial menyapu jalan di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melibatkan

unsur TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan relawan. Sedangkan untuk penindakan sidang ditempat dilakukan oleh Satol PP. Pemerintah Kota Malang memberlakukan sanksi denda sebesar Rp100 ribu terhadap warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Sejak penegakan hukum tersebut perlu dilakukan masyarakat secara signifikan sudah menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab terus melakukan sudah taan menerapkan protokol kesehatan, karena taku akan dilakukan penghentian sementara izin operasional, termasuk pencabutan izin usaha.



Gambar 4. 5 lustrasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Malang

Sumber: [malangkota.go.id](http://malangkota.go.id) (2020)

Sekitar 80 IKM yang bergerak di bidang makanan minuman, hingga seni

kriya mendapatkan pelatihan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Para pelaku IKM memiliki perubahan perilaku untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. Karena dengan adanya inovasi dan munculnya ide kreatif tersebut, produk-produk buatan IKM Kota Malang memiliki potensi yang besar, termasuk untuk dipasarkan dalam sektor *e-commerce* atau perdagangan secara elektronik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Bapak Wali Kota Malang:

“Ini penting, karena pergerakan ekonomi sangat linier dengan mobilitas orang, sehingga kemampuan pengendalian Covid-19 dalam aktivitas sosial akan mempercepat pemulihan ekonomi yang ada. Masa adaptif akan jadi ujian apakah masyarakat Kota Malang siap untuk kembali menggerakkan perekonomian seiring dengan disiplin menjalankan protokol Covid-19”

Bisa juga membuka akses pasar utingkat kestuk produk buatan IKM yang selama ini hanya dipasarkan melalui perseorangan. Serta bisa memperluas jaringan relasi yang dimiliki guna membantu pengembangan usaha para IKM.

Para ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Malang memiliki perubahan perilaku yang cukup signifikan, karena dengan himbuan yang dilakukan oleh Wali Kota Malang untuk belanja di pasar-pasar rakyat, gerakan tersebut terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Malang. Padahal sebelumnya para ASN memiliki kebebasan untuk membeli di tempat lain. Hal ini yang akan membentuk perilaku pemulihan ekonomi yang lebih tepat dan dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi di masyarakat Kota Malang.

Para investor yang menanamkan investasinya di Kota Malang juga terdampak baik. Karena Pemerintah Kota Malang melakukan pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi para investor yang akan menanamkan investasinya

di Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, pengangguran menjadi bertambah. Diantisipasi sedini mungkin agar krisis ekonomi ini tidak menjadi krisis lainnya. Harapannya pelaku usaha tidak segan menanamkan investasinya di Kota Malang. jika investasi jalan, ekonomi di Kota Malang akan terus bergerak. Langkah ini sebagai langkah *'extraordinary'* mengingat pentingnya untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang juga berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan vaksinasi. antusias masyarakat untuk mengikuti serbuan vaksinasi yang dilaksanakan. Tingginya antusias warga untuk mengikuti vaksinasi menyebabkan banyak masyarakat yang terlambat mendaftar tetapi langsung datang ke lokasi Serbuan Vaksinasi. Hal ini kebijakan pemulihan ekonomi dengan dimulai dengan vaksinasi tersebut dapat mendukung dengan secara signifikan. Terutama jika masyarakat sudah melakukan vaksinasi akan semakin meningkatkan mobilitas ekonomi di Kota Malang.

Menurut Sabda Ali Mifka dan Makmur ( 2011:6), kebijakan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya efektivitas sebagai ketepatan harapan, efektivitas dan hasil yang dicapai. Kebijakan pemulihan Kota Malang memilii harapan agar masyarakat memiliki perubahan perilaku yang positif merupakan harapan oleh pemerintah Kota Malang untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sehingga kegiatan dikatakan tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan,

efektivitas dengan hasil yang dicapai. Menurut Nugroho (2008:646), efektivitas kebijakan berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh Ricahard Matland (1995) yang disebut dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yang merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan keefektifan suatu efektivitas kebijakan.

#### IV.2.4 Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat adalah hal penting untuk diketahui untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Pemerintah Kota Malang telah membuat kebijakan yang mengatur masyarakatnya untuk melakukan Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat. Penanganan kasus COVID-19 di Kota Malang sejauh ini sudah cukup bagus, namun seiring dengan penambahan kasus akhir-akhir ini, maka perlu dilakukan evaluasi agar penanganan kasus COVID-19 bisa diminimalisir penyebarannya. Tingkat kesadaran masyarakat di Kota Malang dalam penerapan prokes masih kurang meski tidak semuanya. Meski masyarakat sudah memakai masker, tetapi untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan masih terjadi, terutama di kawasan pasar dan alun-alun Kota Batu yang selalu ramai dipadati pengunjung. Hal ini berbeda jauh ketika di tempat wisata yang dinilai sudah cukup bagus dalam pelaksanaan prokes, karena ada petugas yang selalu mengecek tiap pengunjung yang masuk. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari sekretaris Satpol PP Kota Malang dalam acara operasi yustisi (2020):

“Ini penting, karena pergerakan ekonomi sangat linier dengan mobilitas orang, sehingga kemampuan pengendalian Covid-19 dalam aktivitas sosial akan mempercepat pemulihan ekonomi yang ada. Masa

adaptif akan jadi ujian apakah masyarakat Kota Malang siap untuk kembali menggerakkan perekonomian seiring dengan disiplin menjalankan protokol Covid-19”

Pada bulan September 2020 Satgas COVID-19 mencatat penurunan kasus positif

COVID-19 baru dalam beberapa waktu terakhir. Sementara angka kesembuhan

pasien COVID-19 meningkat. Meski begitu, jumlah angka kematian pasien

COVID-19 masih terus bertambah. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan,

penurunan tambahan kasus positif itu disebabkan kesadaran masyarakat

menerapkan protokol kesehatan. Sutiaji mengatakan, salah satu penyebab

meningkatnya kesadaran masyarakat adalah operasi yustisi. Hal itu dipertegas oleh

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Leonardus Simarmata. Menurut Leonardus,

pelaksanaan operasi yustisi tersebut dilakukan secara rutin yang digelar secara

mobile (Keliling) bersama satuan gugus tugas (Satgas) COVID-19 Kota Malang.

selain melakukan operasi yustisi juga menggalakkan program Kampung Tangguh

yang telah terbentuk di seluruh di wilayah Kota Malang, agar dapat mengantisipasi

kenaikan jumlah pasien COVID-19 seperti operasi yustisi. Dengan begitu, adanya

kebijakan operasi yustisi dan kampung tangguh tersebut, dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan protokol kesehatan. Karena

itu masyarakat harus terus menerus menjalankan protokol kesehatan, dan saling

mengingatkan. Pemakaian masker harus benar sehingga berfungsi secara efektif.



Gambar 4. 6 Operasi Yustisi di Kota Malang

Sumber: [malangkota.go.id](http://malangkota.go.id) (2021)

Pemerintah Kota Malang juga mencanangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam bulan Februari lalu. Kebijakan tersebut dimulai pada 9 Februari 2021. Kebijakan Mendagri No. 3/2021 terkait PPKM Mikro ini akan berlangsung mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021 mendatang. Sifat pembatasan aktivitasnya lebih skala kecil, yakni di tingkat kelurahan atau desa. Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widiyanto, saat dikonfirmasi pihaknya juga sudah menerima surat tembusan dari Mendagri terkait PPKM Mikro. Sebelumnya, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengklaim pemberlakuan PPKM selama 28 hari di Kota Malang mampu menurunkan angka penularan (rate of transmission) COVID-19. Diungkapkan pria kelahiran Lamongan itu, tingkat RoT sebelumnya yakni 1,2 persen, kini menurun jadi nol sepersekian persen. Penurunan juga terjadi di segi angka kematian. Dari sebelumnya 9,2 persen kini

jadi 8,7 persen.

Lalu, dari sisi angka kesembuhan pasien di Kota Malang juga mengalami peningkatan dari 84,4 persen kini jadi 87 persen. Melihat hasil itu, artinya ada tren positif yang bisa dituai. Sutiaji berharap pelaku usaha bisa menjadi perpanjangan tangan edukasi tersebut. Bagaimanapun, proses menjadi satu-satunya senjata ampuh dalam upaya penanganan wabah sembari memulihkan ekonomi. Selain itu, amanah juga diembankan pada pejabat di tingkat Lurah, RT dan RW untuk menjaga kesadaran masyarakat menerapkan disiplin 5 M. Operasi penegakan disiplin juga sebaiknya ditingkatkan di lingkup kecil. Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi, justru berharap tidak ada lagi PPKM jilid berikutnya. Selama PPKM jilid 1 dan 2, tingkat kepatuhan masyarakat akan proses sudah mulai tumbuh. Bahkan dia mengaku bahwa personel Satpol PP mulai kelelahan dalam melakukan pengawasan setiap harinya selama masa PPKM.

Pelaksanaan PPKM mikro sebenarnya bersamaan dengan aturan PPKM tingkat kota/kabupaten. Dalam Instruksi Mendagri dijelaskan bahwa kegiatan perkantoran dibatasi masing-masing 50 persen di rumah dan di kantor. Kegiatan belajar-mengajar masih tetap menerapkan sistem daring. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, teknologi, perbankan dan sebagainya tetap beroperasi 100 persen. Namun diharapkan mengatur jam operasional dan menerapkan protokol kesehatan, restoran diperkenankan melayani makan dan minum di tempat sebanyak 50 persen. Layanan pesan-antar tetap diperkenankan dengan menyesuaikan jam operasional. Tak lupa menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Instruksi Mendagri RI juga membatasi

aktivitas di mal/pusat perbelanjaan sampai pukul 21.00 WIB. Kemudian mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan aktivitasnya dengan pembatasan kapasitas 50 persen. Kegiatan di fasilitas umum dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan untuk sementara dihentikan. Lalu juga diharapkan terdapat pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) sebagai dasar pemutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 merupakan suatu langkah yang tepat di terapkan didalam masyarakat. PPKM ini memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Malang. Namun, penerapan PPKM agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal perlu adanya kesinambungan dan kebersamaan serta adanya tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri didalam menerapkan PPKM dan Protokol Kesehatan (Prokes) sebagai pemutus mata rantai penyebaran Covid-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ini, perlu adanya kesinambungan dan kebersamaan antar stekholder dan elemen masyarakat yang ada. Tanpa adanya itu, tentunya pelaksanaan PPKM sebagai pemutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak akan berjalan dengan baik. ” Selain dari itu, untuk mendukung pelaksanaan PPKM, masyarakat juga harus dapat menerapkan protokol kesehatan, baik itu 3M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ataupun 5M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas). Untuk dapat menumbuhkan kembali perekonomian kita dan penerapan PPKM

dapat berjalan dengan baik, perlu adanya kesinambungan dan kebersamaan serta adanya tingkat kesadaran yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat didalam menerapkan PPKM dan Prokes sebagai pemutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Pemerintah Kota Malang sangat mengharapkan tingkat kesadaran masyarakat agar kebijakan pemulihan ekonomi juga sesuai dengan target yang ingin dicapai. Tingkat kesadaran dalam masyarakat memang berbeda-beda hal itu karena memiliki pengetahuan dan keadaan yang berbeda-beda. Menurut Henry, Brian dan White (dalam Samodra W., 1994:65) tingkat kesadaran merupakan susunan yang berlapis-lapis mengenai kadar pengetahuan dan keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat secara individu atau kelompok yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Tingkat kesadaran masyarakat akan sejalan dengan efektivitas kebijakan yang ada. Karena kebijakan apapun yang dibuat adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berperilaku dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang baik pula. Tingkat kesadaran masyarakat adalah pengetahuan dan keadaan mengerti tentang hal yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat secara individu atau kelompok yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Tingkat kesadaran masyarakat akan sejalan dengan efektivitas kebijakan yang ada apabila perilaku baik untuk mencapai tujuan atau target yang dibuat.

#### **IV.2.5 Dampak Kebijakan**

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian

Kota Malang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun mengalami penurunan 20,78 persen, akibat roda perekonomian yang tersendat hingga sekarang di pertengahan tahun 2020. Seluruh sektor kehidupan ekonomi nyaris merasakan dampak sejak awal pandemi, bahkan beberapa bisnis harus berhenti beroperasi. Sektor jasa seperti hotel dan restoran yang menjadi andalan sumber PAD Kota Malang merasakan dampak itu sejak awal Maret 2020. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur mencatat 180 Hotel di Jawa Timur di antaranya 15 Hotel di Kota Malang memilih berhenti beroperasi sejak April. Tetapi dampak itu sudah dirasakan Maret dengan sejumlah hotel merumahkan karyawannya. Awalnya opsi menekan biaya operasional dengan menggunakan sebagian kamar atau merumahkan sebagian karyawan saja. Namun karena terus merosot dan alasan biaya operasional yang sangat tinggi akhirnya memilih tutup. Wali kota Malang Sutiaji mengatakan, dalam situasi sekarang harus meletakkan perspektif optimis, khususnya memasuki masa-masa adaptasi bersama Covid-19. Semua sektor harus didorong menyiapkan diri memasuki masa New Normal. Awal pandemi masuk Kota Malang diasumsikan penurunan PAD hingga 50%. Sehingga raihan saat ini harus menjadi modal dan semangat guna menyiapkan perekonomian selanjutnya. Sutiaji menekankan kepada perangkat daerah, agar mulai menggerakkan program kegiatan yang melibatkan partisipasi publik. Sehingga diharapkan roda perekonomian segera berjalan, dengan tentunya berpedoman pada prinsip protokol Covid-19.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Ade Herawanto menyampaikan sejumlah kebijakan disiapkan dalam menghadapi masa adaptasi dan

new normal. Tetapi tentunya tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan.

Wajib pajak (WP) tidak serta merta bebas dari kewajibannya, tetapi sesuai aturan tidak harus membayar seluruh dari ketentuan pembayaran pajaknya. Wajib Pajak Perhotelan dan Restoran cukup dikenai maksimal 50 persen, melalui pengajuan kepada Dipenda. Pengusaha Hotel melalui asosiasinya masing-masing dapat mendaftarkan pengajuan keringanan pajak, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bapenda Kota Malang.

Selama masa *recovery* perekonomian, pengusaha hotel yang tidak beroperasi dipastikan bebas pajak. Karena memang kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dan tamu hotel juga tidak langsung berdatangan seperti sebelum masa Covid-19. Bapenda juga melakukan pembinaan terhadap pelaku WP sebagai rangsangan agar dunia usaha segera pulih kembali. Selama masa adaptif wajib pajak mendapat relaksasi, sehingga selama masa pembinaan tidak dilakukan penindakan, pemeriksaan maupun law enforcement (penegakan hukum).

Dipenda juga mengeluarkan kebijakan lewat program Sunset Policy V yang memberi pembebasan denda selama masa pandemi Covid-19. Pembebasan denda berlaku bagi pajak parkir, hiburan, reklame, bea perolehan hak tanah dan bangunan, hotel dan restoran, air tanah dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Program ini dirancang 3 atau 4 tahun lalu dan ternyata efektif untuk masa pandemi Covid-19.

WP yang mempunyai tunggakan sebelumnya cukup membayar pokok saja. Sementara denda sebesar 2 persen per bulan tidak perlu dibayarkan. Kota Malang saat ini sedang memasuki masa adaptasi minggu kedua, guna memasuki masa New Normal. Masyarakat disiapkan untuk beraktivitas dengan kenormalan baru guna

menggerakkan roda perekonomian. Butuh peran semua pihak agar segalanya kembali pulih, pulih ekonomi dan pulih dari Covid-19.

Pemerintah Kota Malang sendiri menargetkan adanya 17 layanan di pemerintahan yang akan diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perubahan status kelembagaan itu dimaksudkan untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dengan lebih cepat dan mudah terhadap permasalahan

apapun yang ada di masyarakat kota Malang. Beberapa lembaga yang diubah

seperti RSUD Kota Malang sebagai rumah sakit utama rujukan akan kasus COVID-

19, sisanya adalah 16 puskesmas yang dijadikan layanan khusus dalam penanganan

awal penyebaran virus corona di Kota Malang. Dimana 6 puskesmasnya sudah

menyediakan layanan rawat inap yang terakreditasi. Tentunya atas pemberlakuan

tersebut, bisa menjadi sarana dalam mengurangi permasalahan yang terjadi di

masyarakat akibat dampak sosial budaya karena COVID-19 secara lebih tepat dan

cepat. Selain itu, ada beberapa poin strategis yang penulis temukan dari hasil

penelitian berdasarkan beberapa masalah yang ada sebagai upaya penanganan

dampak COVID-19 sebagaimana berikut ini: (1) mengurasi mobilitas masyarakat

yang diartikan sebagai gerak sosial atau perpindahan masyarakat dari suatu tempat

ke tempat lain. Hal itu sesuai dengan pendapat Bapak Wali Kota Malang:

“Ini penting, karena pergerakan ekonomi sangat linier dengan mobilitas orang, sehingga kemampuan pengendalian Covid-19 dalam aktivitas sosial akan mempercepat pemulihan ekonomi yang ada. Masa adaptif akan jadi ujian apakah masyarakat Kota Malang siap untuk kembali menggerakkan perekonomian seiring dengan disiplin menjalankan protokol Covid-19”

Kebanyakan proses penyebaran virus COVID-19 terjadi akibat adanya kontak

langsung antar pasien positif dengan masyarakat sehat. Pemerintah sendiri, sudah

melakukan upaya pengurangan mobilitas masyarakat dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun hal tersebut pun memicu masalah-masalah baru. Maka dari itu perlu dilakukannya PSBB tertarget.

Maksudnya, pembatasan sosial ini hanya ditujukan pada sektor-sektor terbesar pemacu penyebaran saja. (2) mengadakan perlindungan UKM karena sejak adanya pengurangan mobilitas masyarakat, pihak-pihak yang memiliki usaha kecil menengah mengalami penurunan pendapatan. Baik berupa dukungan transisi dari media pemasaran offline ke online, bantuan dana dan sarana prasana yang tersebar secara tepat sasaran. (3) mengadakan program pasar tradisional yang sehat agar tetap memberikan kebutuhan masyarakat akan pangan dan kebutuhan sehari-hari juga membuat para pedagang di pasar tradisional tetap mendapatkan penghasilan.

(4) diberlakukannya program bantuan sosial atau dana bantuan bagi masyarakat, namun masih banyak yang tidak menerimanya sehingga perlu pengolahan data penerima agar bantuan bisa tepat sasaran. (5) menyediakan sarana prasarana yang memadai bagi para anak-anak atau pihak terkait pendidikan untuk memaksimalkan kondisi pendidikan di era pandemi (6) melakukan sosialisasi dengan lebih tertarget dan mengena kepada masyarakat agar terhindar dari disinformasi yang bisa memperburuk keadaan dan hubungan sosial antara masyarakat juga pemerintah.

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dampak kebijakan juga bisa berbentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Dampak kebijakan bisa meliputi berbagai bidang seperti sosia, budaya, kesehatan dan lain-lain. Efektivitas dalam

kebijakan merupakan konsep yang bersifat terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi di dalam suatu pemerintahan. Efektivitas menunjukkan banyaknya input atau sumber daya yang diperlukan oleh pemerintah untuk menghasilkan suatu satuan output, karenanya efektivitas dapat diukur sebagai rasio input terhadap output (Lubis & Huseini, 1987). Pemerintah Kota Malang sebagai pengambil kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sangat memperhatikan input dan output teori efektivitas kebijakan terutama dalam menilai output yang ingin dihasilkan dari kebijakan pemulihan ekonomi di Kota Malang.

#### IV.3 Pembahasan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Selain itu juga ada Instruksi Presiden (INPRES) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan struktural lainnya.

Pada saat ini, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi, kurva kasus COVID-19 masih terus meningkat. Hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Diterapkannya kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Malang adalah dalam rangka

melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya korban. Seperti yang diketahui, bahwa kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di

Kota Malang juga diselenggarakan oleh pemerintahan lainnya. Pemerintah Kota Malang dan pihak swasta harus tunduk pada kebijakan struktural yang ditetapkan.

Setiap pemerintah yang tidak mematuhi penyelenggaraan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pasti akan dijerat dengan sanksi.

Padahal salah satu implikasi hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah terkait kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 tersebut

adalah terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang mana

Pemerintah Daerah harus membutuhkan persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk

melakukan langkah kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-

19. Jika ditinjau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat yang

menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi

bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia hal tersebut kurang sesuai.

Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka perlu dilihat efektivitas kebijakan tentang

pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Malang yaitu dengan hasil

berikut:

#### **IV.3.1 Tujuan kebijakan**

Sudah lebih dari setahun lebih sejak Maret hingga Juni 2021, pemerintah

Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19.

Termasuk di Kota Malang yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan berbagai upaya

dan kebijakan menangani pandemi COVID-19 dengan titik berat pada sektor

kesehatan. Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sejak Maret 2020. Selain itu, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes COVID-19, menjalankan tes COVID-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru.

Pemerintah Kota Malang terus melakukan upaya menghentikan laju kenaikan kasus pada tahun 2020 dengan memperluas cakupan strategi, yakni memasukkan penanganan dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengkampanyekan perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Hal itu juga perintah sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan perluasan strategi kebijakan tersebut, upaya mengatasi COVID-19 di bidang kesehatan tetap terus dijalankan.

Upaya ini sejalan dengan dua tujuan umum penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO, yakni menurunkan penyebaran COVID-19 dan mengurangi kematian karena COVID-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Pemerintah Kota Malang serius mengatasi wabah melalui penanganan cepat dan tepat menerapkan kebijakan, inovasi, sinergitas, dan partisipasi masyarakat. Praktik terbaik (*best practice*) penanganan covid-19 kini sejalan dengan vaksinasi membuat Kota Malang menjadi panutan bagi daerah-daerah lain. Selama ini Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko bersama stakeholder menerapkan konsep pentahelix dan inovasi. Berbagai kebijakan membuat perekonomian tumbuh, menekan penularan covid-19, serta meningkatkan kesembuhan. Harus diakui awal pandemi covid-19 telah mengakibatkan kontraksi di semua sektor. Namun, Sutiaji bergerak cepat mengeluarkan kebijakan krusial refocusing anggaran Rp86 miliar pada awal pandemi. Anggaran itu untuk dana cadangan, bantuan sosial, penyediaan alat, dan sarana prasarana. Kebijakan pembatasan sosial pun menyusul aturan protokol kesehatan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman

*Corona Virus Disease 2019*. Selama masa pandemi, inovasi bermunculan.

Pemkot Malang meluncurkan Malpro (Malang Beli Produk Lokal), Malber

(Malang Berbagi), Malherb (Malang Herbal), Maldis (Malang Digital Service)

dan Malba (Malang Bahagia). Inovasi terbaru akan meresmikan mal pelayanan

publik pada Agustus 2021 nanti. Mal pelayanan publik itu terkoneksi dengan

perguruan tinggi negeri dan swasta termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta

Indonesia (APTISI) sebagai solusi pelayanan publik masa pandemi. Nantinya,

perguruan tinggi bisa membuka pusat pelayanan di mal sehingga lebih

memudahkan para mahasiswa dan alumni. Sedangkan Dinas Komunikasi dan

Informatika melibatkan influencer dan komunitas kreatif digital dalam kampanye

disiplin menggunakan masker. Sutiaji pun rajin turun langsung ke kampung-

kampung untuk mengedukasi masyarakat. Wali Kota Malang itu bahkan masuk

pasar, sekolah, masjid dan musala untuk berkampanye penggunaan masker.

Bahkan, menindak tegas kafe/restoran yang melanggar aturan protokol

kesehatan. Di sektor pendidikan, Pemkot Malang memasang wifi di kelurahan

untuk membantu siswa sejak awal pandemi. Juga menggulirkan program Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Bantuan

BPPDGS disalurkan sebesar Rp2,42 miliar kepada 3.703 santri, siswa, warga

belajar ustaz maupun guru swasta di 218 lembaga penyelenggara pendidikan.

Stok pangan dan stabilisasi harga dipastikan aman. Operasi gabungan melibatkan

Polri dan TNI berlanjut untuk mengedukasi warga. Aturan protokol kesehatan

diterapkan mulai perkantoran, sektor usaha sampai 26 pasar tradisional. Petugas

di 16 puskesmas saban hari melakukan pelacakan, dan 30 rumah sakit menangani pasien covid-19. Pemkot Malang juga menyediakan rumah karantina.

Berdasarkan hal tersebut sudah memili tujuan kebijakan yang baik dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Malang. Menurut Budiman (2013). Efektivitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masalah dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan konsep kebijakan publik yang kontemporer menekankan perlunya *action* dari pemerintah, walaupun pada awal perkembangannya kebijakan publik dapat berarti *to do or not to do*, yang menggambarkan diamnya pemerintah merupakan kebijakan. Akan tetapi dalam praktek, penyelenggaraan pemerintahan, *not to do* seringkali menimbulkan kegaman masyarakat dalam menilai sikap pemerintah terhadap suatu masalah yang sedang berkembang.

#### IV.3.2 Target kebijakan

Sejak epidemi ini yang diawali Wabah Novel Penumonia Coronavirus di Wuhan, Provinsi Hubei, COVID-19 menyebar kasus-kasus ini (secara resmi dinamakan COVID-19) telah dilaporkan juga menyebar di luar Wuhan. Virus baru ini tampaknya sangat menular dan telah menyebar dengan cepat secara global. Dalam sebuah pertemuan pada 30 Januari 2020, sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR, 2005), wabah tersebut dinyatakan oleh WHO sebagai

Kesehatan Masyarakat Darurat dari Kepedulian Internasional (PHEIC) karena telah menyebar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. COVID-19 telah menjadi patogen utama dari wabah penyakit pernapasan yang muncul. Mereka adalah keluarga besar virus RNA untai tunggal (+ ssRNA) yang dapat diisolasi pada spesies hewan yang berbeda. [1] Untuk alasan yang belum dijelaskan, virus ini dapat melintasi batas spesies dan dapat menyebabkan, pada manusia, penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS.

Sudah lebih dari setahun lebih sejak Maret hingga Juni 2021, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19.

Termasuk di Kota Malang yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi COVID-19 dengan titik berat pada sektor

kesehatan. Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19 sejak Maret 2020. Selain itu, Pemerintah Kota Malang

mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak

secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai

wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes COVID-19,

menjalankan tes COVID-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal

baru. Pemerintah Kota Malang terus melakukan upaya menghentikan laju kenaikan

kasus pada tahun 2020 dengan memperluas cakupan strategi, yakni memasukkan

penanganan dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Di bidang kesehatan,

pemerintah terus mengampanyekan perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga

jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Upaya ini sejalan dengan dua tujuan umum penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO, yakni menurunkan penyebaran COVID-19 dan mengurangi kematian karena COVID-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.

#### **IV.3.3 Perubahan Perilaku Masyarakat**

Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat pesat. Bahkan, meskipun beberapa waktu kasus COVID-19 ini sempat memudar, tetap saja penambahan kasus tetap terjadi. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak membawa dampak atau pengaruh. Dampak-dampak ini pun berputar di beberapa sektor kehidupan masyarakat. Baik di sektor ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Untuk sektor sosial budaya ditandai dengan adanya perubahan sosial budaya bagi masyarakat khususnya di Kota Malang. Baik itu terhadap perilaku sosial masyarakat Kota Malang, misalnya saja yang selalu bersama-sama dalam menjalankan sebuah kegiatan, nilai budaya masyarakat yang mulai luntur karena kurangnya interaksi dan sosialisasi masyarakat akibat pemberlakuan social/physical distancing, hingga kondisi sosial masyarakat yang hampir terpuruk akibat dampak PHK, kurangnya akses turis atau wisatawan di Kota Malang yang terjadi karena pembatasan sosial,

hingga penurunan pendapatan masyarakat. Dampak sosial budaya yang dihadapi oleh masyarakat kota Malang pun tidak terlepas dari dampak ekonomi yang kemudian muncul dan bahkan menjadi salah satu fokus perhatian paling penting.

Pada kenyataannya, semenjak pandemi yang terjadi di wilayah Internasional, perekonomian setiap negara yang terdampak mengalami kemerosotan. Begitu halnya di kawasan Kota Malang, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan. Baik karena dilakukan PHK oleh perusahaan, atau karena tidak mendapatkan pemasukan bagi para pelaku usaha atau UKM. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berpengaruh pada masalah sosial di Indonesia, namun juga merambah pada masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh pemberlakuan kebijakan tersebut. Dari segi sosialnya, tentu sudah jelas bahwa setiap masyarakat dan antar pihak lain jadi dibatasi proses sosialisasinya, baik antar sesama keluarga, sesama teman, dan masyarakat lainnya. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan rutin dan tatap muka, mendadak jadi ditiadakan, segala macam acara yang sebelumnya sudah direncanakan, mendadak harus batal. Belum lagi pihak perusahaan yang sudah mempersiapkan barang untuk produksi, mendadak harus tutup dan pegawainya dipekerjakan dari rumah. Selain beberapa dampak tersebut, kehadiran COVID-19 pun berpengaruh pada rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang akhirnya berdampak pada kondisi pasar yang kurang stabil (Dito, 2020). Selain itu, Dito (2020) juga menyebutkan bahwa yang paling berdampak besar akibat adanya COVID-19 yakni sektor ekonomi dan perdagangan. Dimana pemberlakuan PSBB menyebabkan ekonomi negara dan daerah jadi melemah. Bahkan sektor ekspor Indonesia ikut

mengalami pelemahan. Begitu juga para investor yang terlihat enggan untuk melakukan investasi sebab berada di fase ekonomi sulit. Adapun prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia 2020 yang berpotensi lebih rendah apabila wabah Covid-19 makin menyebar sehingga memicu penerapan kebijakan restriksi atau social distancing yang lebih ketat oleh berbagai negara, dan tekanan pasar keuangan global berlanjut akibat ketidakpastian yang tinggi (Michael, 2020).

Selain menunjukkan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 maupun pasien meninggal di Kota Malang, penelitian ini pun memberikan hasil berupa pengaruh-pengaruh yang lebih menjurus ke arah negatif akibat penyebaran virus corona yang tinggi serta setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hasil ini didapatkan setelah melakukan proses wawancara secara digital terhadap beberapa sampel yang dijadikan objek penelitian, juga beberapa karya tulis penunjang.

#### **IV.3.4 Tingkat kesadaran masyarakat**

Penerapan kebijakan COVID-19 di Kota Malang merupakan cara yang perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran kasus infeksi Corona virus. Hal tersebut perlu dilakukan karena belum ditemukannya antiviral spesifik yang dapat digunakan sebagai vaksin (Yuliana, 2020). Melihat hal itu, tentu masyarakat perlu untuk tahu dan menerapkan beberapa protokol kesehatan selama masa pandemi Corona virus. Berdasarkan hasil kuesioner dengan jumlah 130 peserta, sebanyak 95,4% peserta beranggapan bahwa protokol kesehatan perlu diterapkan selama masa pandemi Corona virus. Selain itu, sebanyak 87.7% peserta telah mengetahui

beberapa jenis protokol kesehatan yang perlu dilakukan dan telah diterapkan oleh pemerintah. Salah satu dari beberapa protokol kesehatan selama masa pandemi

Corona virus adalah penggunaan masker saat bepergian. Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kesadaran masyarakat dari kebijakan COVID-19 di Kota Malang beberapa telah menerapkan protokol penggunaan masker dengan baik dan benar.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena dengan menggunakan masker penyebaran kasus infeksi Corona virus dapat dikendalikan (Cheng et al., 2020).

Selain itu sebagian masyarakat telah faham mengenai kegiatan mencuci atau mengganti masker setelah digunakan untuk bepergian. Kegiatan tersebut penting

dilakukan karena penggunaan masker dalam waktu lama tidak dianjurkan dan dapat mengakibatkan munculnya penyakit lain (Szarpak et al., 2020). Meski ada

masyarakat yang masih jarang mengganti atau mencuci masker mereka setelah digunakan untuk bepergian. Bentuk lain dari protokol kesehatan adalah menjaga

kebersihan tangan dengan benar dan baik. Berdasarkan hasil analisis Pemerintah Kota Malang Tingkat kepatuhan terhadap protokol Covid-19 di Kota Malang masih

dilevel 55 persen hingga 60 persen, sehingga perlu untuk selalu mengingatkan diri dan orang-orang sekitar untuk patuh dan taat terhadap protokol itu. banyak yang

sudah mempunyai masker tapi kesadaran untuk memakai kadang rendah. Karena itulah perlu diviralkan terkait kewajiban memakai masker di era pandemi ini.

ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan akan berdampak pada angka yang terus bertambah serta penyebaran yang akan semakin tidak terkontrol.

Padahal menjaga kebersihan tangan selama masa pandemi Corona virus dapat mengurangi proses penyebaran (Chen et al., 2020). Kurangnya kesadaran

dalam menjaga kebersihan tangan dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Padahal mencuci tangan dapat mengurangi resiko penyebaran virus sebanyak 55% (Chen et al., 2020). Selain itu, mencuci tangan adalah kegiatan yang mudah dilakukan dan efektif dalam mengurangi resiko infeksi (Jamie, 2020). Kemudian tidak membawa hand sanitizer sebagai bentuk self protection ketika berada di luar rumah. Padahal hand sanitizer yang mengandung etanol memiliki aktivitas virucidal (Kampf, 2018). Sehingga dengan menggunakan hand sanitizer, proses infeksi mikroba (virus) pada manusia dapat dicegah (Dewi et al., 2016).

Selanjutnya adalah penerapan protokol kesehatan untuk social distancing atau *physical distancing*. Pada protokol kesehatan tersebut, sebagian besar masyarakat menganggap hal itu perlu untuk dilakukan. Perlunya social distancing atau *physical distancing* dengan menjaga jarak minimal sejauh 1 meter. Selain itu, masyarakat tidak bepergian dan berkumpul dengan orang lain selama masa pandemi Corona virus. Kegiatan tersebut tentu sangat perlu dilakukan karena melalui social distancing proses interaksi antar masyarakat dapat di minimalisir, sehingga penyebaran virus Corona dari orang satu ke orang yang lain dapat dihindari (Suppawittaya et al., 2020).

Protokol kesehatan lain yang perlu diterapkan adalah menjaga etika saat batuk dan bersin. Berdasarkan hasil analisis tersebut beranggapan bahwa menutup mulut saat batuk dan bersin penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan penyebaran Corona virus dapat melalui inhasi kontak langsung dan melalui tetesan droplet (Singhal, 2020). Selain itu, saat ini telah muncul beberapa kasus pasien terinfeksi Corona virus tanpa menunjukkan gejala (Gao et al., 2020). Sehingga

penerapan etika batuk dan bersin dapat melindungi masyarakat dari pasien terinfeksi tanpa gejala yang mungkin tidak melakukan isolasi (Nishiura et al., 2020).

#### **IV.3.5 Dampak kebijakan**

Adapun beberapa dampak kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang ditemukan pada penelitian ini yang terjadi pada masyarakat Kota

Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan khusus pada anak-anak di kawasan Kota Malang, maka dampak yang paling besar adalah terhadap ekonomi.

Selain pada anak-anak yang merupakan siswa atau mahasiswa dan hampir masyarakat mendapatkan dampak tersebut, hasil penelitian pun menunjukkan adanya dampak sosial terhadap para orangtua akibat kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Beberapa dampak tersebut adalah penurunan jumlah pengangguran akibat diberlakukannya PHK (Putus Hubungan Kerja) oleh pihak pabrik maupun perusahaan. Sebanyak 54% pekerja laki-laki yang berhenti bekerja dan 56% perempuan yang mengalami hal serupa. Banyak orangtua yang mengeluh akibat diberlakukannya belajar daring sebab hampir 80% segala tugas harus dikerjakan oleh para orangtua, terlebih bagi orangtua yang anak-anaknya berada di pendidikan sekolah dasar. Tingkat perceraian meningkat, menurut Sutiaji selaku Wali Kota Malang, hingga September 2020 setidaknya ada 2 ribu kasus perceraian yang terjadi di Kota Malang. Selain karena faktor ketidakcocokan, alasan lainnya adalah karena masalah ekonomi yang semakin sulit sebab pandemi. Alasan lainnya adalah karena adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pihak perempuan (jppn.com, 2020). Kurangnya interaksi sosial yang dilakukan antar masyarakat

sebab pandemi terjadi, seperti tidak lagi melangsungkan ibadah berjamaah di tempat-tempat ibadah umum (Masjid), tidak adanya kegiatan perkumpulan masyarakat, tidak diadakannya kegiatan ketika hari-hari besar seperti peringatan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus lalu, dan tingkat komunikasi atau silaturahmi antar keluarga jauh jadi menurun akibat tidak diperbolehkannya pulang kampung.

Adapun dampak kebijakan COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan berbudaya masyarakat di Kota Malang menjadi sebagai berikut perubahan cara belajar-mengajar di Kota Malang yang biasanya secara langsung atau tatap muka, beralih sistem menjadi via daring dan memanfaatkan berbagai media sosial seperti WhatsApp, Email, hingga aplikasi Tik Tok. Bisnis atau usaha masyarakat di bidang online shop jadi lebih tinggi seperti dengan memanfaatkan penjualan lewat media sosial atau marketplace online, terlebih ketika diberlakukan penutupan kedai-kedai atau cafe di lingkungan masyarakat. Silaturahmi online yang mulai semarak terjadi di mana-mana, bahkan hingga adanya proses akad maupun resepsi pernikahan yang dilakukan secara online. Di Kota Malang, beberapa masyarakat pun mengalami panic buying atau pembelian bahan makanan secara berlebihan ketika pandemi karena dikhawatirkan akan terjadi krisis pangan. Termasuk juga beberapa alat kesehatan seperti pendeteksi suhu tubuh, masker, hingga alat tes covid. Meskipun terjadinya panic buying namun tingka konsumsi masyarakat di Kota Malang menurun, baik karena kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan harian, maupun sebagai sikap berjaga-jaga karena dikhawatirkan akan terjadinya krisis pangan

Tak hanya dirasakan oleh masyarakat, pemerintahan di Kota Malang pun ikut merasakan dampak dari kebijakan pemulihan ekonomi COVID-19 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi global. Beberapa dampak tersebut adalah Perubahan metode kerja pemerintah yang lebih terbatas karena untuk meminimalisir lemahnya ekonomi. Adanya kenaikan tingkat stress karena pemerintah perlu memberlakukan kebijakan baru ketika pandemi berlangsung.

Munculnya berita-berita hoax atau disinformasi yang memicu pemerintah harus lebih ekstra dalam mengupayakan penekanan terhadap informasi yang beredar agar tidak banyak meluas berita hoax tersebut. Prof. Arry menuturkan adanya ancaman pandemi terhadap stabilitas pemerintahan karena muncul sebuah opini publik akan ketidakpercayaannya terhadap pemerintah yang bisa mengikis legitimasi pemerintahan ([unpad.ac.id](http://unpad.ac.id)). Pemerintah mulai memberlakukan banyak kebijakan baru selama pandemi, dari mulai pembatasan sosial, hingga pemberian bansos (bantuan sosial) berupa sembako maupun uang kepada masyarakat terdampak pandemi khususnya di Kota Malang. Mulai dibuatnya lembaga layanan umum masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai keluhan atau masalah yang terjadi akibat dan pemulihan ekonomi COVID-19.

Dampak lain dirasakan juga oleh para tenaga kesehatan yang pada masa pandemi bertugas menjadi garda terdepan. Adapun beberapa dampak kebijakan COVID-19 yang dirasakan sebagaimana berikut kesulitan dalam melakukan hubungan sosial dengan keluarga karena pihak tenaga kesehatan lebih berpotensi untuk menularkan virus ke masyarakat. Adanya penilaian negatif dari masyarakat yang diterima oleh tenaga kesehatan sehingga seringkali memicu pengasingan, atau

tidak diterimanya tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat, bahkan di kampung halamannya sendiri. Perubahan pola kerja dan waktu kerja yang lebih tinggi karena lonjakan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Rizqon (2020) mengatakan bawa dalam langkah menangani dampak kebijakan COVID-19, tentunya seluruh stakeholders harus harus saling bahu membahu dalam memberikan penangan yang tepat. Kondisi ini pun tidak boleh terlepas pandang dari setiap kebijakan pemerintah dan bagaimana pelaksanaan operasionalisasi di lapangan. Di Kota Malang sendiri, terdapat sebuah lembaga yang dianggap harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Menurut portal online Malang Times.



## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat COVID-19, maka dapat ditarik kesimpulan Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan-kebijakan dengan cukup efektif dengan memperhatikan tujuan kebijakan, target kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat dan dampak kebijakan. Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang sangat sesuai dengan upaya pemulihan kondisi masyarakat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan berupa lima strategi percepatan pemulihan ekonomi hadapi pandemi COVID-19, yakni Malang Beli Produk Lokal (Malpro), Malang Berbagi (Malber), Malang Herbal (Malherb), Malang Digital Service (Maldis), dan Malang Bahagia (Malba). Selain itu digitalisasi produk IKM untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, rencana aksi TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kota Malang, refocusing anggaran, intergrasi mal pelayanan publik. penerapan aturan protokol kesehatan, vaksinasi. Semua kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan pemulihan yang terdiri dari bantuan Publik (*Public Assistance*), *The Housing Sector* (Rumah Sakit COVID), Pemulihan ekonomi (*Economic Recovery*), Pemulihan individu, keluarga dan sosial (*Individual, Family and Social Recovery*), Pemulihan Budaya (*Cultural Recovery*). Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga melakukan upaya pemulihan dengan memperhatikan komponen-komponen pemulihan (*recovery*) yaitu perencanaan, koordinasi, pengkajian, anggaran dan perlengkapan.

Pemerintah Kota Malang juga melakukan perencanaan untuk upaya pemulihan dan perbaikan konstruksi yang dapat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lembaga negara lainnya untuk mensukseskan tujuan dari upaya pemulihan disamping mengurangi resiko yang ada dengan mengakurasi mengenai informasi kerusakan yang terjadi. Hal ini akan membantu mengidentifikasi strategi yang paling baik untuk mempekerjakan sumberdaya yang memungkinkan dan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan.

## V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap Pemulihan Kondisi Ekonomi Masyarakat COVID-19, maka peneliti memberikan saran yaitu efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam upaya pemulihan di Masa Pandemi COVID-19 masih perlu beberapa hal yang harus disesuaikan kembali karena hasil dari penelitian ini hanya menggambarkan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan efektivitasnya dalam upaya pemulihan untuk masyarakat Kota Malang. Membuat program bantuan berupa insentif kepada masyarakat agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19. Serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial hingga ke tingkat RT dan RW. Tetap melakukan perencanaan dan koordinasi serta pengkajian lebih mendalam terhadap bagaimana kebijakan yang telah diimplementasikan benar-benar efektif. Selain itu perlu terus melakukan monitoring dan evaluasi atas tujuan kebijakan, target kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat dan dampak

kebijakan. Membangun sistem penyebaran informasi yang lebih menarik tentang bagaimana masyarakat melakukan pencegahan penularan COVID-19 sehingga dapat meminimalisir penularan terhadap orang lain, mengembangkan teknologi dengan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Sehingga proses penanganan pandemi COVID-19 di Kota Malang bisa berjalan secara optimal dan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Barry, J. M. (1997). *Rising tide: The great Mississippi flood of 1927 and how it changed America*. New York: Simon and Schuster.

Braun, V., Clarke, V. & Weate, P. (2016). *Using thematic analysis in sport and exercise research*. In B. Smith & A. C. Sparkes (Eds.), *Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise*. London: Routledge.

Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Carter, W. N. (2008). *Disaster Management A Disaster Manager's Handbook*. Mandaluyong City, Phil: Asian Development Bank

Clarke, L. B. (2006). *Mission improbable: Using fantasy documents to tame disaster*.

Coppola, D. P. (2007). *Introduction to International Disaster Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Danandjaja, James. (1994). *Antropologi Psikologi:Teori, Metode, dan Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dunn,William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Ferry, R. Anggoro Suryokusumo. (2008). *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing

Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donnelly, J.Jr, (1984). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi Keempat.Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Gregory, P. (2000). *IT Disaster Recovery Planning For Dummies*. Indiana: Wiley Publishing, Inc.
- Gustin, J. F. (2005). *Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers*. Lilburn: The Fairmont Press Inc.
- Haas, J. E., & Drabek, T. E. (1973). *Complex organizations: A sociological perspective*. New York: Macmillan.
- Haas, J. E., Kates, R., & Bowden, M. (1977). *Reconstruction following disaster*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hengki Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif (Ilmu Pendidikan Teologi)*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kimbal, R. W. (2015). *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Depublish.
- Lindsey, et al. (2012). *A Framework For Disaster Management*. USA: Habitat St.
- Luthfiah dan Fitrah, M. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Manesh, A. K. (2015). *Handbook Of Disaster And Emergency Management*. Gothenburg Sweden: Kompendiet.
- Marsella, A. J., Johnson, J. L., Watson, P., & Gryczynski, J. (2008). *Ethnocultural Perspectives on Disaster and Trauma: Foundations, Issues, and Applications*. New York: Springer.
- Martini dan Lubis. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung : Ghalia Indonesia
- Modh, S. (2015). *Introduction To Disaster Management*. Macmillan: Publishers India.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Niekerk, V. D. (2011). *Introduction To Disaster Risk Reduction*. Southern Africa: United States Agency for International Development.

Nugroho (2008). *Keperawatan Gerontik*. Buku Kedokteran EGC: Jakarta

\_\_\_\_\_. (2011). *Public Policy (edisi ketiga)*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Petterson, J. (2009). *A Review of The Literature and Programs on Local Recovery from Disaster*. Fairfax, VA: Publik Entity Risk Institue.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rittinghouse, J. W., & Ransome, J. F. (2005). *Business Continuity and Disaster Recovery for InfoSec Managers*. Burlington: Elsevier Digital Press.

Robbins, S. . (2001). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Terjemahan oleh: Arcan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

\_\_\_\_\_. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.

Sabda Ali Mifka & Makmur. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: PT. Reflika Aditama

Schneid, Thomas D. Collins, Larry, (2000). *Disaster management and preparedness*. Lewis Publisher.

Setiawan, A., Andalas Eggy Fajar, dan Sugiarti. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: UMMPress.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Spangle, W. (1991). *Rebuilding After Eartquakes: Lesson from Planners*. Portola Valley, CA: Author.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi, Kaidah Perilaku. Terjemahan Magdalena Yamin*. Jakarta: Erlangga

\_\_\_\_\_. (1980). *Efektivitas Organisasi*, Terj: Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaf dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Sutinah & Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: KENCANA.

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan (1<sup>st</sup> Ed)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Vale, L. J., & Campanella, T. J. (2005). *The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster*. New York: Oxford University Press.

Walujo, dkk. (2020). *Kapita Selekta Metode Penelitian*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

\_\_\_\_\_. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

### Artikel Jurnal

Berke, P., Kartez, J., & Wenger, D. (1993). *Recovery after disaster: Achieving sustainable development, mitigation, and equity*. *Disasters*, 93-109.

Bolin, R. C. (2010). *Disaster impact and recovery: A comparison of black and white victims*.

Bolin, R. C., & Stanford, L. (1991). *Shelter, housing and recovery: A comparison of U.S. disasters*. *Disasters*, 24-34.

Botes, A., M. A. McGeoch, H. G. Robertson, A. Niekerk, H. P. Davids, and S. L. Chown, (2006). *Ants, Altitude and Change in the Northern Cape Floristic Region*. *Journal of Biogeography* 33: 71-90.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

Khatibah. (2021). *Penelitian kepustakaan*. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*.

Maleka, S. (2015). *Strategic Management And Strategic Planning Process*. *South African*. 1, 1-29.

Matland, Richard E. (1995) *Syntesing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.5, No. 2.

Rubeen, C., & Barbee, D. (2015). *Public Administration Review*. *Disaster recovery and hazard mitigation: Bridging the intergovernmental gap. In emergency management: A challenge for public administration*, 57-63.

Schwab, J. (2008). *Planning for Post-Disaster Recovery and Reconstruction*. Chicago.

Sedah Ayu Fitriani. (2006). Skripsi. *Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Desa Ekonomi Simpan Pinjam di Kabupaten Pati*. Surakarta: (Tidak diterbitkan)

FISIP UNS

Suandi, I Wayan. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Weber M.A., Ernesto L. Schiffrin, White W.B., Samuel Mann L.H.L., Kenerson J.G., Flack J.M., Carter B.L., Materson B.J., Ram C.V.S., Debbie L. Cohen J.-C.C., Jean-Charles R.R., Taler S., Kountz D., Townsend R.R. and Chalmers J., 2014, *Risk factor profile for chronic non-communicable diseases: Results of a community-based study in Kerala, India*, Indian Journal of Medical Research, 131 (1), 53–63.

WHO. (2020). *Operational Guidance For Maintaining Essential Health Services During An Outbreak. 1–10*. [on-line]. Diakses pada tanggal 5 Februari 2020 dari <https://www.who.int/publications/i/item/COVID-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak>

Yanuarita, Heylen Amildha., & Haryati, Sri. (2020). *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya*, 2(2), 58-71. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2020.v02.i02>

Yuliana. (2020). *Corona virus diseases (Covid-19) Sebuah tinjauan literature*. Wellness and Healthy Magazine. Vol 2, No 1.

Nasrun, M. Ali. (2020). *Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020

Puspaningtyas, Anggraeny. (2020). *Optimalisasi Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 11. No. 1, 19-32. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>

Bintarto, Muhammad al Ikhwan & Setiawan, Yudi. (2021). *Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah

Ekonomi Islam. Vol. 7 No. 2. 571-576.  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>

## PERATURAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/1menkes/305/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/242/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu

Presiden Jokowi meneken aturan resmi yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

non- alam Penyebaran

## WEBSITE

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015, 31 Juli). Kebijakan Strategis BNPB 2015-2019. [on-line]. Diakses pada tanggal 24 januari 2021 dari <https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf>

Pemerintah Kota Malang. (2021, April 10). *Bangun optimisme pemulihan ekonomi malang raya*. [on-line]. <https://malangkota.go.id/2021/04/10/bangun-optimisme-pemulihan-ekonomi-malang-roya/>

\_\_\_\_\_. (2021, April 7). *Pemulihan ekonomi jadi prioritas kota malang pascapandemi covid-19*. [on-line]. <https://malangkota.go.id/2021/04/07/pemulihan-ekonomi-jadi-prioritas-kota-malang-pascapandemi-covid-19/>

\_\_\_\_\_. (2021, Mei 21). *Wali kota malang optimis pemulihan ekonomi kota malang lebih cepat*. [on-line]. <https://malangkota.go.id/2021/05/21/wali-kota-malang-optimis-pemulihan-ekonomi-kota-malang-lebih-cepat/>

\_\_\_\_\_. (2021, Mei 5). *OJK Dorong Pemulihan Ekonomi melalui Perbankan Syariah*. [on-line]. <https://malangkota.go.id/2021/05/05/ojk-dorong-pemulihan-ekonomi-melalui-perbankan-syariah/>

\_\_\_\_\_. (2021, Mei 4). *Kota malang ikuti rakor apeksi bahas pemulihan ekonomi*. [on-line]. <https://malangkota.go.id/2021/05/04/kota-malang-ikuti-rakor-apeksi-bahas-pemulihan-ekonomi/>

Badan Kota Malang Dalam Angka 2021. (2021, 26 Februari). Badan Pusat Statistik Kota Malang [on-line]. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021 dari

<https://malangkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/4ccb213f9a2a7ba007bf7c4/kota-malang-dalam-angka-2021.html>

Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Pengeluaran 2016 – 2020. (2021, 29 April). Badan Pusat Statistik Kota Malang [on-line]. Diakses pada tanggal 29 April 2021 dari <https://malangkota.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2020&Publikasi%5BkataKunci%5D=&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2020. (2021, 5 April). Badan Pusat Statistik Kota Malang [on-line]. Diakses pada tanggal 14 April 2021 dari <https://malangkota.bps.go.id/publication/2021/04/05/19581ed3c2900eb4f1df97fd/produk-domestik-regional-bruto-kota-malang-menurut-lapangan-usaha-2016---2020.html>

Inflasi Kota Malang 2020. (2021, 2 Februari). Badan Pusat Statistik Kota Malang [on-line]. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 dari <https://malangkota.bps.go.id/publication/2021/02/01/e7212dbfb013539aab129b7e/inflasi-kota-malang-2020.html>

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2020. (2020, 30 Desember). Badan Pusat Statistik Kota Malang [on-line]. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021 dari <https://malangkota.bps.go.id/publication/2020/12/30/1bb7e28d9ae122680e316edf/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-malang-2020.html>

Statistik Daerah Kota Malang 2020. (2020, 29 September). Badan Pusat Statistik Kota Malang [on-line]. Diakses pada tanggal 11 Februari 2021 dari <https://malangkota.bps.go.id/publication/2020/09/29/8a725e7cc315fc74012bc962/statistik-daerah-kota-malang-2020.html>

Coronavirus COVID-19 Global Cases. (2020). Worldmeter [on-line]. Diakses pada tanggal 11 Februari 2021 dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Peta sebaran COVID-19. (2020). Komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional [on-line]. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021 dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19. (2020). International Monetary Fund [on-line]. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 dari <https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020>

COVID-19 Indonesia terus naik: 'Orang yang tak taat protokol makin banyak' karena 'masyarakat menengah bawah tak paham?'. (2020, 4 Agustus). BBC News Indonesia [on-line]. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53553408>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### A. Identitas Diri

1. Nama : Ilham Maulana Dandi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 1 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat Di Malang : Jl. Simpang Akordion 173A
7. Alamat Asal : Dusun Selatan RT 002/RW 003  
Billa'an Kecamatan Proppo  
Kabupaten Pamekasan
8. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
9. Fakultas : Ilmu Administrasi
10. Jurusan : Administrasi Publik
11. Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
12. NIM : 175030101111009
13. Nomor Telepon : 083850215600
14. Alamat E-mail : [ilhamrezeptor87@gmail.com](mailto:ilhamrezeptor87@gmail.com)

##### B. Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Tahun
1.	TK Dharwa Wanita	2002-2005
2.	SDN Billa'an Proppo	2005-2011
3.	SMP Negeri 4 Pamekasan	2011-2014
4.	SMA Negeri 1 Pamekasan	2014-2017
5.	S-1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	2017-2021

### C. Pengalaman Magang

No	Tempat	Biro	Tahun

### D. Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	RSC (Research Study Club)	Staf Perpustakaan	2018
2.	RSC (Research Study Club)	Ketua Divisi Perpustakaan dan Teknologi	2019
3.	RSC (Research Study Club)	Ketua Umum	2020
4.	Governance Laboratory	Peneliti	2019
5.	Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan	Peneliti dan Analisis data	2021

### E. Pengalaman Kepanitiaan

No	Jabatan	Tahun
1.	Staff PDD HEO	2017
2.	Ketua Pelaksana Training and Seminar Research RSC	2018

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 lima strategi percepatan pemulihan ekonomi



Gambar 2 Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Malang Raya

Rujukan Covid 11-06-2021 20:35:07 Home Data Daftar RS Rujukan Login

DATA RUMAH SAKIT

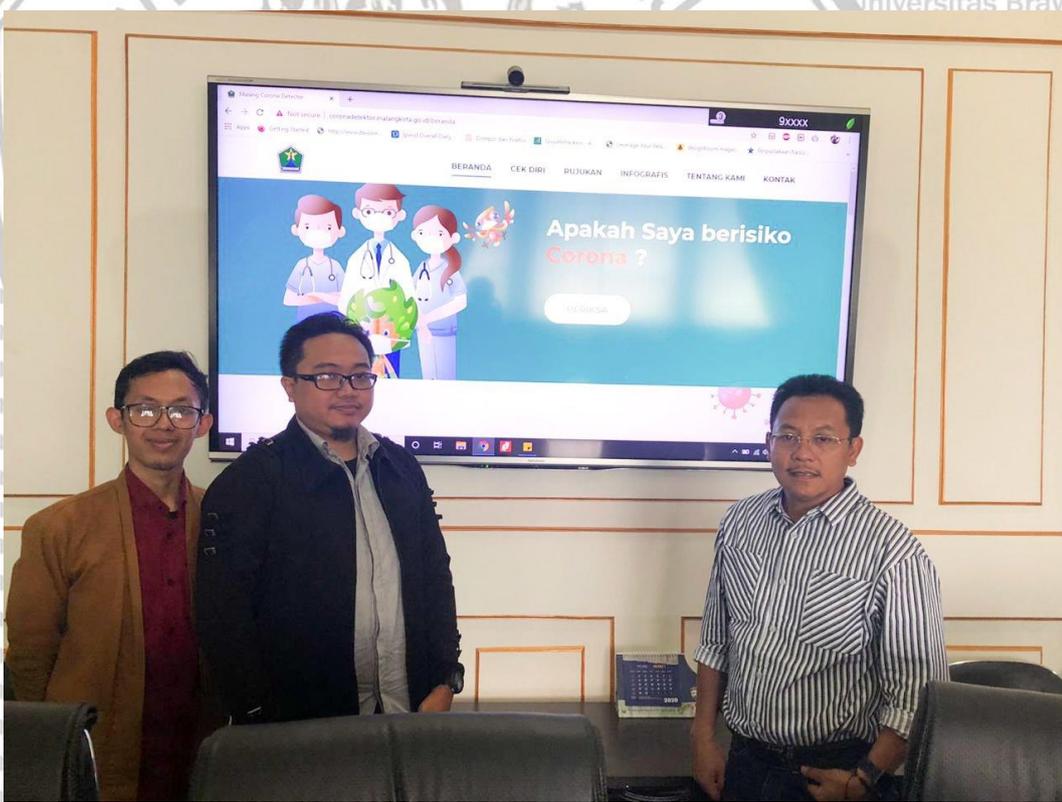
### DATA KETERSEDIAAN LAYANAN RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID

#	Waktu Update	Rumah Sakit	Ruang Isolasi Tekanan Negatif dengan Ventilator			Ruang Isolasi Tekanan Negatif tanpa Ventilator			Ruang Isolasi Natural Flow tanpa Ventilator			Kamar Operasi Covid			IGD Covid		
			Kapasitas	Terisi	Siap Digunakan	Kapasitas	Terisi	Siap Digunakan	Kapasitas	Terisi	Siap Digunakan	Kapasitas	Terisi	Siap Digunakan	Kapasitas	Terisi	Siap Digunakan
1	"2021-06-11 07:50:54 (0)	Rsud Dr. Saiful Anwar	15	6	9	73	22	51	117	0	117	3	0	3	20	1	19
2	"2021-06-11 08:24:38 (0)	Rst Dr. Soepraoen	8	1	7	26	9	17	14	0	14	0	0	0	0	0	0
3	"2021-06-11 07:23:07 (0)	Rumah Sakit Lavalette Malang	6	3	3	39	11	28	0	0	0	0	0	0	6	3	3
4	"2021-06-11 07:04:06 (0)	Rs Panti Waluya Sawahan	0	0	0	6	4	2	5	2	3	0	0	0	0	0	0
5	"2021-06-11 08:27:03 (0)	Rsud Kanjuruhan	6	1	5	23	3	20	16	1	15	0	0	0	1	1	0
6	"2021-06-11 07:57:52 (0)	Rsu Wawa Husada	4	4	0	32	9	23	10	3	7	1	0	1	3	0	3
7	"2021-06-11 09:00:56 (0)	Rs Prima Husada	4	2	2	2	1	1	49	9	40	2	0	2	0	0	0
8	"2021-06-11 09:12:43 (0)	Rsu Universitas Muhammadiyah Malang	3	1	2	10	4	6	50	6	44	1	0	1	3	0	3
9	"2021-06-11 11:13:09 (0)	Rs Islam Malang (unisma)	6	3	3	21	9	12	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10	"2021-06-11 12:39:23 (0)	Rsu Karsa Husada	8	4	4	26	9	17	2	0	2	1	0	1	4	2	2

Gambar 3 Bilik Disinfektan Virus Corona SiCo



Gambar 3 Peluncuran Aplikasi 'Malang Corona Detector'



Gambar 5 Penerimaan bantuan APD dari STIE Malangkucecwara



Gambar 6 Operasi Yustisi di Kota Malang



Gambar 7 patroli skala besar selama masa PPKM di Kota Malang



Gambar 8 PPKM mikro di Kota Malang



Gambar 9 Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat meninjau langsung proses pemakaman jenazah konfirmasi Covid-19



Gambar 10 Wali Kota Malang Sutiaji mensosialisasikan aturan PSBB di Kota Malang



Gambar 11 Penyaluran bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial kepada warga Kota Malang melalui PT Pos Indonesia



Gambar 12 Kebijakan Pemerintah Kota Malang khusus kendaraan luar kota



Gambar 13 Dana Bantuan Sosial Virus Corona Warga Kota Malang Cair Rp10 Miliar



### Lampiran 3 SE Wali Kota Malang tentang PPKM Kota Malang



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Organisasi Kemasyarakatan  
2. Organisasi Keagamaan  
3. Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR / TAHUN 2020  
TENTANG  
KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan dalam pencegahan dan / atau penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi masyarakat Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan untuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

## Lampiran 4 Peraturan Wali Kota Malang tentang PSBB Kota Malang

### PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Jawa Timur, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa di samping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease*

## Lampiran 5 SE Wali Kota Malang tentang PPKM darurat Kota Malang



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada  
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Pendidikan
5. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
6. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Malang
7. Seluruh Masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 35  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN  
MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

### A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran

## Lampiran 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Penerapan Protokol Kesehatan



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu pengaturan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27A dan Pasal 27B Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai jenis bencana yang terjadi;
- c. bahwa . . .

Lampiran 7 Intruksi Presiden Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum  
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus  
Disease 2019*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian;
  6. Para Gubernur; dan
  7. Para Bupati/Wali kota.

Untuk :